

**SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA MEMIMPIN
PEMERINTAH DARURAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1948-1949**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

YF. DINA ROSA
NIM : 001314023



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2004**

**SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA MEMIMPIN
PEMERINTAH DARURAT REPUBLIK INDONESIA (PDRI)
TAHUN 1948-1949**

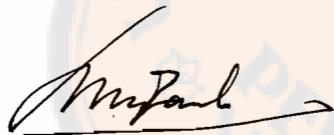
oleh :

YF. Dina Rosa

NIM : 001314023

Telah Disetujui oleh :

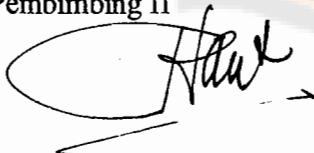
Pembimbing I



Drs. G. Moedjanto, M. A.

Tanggal.....

Pembimbing II



Drs. A. Kardiya Wiharyanto M. M.

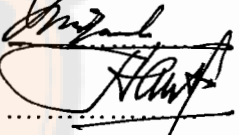
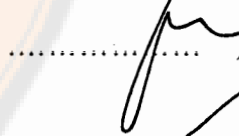
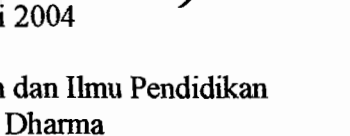
Tanggal.....

**SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA MEMIMPIN
PEMERINTAH DARURAT REPUBLIK INDONESIA (PDRI)
TAHUN 1948-1949**

Dipersiapkan dan ditulis oleh :
YF. Dina Rosa
NIM : 001314023

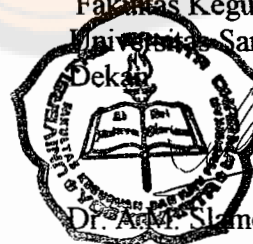
Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 31 Juli 2004
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Sutarjo Adisusilo. J.R	
Sekretaris	Drs. B. Musidi, M.Pd.	
Anggota	Drs. G. Moedjanto, M. A.	
Anggota	Drs. A. Kardiyat Wiharyanto, M. M	
Anggota	Drs. A.A Padi	

Yogyakarta, 31 Juli 2004

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma



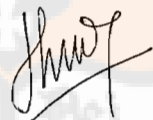
Dr. Agus Slamet Soewandi, M. Pd.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 31 Juli 2004

Penulis



YF. Dina Rosa

PERSEMBAHAN

Terima kasih.....

Telah mengajarku untuk membedakan yang benar dan yang salah

Mendorong ku untuk mempertahankan mimpi-mimpi ku

Menunjukkan pada ku untuk tidak terpengaruh oleh rintangan

Dan untuk mengubah kebingungan ku menjadi senyuman

Telah mengatakan bahwa kalian menyayangi ku

Menunjukkan pada ku betapa istimewanya cinta itu

Menghapuskan air mata ku kala aku sedih

Dan untuk menenangkan ku kala saat aku ingin marah

Telah membantu sesama dengan perbuatan baik kalian

Mengajarku bahwa akupun mesti menolong sesama

Memelukku ketika aku merasa sunyi

Dan membisikkan pada ku "Aku Sayang Padamu"

Terima kasih, keluarga ku, atas segala yang kalian lakukan

Entah bagaimana jadinya diri ku tanpa kalian

(James Malinchak)

Ku persembahkan karya sederhana ini untuk:

- *Tuhan Yesus Kristus*
- *Bapak dan Ibu yang aku cintai, Kakak-kakakku, Ririn, Gervacia, Fibri, dan Adik ku Lini yang tersayang*
- *Seseorang yang sangat aku sayangi, yang kelak akan menjadi pendamping hidupku.*

MOTTO

“Belajar Dari Kegagalan Adalah Kunci Untuk meraih Kesuksesan”

(YF. Dina Rosa)

“Menjadi Diri Sendiri lebih Baik Daripada Harus Menjadi Pribadi Orang Lain Seperti Orang Yang Tidak Memiliki Pendirian”

(YF. Dina Rosa)

ABSTRAK

Syafruddin Prawiranegara Memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Tahun 1948-1949.

Oleh : YF. DINA ROSA

Skripsi yang berjudul “**Syafruddin Prawiranegara Memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) tahun 1948-1949**”, memiliki tujuan untuk membahas serta menganalisa tiga permasalahan pokok, yaitu : (1) Mengapa Syafruddin Prawiranegara mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI); (2) Bagaimana peranan Syafruddin Prawiranegara dalam Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI); dan (3) Bagaimana dampak Syafruddin Prawiranegara mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) bagi perjalanan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah metode sejarah yang mencakup; heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah sosial dan sejarah politik. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis.

Kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia ternyata tidak membuat Belanda angkat kaki dari wilayah Republik Indonesia. Agar dapat menguasai wilayah Republik Indonesia, Belanda mengadakan perjanjian dengan bangsa Indonesia. Namun setiap perjanjian tersebut selalu dilanggar oleh Belanda. Salah satu perjanjian yang dilanggar oleh Belanda adalah Perjanjian Renville. Adanya agresi militer Belanda ke II terhadap kota Yogyakarta merupakan wujud dari pelanggaran terhadap Perjanjian Renville. Dengan adanya agresi militer Belanda II, maka kota Yogyakarta jatuh dan para pemimpin Republik ditawan oleh Belanda. Sebelum tertangkap, para pemimpin Republik sempat mengadakan sidang yang memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatra untuk mendirikan pemerintah darurat Republik Indonesia.

Setelah mendengar berita bahwa kota Yogyakarta jatuh dan para pemimpin Republik Indonesia ditawan oleh Belanda, maka pada tanggal 22 Desember 1948 Syafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Halaban (Sumatra Barat). Bersama anggota PDRI lainnya di Sumatra, Syafruddin Prawiranegara bergerilya mengobarkan semangat rakyat dari satu tempat ke tempat lainnya. Selama pemimpin PDRI bergerilya di Sumatra, ternyata Pemimpin Republik Indonesia yang ditawan oleh Belanda mengadakan perundingan kemabali dengan Belanda yang menghasilkan Persetujuan Roem –Royen. Dengan adanya Persetujuan Roem-Royen, maka Syafruddin Prawiranegara beserta pemimpin PDRI lainnya kembali ke Yogyakarta dan mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno.

Meskipun Syafruddin Prawiranegara memimpin PDRI hanya beberapa bulan, yaitu mulai tanggal 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949, namun telah memberikan banyak perubahan bagi bangsa Indonesia. Dengan berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), maka Republik Indonesia masih tetap ada dan tidak hancur seperti yang dibayangkan oleh Belanda.

ABSTRACT

**SYARFUDDIN PRAWIRANEGARA LED THE EMERGENCY
GOVERNMENT IN THE REPUBLIC OF INDONESIA 1948 – 1949**

By:

Y.F. DINA ROSA

The thesis titled “Syafuruddin Prawiranegara Led the Emergency Government of Indonesian Republic 1948-1949”. It had the purpose to discuss and analyze the three main problems, namely: (1) Why he built the emergency government in the Republic of Indonesian, (2) How the his role in the government, and (3) How the impact of building the government for the course of Indonesian to defense its Independence.

In the writing of this thesis, the method used was the historical including heuristic, critic of source, interpretation and historiography and the approach was the social and political history. While the writing was the descriptive analysis.

The Independence gained by Indonesia, in fact, it did not make the Dutch went away from the territory in the Republic of Indonesian. In order to dominate the territory, the Dutch held the agreement with Indonesia. However, every agreement always to be violated by the Dutch. One of the agreements was the agreement of Renville. The existence of Dutch’s military aggression II toward the city of Jogjakarta was the form of violation toward the agreement. With the existence of Dutch’s military aggression II so that the city of Jogjakarta was fallen and the leaders of the Republic was held out by the Dutch. Before they were captured, they had a chance to hold the session giving the mandate to Syafuruddin Prawiranegara being staying in Sumatra to build the emergency government in the Republic of Indonesia.

After hearing the news that the city of Jogjakarta was fallen and the leaders of Republic was held out by the Dutch, so on the December 22, 1948 Syarifuddin Prawiranegara formed the emergency government (PDRI) in Halaban (West Sumatra). Along with the other members in Sumatra, he waged to stir up people’s spirit from one place to the others. As long as the leader of PDRI waged in Sumatra, in fact, the other leaders of Republic held out by the Dutch holding the meeting back with the Dutch that resulted the agreement of Roem – Royen. With the existence of the agreement so Syafuruddin Prawiranegara along with the other leaders of PDRI returned to Jogjakarta and gave back the mandate to President Soekarno.

Although Syafuruddin Prawiranegara only led PDRI for several months, that was, starting on December 22 1948 to July 13 1949, however he had given a lot of changes for the Republic of Indonesia. By building the emergency government (PDRI), the Republic of Indonesia still remained exist and did not destroy as imagined by the Dutch.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Syafrudin Prawiranegara Memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia tahun 1948-1949”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Moedjanto, M.A selaku pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk yang sangat berharga bagi penulis.
4. Bapak Drs. A. Kardiyat Wiharyanto, M.M selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan mengoreksi skripsi hingga selesai.
5. Segenap dosen dan karyawan FKIP, khususnya Program Studi Pendidikan Sejarah, yang telah membantu penulis selama berkuliah di Universitas Sanata Dharma.

6. Karyawan perpustakaan Universitas Sanata Dharma, yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam mendapatkan literatur yang diperlukan oleh penulis.
7. Karyawan Perpustakaan Hatta Yogyakarta, yang telah membantu penulis dalam melengkapi literatur.
8. Bapak Drs P. Djumar Winarto dan Ibu Cristina Ursula Sugiyati yang telah memberikan biaya selama penulis menuntut ilmu hingga memperoleh gelar sarjana.
9. Sahabatku Andrea, yang selalu membantu di masa-masa sulitku.
10. Kekasihku Fransiskus Budi P, yang telah memberikan dorongan yang berguna bagiku.
11. Keluarga Om Tarmono yang telah membantu penulis selama berada di Singkawang.
12. Rekan-rekan angkatan' 00 : Andrea (terimakasih untuk semuanya), Dodi, Iva (seneng bisa dekat sama kamu), Dani (Jangan cemberut terus), Tini (jangan sedih terus), Endah (terimakasih untuk solusinya), Desri, Inung, Leni, Dwi, Nugroho, Dimas, Victor, Bintarto, Sumardi, Ike, Vicky, Rina, Yutik, Srimuj, Tari, Muji, Andi, Yulius, Eka, Agnes, Vivin, Rahma, Elis, Wiwin, Merry Christin, Merry lala, Nuke, Preh, Roswita, Gita, Tri, Aldo, Encun, Sri Yani, Coy, Yani, Adi, Maria, Emi, Endarti, Bowo, Nunik, Pras (aku bahagia punya teman seperti kalian), Saudara ku : Mbak Endah, Mas Erwin, Mas joko. Temen Kos : Sisil, Mbak Miss, Nur (senang punya sahabat kamu), Anik, Tepu STIPER (terimakasih sudah jadikan aku adik kamu), Tari, Yanti, Mbak Ning, yuli, Tina dan Risma.

13. Keluarga Minomartani, Mbah Rejo (terimakasih untuk doa yang diberikan), Om Heri (makasih atas solusi yang diberikan), Dina, Mbak Ira dan Mbak Win dan untuk keluarga di Muntilan.

14. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata dengan menyadari segala kekurangan dan kelemahan, maka segala kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Tinjauan Pustaka	14
E. Kajian Teori	16
F. Metodologi Penulisan	19
G. Metode dan Pendekatan	19
H. Sistematika Penulisan	23



BAB II	LATAR BELAKANG SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA MENDIRIKAN PEMERINTAH DARURAT REPUBLIK INDONESIA (PDRI)	26
	A. Belanda Melanggar Perjanjian Renville	26
	B. Jatuhnya Kota Yogyakarta	41
	C. Presiden Soekarno Mengeluarkan Mandat Kepada Syafruddin Prawiranegara.....	52
BAB III	PERANAN SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA SELAMA MEMIMPIN PEMERINTAH DARURAT REPUBLIK INDONESIA (PDRI)	58
	A. Proses Terbentuknya PDRI Pimpinan Syafruddin Prawiranegara .	58
	B. Perjalanan PDRI Pimpinan Syafruddin Prawiranegara	70
	C. Syafruddin Prawiranegara Mengembalikan Mandat Kepada Soekarno.....	85
BAB IV	DAMPAK SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA MENDIRIKAN PDRI BAGI PERJALANAN BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA	92
BAB V	SIMPULAN.....	98
	DAFTAR PUSTAKA.....	100
	LAMPIRAN	103

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Manfaat Penulisan Skripsi “ Syafruddin Prawiranegara
Memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia Tahun
1948-1949” Dalam Pengajaran Sejarah. Halaman 104.
- Lampiran 2 : Silabus. Halaman 112.
- Lampiran 3 : Gambar Pemimpin PDRI Syafruddin Prawiranegara. Halaman
118.
- Lampiran 4 : Gambar Radio Zender YBJ-6. Halaman 119.
- Lampiran 5 : Gambar Pemimpin PDRI Ketika Akan Kembali
Ke Yogyakarta. Halaman 120.
- Lampiran 6 : Peta Perjalanan PDRI di Sumatra. Halaman 121.
- Lampiran 7 : Kronologis Peristiwa di sekitar Berdirinya PDRI Tahun 1948-
1949. Halaman 122.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan dari tangan Jepang. Pada hari itu pula, rakyat Indonesia datang beramai-ramai menuju ke rumah kediaman Ir. Soekarno untuk menyaksikan peristiwa penting bagi sejarah bangsa Indonesia. Tepat di halaman depan rumah Ir. Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta, yang merupakan tempat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di teras dan ruangan tengah dari rumah itu tampak tokoh rakyat dari seluruh daerah di Indonesia yang juga menunggu saat-saat penting dikumandangkannya teks Proklamasi.

Tepat pukul 10.00 pagi, Ir. Soekarno yang berpakaian rapi disaksikan oleh Mohammad Hatta dan segenap rakyat Indonesia, menyatakan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI)¹. Setelah Proklamasi dibacakan Oleh Soekarno, secara resmi Sang Merah Putih dikibarkan di alam Indonesia yang berdaulat. Gema Proklamasi telah membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk memiliki kemerdekaan dan kedaulatan yang sangat dinantikan oleh seluruh bangsa Indonesia. Proklamasi bagi bangsa Indonesia merupakan teriakan kemerdekaan yang menghendaki berakhirnya penjajahan di Tanah Air Republik Indonesia.

¹ Dwi Purwoko, *Perjuangan Pemerintahan Republik Indonesia (PDRI) Sebuah Remungan Bagi Generasi Muda Muslim*, Jakarta : Media Da'wah, hal. 4

Setelah lepas dari Jepang bangsa Indonesia dihadapkan oleh berbagai tantangan. Tantangan tersebut tidak hanya datang dari luar negeri tetapi juga datang dari dalam negeri sendiri yang tidak menginginkan persatuan dalam tubuh bangsa Indonesia. Bagi Belanda kemerdekaan Indonesia yang telah diperoleh dari tangan Jepang dijadikan kesempatan untuk menyusup ke wilayah Indonesia dan berusaha menghancurkan Republik Indonesia.

Dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu dalam perang dunia II, maka pihak Sekutu mengeluarkan perintah kepada Jepang agar memelihara status quo di masing-masing wilayah termasuk Indonesia. Pada tanggal 29 September 1945 Mayor Green Halgh, yang merupakan salah seorang Perwira Sekutu menginjakkan kakinya di Kebayoran. Adapun tugas Green Halgh adalah untuk mempersiapkan pembentukan markas besar tentara Sekutu di Jakarta. Tentara Sekutu ini merupakan komando khusus dari Southeast Asia Command (SEAC) yang diberi nama Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) di bawah Koordinasi Letnan Jenderal Sir Philip Chrishsor.

Pada awalnya kedatangan Sekutu di Indonesia tidak mendapatkan reaksi dari pemerintah dan rakyat Indonesia, akan tetapi setelah diketahui bahwa pasukan Sekutu (Inggris) membawa orang-orang NICA (Netherland Indies Civil Administration) yang dengan terang-terangan ingin menegakkan kembali kekuasaan kolonial di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia dan rakyat Indonesia mulai memprotes.² Sebagai bentuk protes terhadap NICA yang akan membentuk Pemerintahan Kolonial Belanda kembali, maka pada akhir tahun

² *Ibid*, hal. 10.

1945 rakyat Indonesia mengadakan perlawanan terhadap Sekutu dan NICA. Daerah Jawa Barat merupakan daerah yang dianggap sebagai tempat terjadinya perlawanan yang gigih terhadap tentara Sekutu dan pasukan NICA, sehingga kekuatan militer sekutu banyak ditempatkan di daerah Jawa Barat.

Pertentangan antara kedua belah pihak, baik Belanda maupun Indonesia pun semakin memanas. Untuk mengatasi konflik tersebut, Pemerintah RI di bawah Kabinet Syahrir mengadakan Perundingan di Linggajati, dekat Cirebon. Delegasi dari Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Syahrir, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Schermerhorn. Pada tanggal 15 November 1946 perundingan itu menghasilkan persetujuan yang terdiri atas 17 pasal. Salah satu isi persetujuan tersebut adalah : Pemerintah Belanda mengakui Pemerintah Republik Indonesia secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatra.

Hasil dari persetujuan tersebut, Pemerintah Belanda mengadakan gencatan senjata dengan pihak Republik Indonesia. Apabila timbul persengketaan dan tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka persoalan tersebut akan diusahakan melalui perwasitan (arbitrase). Supaya persetujuan tersebut berlaku, maka diperlukan persetujuan dari masing-masing negara. Dengan perdebatan yang seru akhirnya pihak Belanda maupun Indonesia menyetujui perjanjian tersebut. Pada tanggal 25 Maret 1947 dilakukan pertukaran naskah Perjanjian Linggajati dan perjanjian tersebut dinyatakan berlaku.

Setelah Persetujuan Linggajati disetujui oleh kedua belah pihak, muncul perbedaan penafsiran misalnya mengenai pangakuan de facto. Perbedaan penafsiran ini sulit untuk dipecahkan sehingga muncul konflik. Belanda

mengakhiri konflik dengan melancarkan agresi militernya yang pertama, pada tanggal 21 Juli 1947. Dengan demikian, Belanda telah menghapuskan gencatan senjata secara sepihak dan menyatakan dirinya tidak terikat lagi dengan persetujuan Linggajati.

Rentang waktu antara tanggal 21 Juli sampai 4 Agustus 1947 merupakan masa berlangsungnya agresi Belanda I. Agresi militer I ini telah menimbulkan prakarsa dari negara Australia untuk mengundang Dewan Keamanan PBB agar melaksanakan sidang darurat. Australia mengajukan resolusi yang mendesak agar kedua belah pihak bertemu untuk menghentikan permusuhan. Resolusi ini di terima oleh PBB sehingga Indonesia dan Belanda sepakat untuk melakukan gencatan senjata mulai tengah malam tanggal 4 dan 5 Agustus 1947.

Untuk menengahi pertikaian tersebut, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Jasa Baik yang beranggotakan tiga negara yaitu Belgia, Australia dan Amerika Serikat. Berkat jasa KTN, diselenggarakanlah perundingan di sebuah kapal milik Amerika Serikat yang bernama Renville. Dalam perundingan tersebut, delegasi Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifudin sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Abdulkadir Wijoyoatmojo. Perundingan ini menghasilkan Persetujuan Renville. Agresi militer Belanda I dapat diakhiri dengan penandatanganan Persetujuan Renville.

Pada awalnya Perdana Menteri Amir Syarifudin sebagai ketua delegasi Republik Indonesia menolak perjanjian tersebut, begitu pula dengan Presiden dan Wakil Presiden beserta partai-partai seperti Masyumi, PNI, dan Syahrir yang jelas-jelas menolak perjanjian itu. Tetapi laporan dari berbagai panglima tentara

kepada Presiden Soekarno yang menyatakan bahwa persediaan amunisi begitu menipis, serta adanya kepastian bahwa penolakan berarti serangan baru dari pihak Belanda secara hebat³. Bila Republik Indonesia menolak perjanjian Renville, maka akan terjadi peperangan yang akan membawa korban lebih banyak dari pihak Republik. Alasan inilah yang menyebabkan pemimpin-pemimpin Indonesia menyetujui Perjanjian Renville, walaupun disadari dengan perjanjian Renville banyak menimbulkan kerugian bagi Republik Indonesia, karena wilayah kekuasaan Indonesia menjadi semakin sempit. Sedangkan daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda adalah daerah yang subur.

Setelah ditandatanganinya Perjanjian Renville, timbullah banyak reaksi terutama dari beberapa partai diantaranya Masyumi, Syahrir dan PNI yang menarik dukungannya terhadap Kabinet Amir Syarifudin yang dianggap gagal dalam mengambil suatu keputusan. Akibatnya, pada tanggal 23 Januari 1948 Kabinet Amir Syarifudin jatuh. Setelah Kabinet Amir Syarifudin mengembalikan mandat, maka Presiden Soekarno menunjuk Hatta untuk membentuk kabinet. Pada tanggal 29 Januari Kabinet Hatta dibentuk, dengan programnya sebagai berikut :⁴

- a. Berunding atas dasar "Renville".
- b. Mempercepat pembentukan NIS.
- c. Rasionalisasi dan Rekonstruksi.
- d. Pembangunan.

³ G. Moedjanto, 1989, *Indonesia Abad Ke-20, jilid 2*, Yogyakarta : Kanisius, hal 22.

⁴ A.H Nasution, Djenderal, 1968, *Tentara Nasional Indonesia*, (jilid II), Cetakan Pertama, Djakarta : Seruling Masa, hal. 129.

Belum selesai masalah yang dihadapi Indonesia dengan Belanda, di dalam negeri juga terjadi insiden yang dikenal dengan pemberontakan PKI di Madiun. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifudin, ternyata tidak membuat puas Amir Syarifudin sebagai pemimpin kabinet tersebut. Setelah kegagalannya dalam kabinet karena tidak mendapatkan dukungan dari partai-partai, Amir Syarifudin kemudian melakukan penghianatan. Sebagai wujud dari penghianatannya, Amir Syarifudin mendirikan FDR (Fron Demokrasi Rakyat) yang dibentuk pada tanggal 28 juni 1948. Dengan berdirinya FDR maka Amir Syarifudin berusaha melakukan tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan Pemerintahan Republik Indonesia. Berbagai macam tindakan yang dilakukan oleh Amir Syarifudin untuk menghancurkan Republik Indonesia diantaranya :⁵

- a. Pembatalan Persetujuan Renville.
- b. Penghentian perundingan dengan Belanda sampai mereka menarik diri dari bumi Indonesia.
- c. Nasionalisasi semua kekayaan Belanda tanpa pemberian ganti rugi.
- d. Pembubaran kabinet Presidensil Hatta dan pembentukan kabinet Parlementer dimana wakil-wakil FDR diikutsertakan dengan menduduki kursi-kursi penting.

Dengan cepat Hatta memberikan tanggapan terhadap program yang diajukan oleh FDR. Hatta menyetujui program tersebut, namun Hatta menolak apabila untuk melaksanakan program tersebut, Kabinet Hatta harus dibubarkan. Akhirnya rencana FDR dapat digagalkan. Keinginan Amir Syarifudin untuk menghancurkan Republik Indonesia tidak hanya sampai disitu. Kedatangan Suripno dan Muso dari Moskow membawa angin segar bagi Amir Syarifudin

⁵ G. Moedjanto, *op . cit*, hal 31

untuk dapat menjatuhkan Kabinet Hatta. Pada tanggal 19 September 1948 diumumkan pembentukan pemerintahan yang diberi nama "Soviet RI".⁶ Berdirinya negara Soviet RI yang diProklamirkan oleh PKI, berarti telah menusuk Republik Indonesia dari belakang yang dapat mempersulit kedudukan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan pada saat itu Republik Indonesia masih dipusingkan dengan sikap Belanda.

Sebagai reaksi terhadap pemberontakan PKI di Madiun, Indonesia menempatkan TNI guna menumpas pemberontakan PKI. Pemerintah menugaskan divisi Siliwangi dan divisi Brawijaya untuk merebut kembali Madiun. Pada tanggal 30 September Madiun dapat direbut kembali dari tangan PKI. Akhirnya para tokoh-tokoh PKI dapat ditangkap, antara lain Muso yang tertembak mati di Somoroto, Kabupaten Magetan, Karesidenan Madiun Jawa Timur dan Amir Syarifudin tertangkap di daerah Randu Blatung, kabupaten Purwodadi, Jawa Tengah pada tanggal 4 Desember 1948.

Pemberontakan PKI di Madiun merupakan tragedi terpahit bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bangsa yang masih berusia balita tersebut harus menghadapi banyak tantangan dari dalam maupun dari luar yang datang hampir bersamaan. Perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini merupakan penghinaan terhadap bangsanya sendiri dan merupakan tindakan seorang yang pengecut.

Belum lagi masalah PKI dapat diselesaikan secara tuntas, Indonesia harus menghadapi tantangan yang berasal dari luar yang dilancarkan oleh Belanda. Serangan Belanda terhadap Indonesia ini dikenal dengan agresi militer II yang dilancarkan pada tanggal 19 Desember 1948.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *30 tahun Indonesia Merdeka*, 1981, Jakarta: Tiara Pustaka, hal 184.

Menjelang jam 05.30 pagi, tanggal 19 Desember 1948 datang secara bergelombang pesawat terbang milik Belanda di atas wilayah Yogyakarta dan lapangan terbang Maguwo sambil melakukan penembakan dan pemboman⁷. Dalam waktu yang singkat ibukota Republik Indonesia, Yogyakarta dapat diduduki oleh Belanda. Kemudian Belanda menangkap Presiden dan Wakil Presiden beserta para menteri. Dan mengasingkan mereka ke Prapat dan Bangka. Menurut pemikiran Belanda bila Yogyakarta yang merupakan pusat Pemerintahan Republik Indonesia jatuh, maka Belanda dapat dengan mudah menyingkirkan pimpinan pemerintahan serta pimpinan militernya dapat disingkirkan sehingga Republik Indonesia dapat segera dilenyapkan.⁸

Ternyata apa yang telah dipikirkan oleh Belanda meleset, karena sebelum tertangkap Presiden dan Wakil Presiden beserta para menteri sempat mengadakan sidang kabinet. Dalam sidang kabinet diputuskan bahwa para menteri akan tetap berada di kota dan tidak akan bergerilya, hal ini dikarenakan pengawalan militer tidak cukup dan apabila mereka tetap berada di kota, maka akan dekat dengan KTN.

Di samping itu pemerintah mengambil suatu keputusan yang amat penting dalam mempertahankan wilayah Republik Indonesia agar tidak hancur. Dalam keputusan tersebut Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia yang sedang berada di Sumatera untuk membentuk "Pemerintah Darurat Republik

⁷ Yayasan 19 Desember 1948, 1994, *Perang Rakyat Semesta (1948-1949)*, Jakarta : Balai Pustaka, hal. 27.

⁸ Abubakar Loebis, 1992, *Kilas Balik Revolusi*, Jakarta : Universitas Indonesia, hal. 273.

Indonesia”, hal ini dikarenakan pemerintah pusat tidak lagi dapat menjalankan tugas dan kewajibannya⁹. Mandat pemerintah itu dikirimkan kepada Syafruddin Prawiranegara lewat telegram/radiogram. Namun mandat itu tidak pernah sampai ke tangan Syafruddin Prawiranegara, hal ini dikarenakan hubungan antara Yogyakarta dan Sumatra terputus sebagai akibat adanya agresi militer Belanda II. Syafruddin Prawiranegara hanya mendapatkan kabar, bahwa pimpinan Republik Indonesia ditawan oleh Belanda. Sebagai seorang yang cakap, Syafruddin Prawiranegara mengambil tindakan-tindakan untuk mengantisipasi kekosongan dalam pemerintahan. Pada tanggal 22 Desember 1948 Syafruddin Prawiranegara mendirikan PDRI di Halaban (Sumatra Barat), yaitu sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Sago, kira-kira 16 Km sebelah timur kota Payakumbuh.

Dipilihnya Syafruddin Prawiranegara untuk memimpin PDRI dengan berbagai pertimbangan bahwa Syafruddin yang di pandang oleh Wakil Presiden/Perdana Menteri Mohammad Hatta sebagai anggota kabinet yang paling cakap dan paling cepat bergerak¹⁰. Pada saat memimpin PDRI usia Syafruddin Prawiranegara baru 37 tahun, usia yang masih sangat muda bila harus memimpin negara dengan tanggung jawab dan jabatan yang harus dipikulnya dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Syafruddin Prawiranegara lahir di Anyer Kidul, Banten pada tanggal 28 Februari 1911¹¹. Ia merupakan anak kedua dari pernikahan Arsjad Prawiraatmadja dengan Noera'ini. Sejak kecil Syafruddin Prawiranegara tinggal bersama Ayah dan Ibu tirinya, karena sejak kecil Ibu kandung Syafruddin Prawiranegara bercerai dengan Ayahnya. Baru setelah Syafruddin Prawiranegara berumur 7 tahun, ia

⁹ Lihat Lampiran 3, hal. 118.

¹⁰ Ajip Rosidi, 1986, *Syafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*, Jakarta : Inti Idayu Press, hal. 110.

¹¹ *Ibid*, hal 3.

bertemu dengan Ibu kandungnya. Dalam kehidupan sehari-harinya Syafruddin Prawiranegara biasa di panggil dengan sebutan Kuding.

Pada tahun 1925 Syafruddin Prawiranegara mengenyam pendidikan di ELS (Europeesche Lagere School) atau sekolah rendah untuk orang Eropa yaitu orang Belanda atau Eropa lainnya serta yang dianggap sederajat. Setelah lulus dari ELS Syafruddin Prawiranegara melanjutkan sekolahnya di Mulo pada tahun 1928. Untuk meneruskan sekolah di MULO, Syafruddin Prawiranegara harus berpisah dengan keluarganya di Ngawi dan pindah ke Madiun untuk bersekolah di MULO. MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) yaitu pendidikan dasar yang hampir sama dengan SMP sekarang. Setelah tamat dari Mulo, pada tahun 1931 Syafruddin Prawiranegara melanjutkan sekolah AMS (Algemeere Middelbare School) bagian A di Bandung. Hal ini dikarenakan Syafruddin Prawiranegara menaruh minat yang besar terhadap kesusastraan. Selama bersekolah di AMS, Syafruddin Prawiranegara banyak mempelajari buku-buku kemasyarakatan termasuk sosialisme dan komunisme. Setelah menamatkan sekolah di AMS, Syafruddin Prawiranegara melanjutkan sekolahnya di RHS (Recht Hoge School atau sekolah tinggi hukum) Jakarta dan pada tahun 1939 Syafruddin Prawiranegara memperoleh gelar sarjana hukum (Mr).

Sesudah menyelesaikan sekolahnya, Syafruddin Prawiranegara kemudian memperoleh pengalaman bekerja di bagian keuangan pemerintah Belanda pada tahun 1940 sampai 1946. Ia merupakan ahli fiskal yang ikut serta di dalam penyusunan konsep perencanaan ekonomi Indonesia bersama Hatta sebelum Proklamasi dikumandangkan. Di tahun 1945 setelah dikumandangkannya Proklamasi Syafruddin Prawiranegara kemudian menjadi anggota BP-KNIP sampai pada tahun 1946. Di tahun 1946 Syafruddin Prawiranegara menjabat sebagai menteri keuangan.

Ketika terjadinya agresi militer II, Syafruddin Prawiranegara menjabat sebagai Menteri Kemakmuran dalam Kabinet Hatta dan sedang berada di Bukit tinggi. Terjadinya agresi militer II mengakibatkan jatuhnya kota Yogyakarta dan penangkapan terhadap para Pemimpin Republik Indonesia. Sebagai seorang yang memiliki semangat patriotisme, Syafruddin Prawiranegara merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan Republik Indonesia. Syarifuddin Prawiranegara merupakan orang yang tepat untuk menggantikan posisi Soekarno sebagai pemimpin dan memimpin perjuangan untuk mempertahankan Republik Indonesia agar tidak jatuh ke tangan Belanda. Merupakan pilihan yang tepat apabila Soekarno dan Mohammad Hatta beserta para menteri memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari kehancuran karena adanya agresi militer Belanda II. Dengan didirikannya PDRI, maka Republik Indonesia masih tetap ada dan tidak hancur seperti yang dibayangkan oleh Belanda sebelumnya.

Walaupun Sumatera terpisah dengan Jawa, namun pemerintahan antara Jawa dan Sumatera tetap berjalan seirama dengan jalannya revolusi di Indonesia. Tekad untuk mempertahankan Republik Indonesia menjadi landasan terkuat dalam perjuangan bangsa Indonesia yang memiliki moto "Sekali Merdeka Tetap Merdeka". Hal ini telah menjadi pendorong bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu mempertahankan Ibu Pertiwi.

Sejarah PDRI merupakan sejarah yang memiliki nilai nasionalis sehingga perlu diwariskan kepada generasi muda. Hal ini dikarenakan setelah terbentuknya PDRI, maka pemerintahan Republik Indonesia berjalan terus dan tidak terhenti di

tengah jalan, meskipun Presiden dan Wakil Presiden beserta menteri telah tertangkap oleh Belanda, namun perjuangan bangsa Indonesia tetap berjalan terus. Dengan mengungkapkan kembali sejarah PDRI, maka akan didapat nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Sehingga perlu kiranya sejarah Syafruddin Prawiranegara ini ditulis dalam Skripsi.

B. Rumusan Masalah

Syafruddin Prawiranegara merupakan seorang tokoh yang memiliki peranan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan Syafruddin Prawiranegara untuk mendirikan PDRI merupakan tindakan seorang pemberani dan patut mendapatkan penghormatan. Dalam skripsi yang berjudul “ Syafruddin Prawiranegara Memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) tahun 1948-1949”, Penulis mengambil beberapa rumusan masalah yang akan di tulis dalam skripsi ini yaitu :

1. Mengapa Syafruddin Prawiranegara mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) ?
2. Bagaimana peranan Syafruddin Prawiranegara selama memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) ?
3. Bagaimana dampak Syafruddin Prawiranegara mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) bagi perjalanan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mengapa Syafruddin Prawiranegara mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
- b. Untuk mengetahui bagaimana peranan Syafruddin Prawiranegara selama memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).
- c. Untuk mengetahui dampak Syafruddin Prawiranegara mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) bagi perjalanan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat dari penelitian sejarah adalah untuk membantu kita dalam mengenal masa lalu. Pengenalan masa lalu akan sangat membantu dalam usaha mengenali ciri-ciri, pemahaman masa lalu juga bisa membantu untuk belajar dari kesalahan yang di buat pada masa lalu. Di samping itupula sejarah juga bisa membantu kita untuk belajar dari masa lalu. Dalam skripsi ini di harapkan dapat bermanfaat bagi :

a. Bagi Sanata Dharma

Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang penelitian yaitu bahwa penelitian untuk ilmu pengetahuan sosial.

b. Bagi dunia keguruan dan ilmu pendidikan

Penelitian ini akan menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan sejarah Indonesia khususnya sejarah bangsa Indonesia di dalam mempertahankan kemerdekaan.

c. Bagi peneliti

untuk menambah pengetahuan tentang Syafruddin Prawiranegara memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) tahun 1948-1949.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber berupa sumber tulisan, yang diperoleh melalui buku. Buku yang digunakan oleh penulis adalah buku yang mendukung dalam penulisan skripsi ini. Adapun buku pokok yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan Darurat RI (PDRI) Penyelamat Negara dan Bangsa Indonesia.

Buku ini ditulis Drs V Sardjono, dan diterbitkan oleh Tertanas Jakarta pada tahun 1982. Buku ini menguraikan tentang terbentuknya PDRI sebagai salah satu usaha pemerintah Republik Indonesia untuk menyelamatkan negara Republik Indonesia dari kehancuran, karena serbuan pasukan Belanda dalam agresi militer II. Buku ini juga menceritakan tentang arti penting PDRI dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

2. Kilas Balik Revolusi, Kenangan Pelaku dan Saksi.

Buku ini ditulis oleh Aboe Bakar Loebis, diterbitkan oleh Universitas Indonesia, pada tahun 1992. Buku ini menceritakan tentang latar belakang didirikannya PDRI, yang merupakan wujud dari usaha bangsa Indonesia untuk

mempertahankan Republik Indonesia dari kehancuran. Setelah terjadinya agresi militer Belanda II.

3. Syafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah

Buku ini ditulis oleh Ayip Rosidi, diterbitkan oleh INTI INDAYU PRESS, pada tahun 1986. Buku ini menceritakan tentang riwayat hidup Syafruddin Prawiranegara dari awal masa bersekolah dan terlibat dalam pemerintahan yang kemudian membawanya menjadi Menteri Kemakmuran, buku ini juga mengupas tentang perjuangan Syafruddin Prawiranegara ketika memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

4. Perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia

Buku ini ditulis oleh Dwi Purwoko diterbitkan oleh media Da'wah, buku ini berisikan tentang penyerbuan Belanda di Yogyakarta yang merupakan pusat pemerintahan Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1948. Buku ini juga menulis tentang proses terbentuknya PDRI serta perjuangan PDRI di Sumatra, Aceh, Jawa dan Luar Negeri. Sebagai suatu bentuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Buku ini juga mengupas tentang Syafruddin Prawiranegara menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno.

5. Di Sekitar PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia)

Buku ini di tulis Oleh Muhammad Rasjid dan diterbitkan oleh CV Bulan Bintang Jakarta, pada tahun 1982. Buku ini menguraikan tentang proses berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia serta susunan PDRI. Buku ini juga mengupas tentang reaksi rakyat di berbagai daerah terhadap pembentukan PDRI.

Selain buku-buku di atas masih banyak lagi buku tentang sejarah PDRI pimpinan Syafruddin Prawiranegara dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Diantaranya Indonesia abad 20 karangan G Moedjanto, buku ini menceritakan tentang agresi militer Belanda II yang mengakibatkan jatuhnya kota Yogyakarta dan disusul dengan penangkapan para pemimpin bangsa Indonesia. Buku ini juga mengupas tentang tindakan PDRI di dalam menghadapi serangan Belanda.

Masyarakat Sejarahwan Indonesia, dengan judul buku PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) dikaji ulang, Buku ini berisi tentang rekontruksi serta persepsi dari para sejarahwan mengenai PDRI serta perjuangannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Buku ini juga mengupas tentang tugas pemerintah darurat dalam melaksanakan mandat pemimpin Republik Indonesia.

E. Kajian Teori

Dalam skripsi ini penulis mengambil judul “Syafruddin Prawiranegara Memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) tahun 1948-1949”. Untuk penulisan skripsi ini perlu dikemukakan konsep-konsep yang berkaitan dengan judul dan tujuan skripsi.

Pemimpin dalam skripsi ini berkaitan dengan istilah ketua. Syafruddin Prawiranegara ketika membentuk PDRI, ia menjabat sebagai Ketua bukan sebagai Presiden. Hal ini dikarenakan Syafruddin Prawiranegara tidak mengetahui jika dirinya ditunjuk oleh Presiden untuk membentuk PDRI. Di samping itu keinginan Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk PDRI adalah merupakan

keinginannya sebagai seseorang yang memiliki semangat patriotisme yang tinggi untuk menyelamatkan bangsa Indonesia.

Mandat adalah instruksi yang diberikan oleh orang banyak (perkumpulan dan sebagainya) kepada wakilnya untuk melakukan sesuatu dalam perundingan dewan dan sebagainya. *Mandat* juga diartikan sebagai perintah dan tugas yang diberikan oleh pihak atasan¹². Ketika Yogyakarta jatuh Presiden dan Wakil Presiden beserta para menteri memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk mendirikan PDRI.

Sebelum Presiden dan Wakil Presiden beserta para menteri ditangkap oleh Belanda dalam agresi militer II, Presiden dan Wakil Presiden beserta para menteri sempat mengadakan rapat darurat. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden beserta para menteri memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk PDRI. Istilah *mandat* sama juga dengan perintah. Perintah merupakan instruksi lisan ataupun tulisan kepada bawahan agar tugas tertentu dilaksanakan¹³.

PDRI adalah Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang didirikan pada tanggal 22 Desember 1948 di Sumatera oleh Syafruddin Prawiranegara. PDRI didirikan dengan tujuan untuk mengantisipasi kekosongan akibat tertawannya pemimpin Republik Indonesia. Sesuai dengan sifatnya, PDRI merupakan badan pemerintahan yang mobil dalam jaman gerilya. Artinya suatu pemerintahan yang bergerak berpindah-pindah tempat¹⁴.

¹² W.J.S, Poerwadarminta, 1982, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hal. 629.

¹³ Panitia Istilah Menejemen, *Kamus Istilah Menejemen*, Jakarta : Balai Aksara, hal. 117.

¹⁴ Mestika Zed, 1997, *Pemerintah Darurat Republik Indonesia*, Jakarta : Grafiti, hal. 105.

PDRI didirikan dengan tujuan untuk menyelamatkan Republik Indonesia dari kehancuran karena serbuan dari Belanda atas wilayah Indonesia. Dengan berdirinya PDRI Republik Indonesia masih tetap ada, walaupun ibukota Republik Indonesia yaitu Yogyakarta jatuh ke tangan musuh dan Presiden, Wakil Presiden beserta menteri tertawan oleh Belanda.

Tindakan untuk menyelamatkan Republik Indonesia ini merupakan tindakan yang patut dipuji, karena dalam waktu yang singkat pemimpin Indonesia mengambil keputusan yang benar di dalam menyelamatkan bangsa Indonesia. Syafruddin Prawiranegara adalah orang yang sangat berjasa di dalam menyelamatkan bangsa Indonesia dari kehancuran.

Didirikannya Pemerintah Darurat Republik Indonesia merupakan wujud dari adanya semangat patriotisme yang menjadi pendorong untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari kehancuran. *Patriotisme* berasal dari perbendaharaan bahasa Inggris, yaitu patriot, yang berarti berarti pecinta tanah air¹⁵. Patriotisme diartikan juga sebagai semangat cinta tanah air, yaitu sikap seseorang yang bersedia untuk mengorbankan jiwa raga untuk membela tanah airnya dari serangan musuh. Semangat patriotisme yang dimiliki oleh Syafruddin Prawiranegara merupakan suatu semangat yang perlu mendapatkan penghargaan, hal ini dikarenakan pada saat bangsa Indonesia menghadapi masalah yang genting, Syafruddin Prawiranegara mengambil tindakan yang tepat dalam menyelamatkan bangsa Indonesia.

Berdasarkan judul Skripsi ini, “Syafruddin Prawiranegara Memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia tahun 1948-1949” adalah sebagai wujud

¹⁵ John chols dan Hasan Sadily, 1990, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia, hal 421.

dari keinginan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari kehancuran. Adanya keinginan untuk mempertahankan berdirinya negara Republik Indonesia dengan segala kekuatan merupakan tindakan seorang pemberani.

F. Metodologi Penulisan

Skripsi yang berjudul “Syafuruddin Prawiranegara Memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) tahun 1948-1949” merupakan studi sejarah nasional. Dalam skripsi ini metodologi penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yakni model penulisan sejarah yang membutuhkan landasan teoritis atau kerangka konseptual. Masalah pokok yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah: pertama, mengapa Syafuruddin Prawiranegara mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Kedua, tentang bagaimana peranan Syafuruddin Prawiranegara selama memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan ketiga, tentang bagaimana dampak Syafuruddin Prawiranegara mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) bagi perjalanan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

G. Metode dan Pendekatan

1. Metode

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode sejarah yang berpegang pada sumber-sumber yang ada untuk dapat menguji dan menganalisa secara kritis sumber-sumber yang diperoleh. Metode adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu secara imajinatif, dari fakta-

fakta yang diperoleh melalui proses historiografi¹⁶. Metode penelitian sejarah berusaha menguji serta menganalisis secara kritis rekaman yang berupa peninggalan masa yang lampau. Hal ini sangat memberikan manfaat bagi sejarawan untuk merekonstruksi kembali peristiwa di masa yang lampau secara imajinatif berdasarkan fakta-fakta yang ada, dimana fakta ini diperoleh melalui proses historiografi.

Guna mencari sumber-sumber tertulis penulis menggunakan data historis yang didapat melalui dokumen-dokumen berupa literatur yang ada di perpustakaan yang berbentuk buku. Sesuai dengan metode yang digunakan, maka penulis banyak menggunakan buku-buku yang berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan serta menafsirkan gejala-gejala untuk diinterpretasikan guna mendapatkan generalisasi. Pada dasarnya studi kepustakaan ini merupakan cara untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas. Adapun sumber-sumber tertulis tersebut di dapat di perpustakaan Universitas Sanata Dharma, Perpustakaan Hatta, Perpustakaan PGRI, Perpustakaan UNY dan lain-lain.

Metode penulisan sejarah memiliki empat tahap yaitu : heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi¹⁷. Adapun tahap-tahap tersebut adalah :

a. Pengumpulan Sumber (Heuristik)

Ada berbagai dokumen yang dapat digunakan dalam merekonstruksi sejarah.

Untuk merekonstruksi sejarah digunakan sumber-sumber yang dapat

¹⁶ Luis Gottschalk, 1985, *Mengerti Sejarah (terj)*, Jakarta : UI-Press, hal. 32.

¹⁷ *Ibid*, hal 35.

memberikan informasi mengenai sumber yang sedang diteliti. Ada terdapat dua macam sumber yaitu; sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer merupakan sumber yang disampaikan dari seorang saksi yang dengan mata kepalanya sendiri atau saksi dengan panca inderanya sendiri mengetahui suatu peristiwa.

Sumber primer bisa disampaikan dalam bentuk tertulis berupa dokumen, dimana buku tersebut di tulis oleh orang yang menyaksikan peristiwa tersebut, kemudian dituangkan kedalam bentuk tulisan. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh dari kesaksian seorang saksi yang tidak melihat atau mengetahui suatu peristiwa secara langsung tetapi melalui kesaksian orang lain. Sumber sekunder biasanya berupa buku-buku yang ditulis oleh orang yang tidak menyaksikan suatu peristiwa secara langsung. Sumber sekunder tertulis ditempuh apabila suatu penelitian masyarakat mengandung perspektif historis, maka bahan dokumenter memiliki arti metodologis yang sangat penting.

b. Kritik Sumber

Setelah pengumpulan sumber, baik lisan maupun tulisan kemudian dilakukan langkah yang kedua, berupa pengujian. Pengujian di dalam sumber dikenal dengan kritik sumber. Adapun tujuan kritik sumber adalah untuk mengetahui kredibilitas dan otentitas sumber.

Dalam penelitian sejarah, kritik sumber merupakan langkah terpenting yang harus dilakukan untuk menghindari adanya kepalsuan suatu sumber atau untuk mengetahui apakah data dapat dipertanggungjawabkan keasliannya

atau tidak¹⁸. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan kritik interen dengan membandingkan sumber supaya dapat diketahui kebenarannya.

c. Analisis Sumber (Interpretasi)

Analisis sumber merupakan tahap ketiga dalam penelitian. Hasil analisis akan menunjukkan tingkat keberhasilan suatu penelitian. Dalam hal ini peneliti akan menempatkan data secermat mungkin agar hasil penelitian bisa mendekati hasil sebenarnya. Dengan mengolah data secermat mungkin diharapkan dapat mengurangi subjektifitas yang biasa muncul dalam historiografi.

Analisis sumber atau interpretasi dalam sebuah penelitian merupakan tahap yang sangat penting karena di dalam interpretasi terdapat unsur penafsiran terhadap sumber yang telah dinilai kebenarannya. Dari analisis inilah akan diketahui tingkat keberhasilan suatu penelitian.

d. Penulisan Sejarah (Historiografi)

Penulisan sejarah tidak lepas dari sumber sejarah yang dapat memberikan suatu gambaran mengenai rangkaian suatu peristiwa. Dalam penulisan sejarah harus memperhatikan beberapa aspek yaitu: Aspek kronologis, sistematis dan sentralisasi gaya bahasa. Dalam penulisan sejarah aspek kronologis suatu peristiwa sangat penting, sehingga dapat dengan mudah memberikan suatu pengertian dasar tentang kapan peristiwa itu terjadi.

2. Pendekatan

Dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan historis, Politik dan sosial. Seseorang yang ingin menulis tentang masa lampau menggunakan

¹⁸ Kuntowijoyo, 1995, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Jakarta: Yayasan Benteng Budaya, hal. 99.

pendekatan historis. Menurut Luis Gottschalk history merupakan masa lampau manusia¹⁹.

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan historis digunakan untuk mengetahui sejarah perjuangan bangsa Indonesia di dalam mempertahankan kemerdekaan dan sejarah didirikannya PDRI sebagai wujud perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan Republik Indonesia dari kehancuran.

Pendekatan politik digunakan untuk melihat usaha dari PBB yang menjadi penengah dari pertikaian antara Belanda dan Indonesia, dalam usahanya mendamaikan bangsa Indonesia dan Belanda yang sedang bertikai. Untuk itu PBB membentuk Komisi jasa baik yang terdiri dari tiga negara (Belgia, Australia dan Amerika Serikat) untuk mengatasi pertikaian antara kedua belah pihak. Di dalam mengatasi konflik antara Belanda dan Indonesia, KTN mempertemukan pihak yang bertikai untuk mengadakan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang sedang bertikai. Perjanjian Renville merupakan salah satu bukti usaha KTN untuk menghentikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda.

Pendekatan sosial digunakan untuk melihat bagaimana usaha Syafruddin Prawiranegara dalam mempertahankan kemerdekaan yaitu dengan mengobarkan semangat rakyat Indonesia untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Agar perjuangan dapat berjalan dengan lancar Syafruddin melakukan komunikasi dengan rakyat. Dengan adanya komunikasi dengan rakyat, maka rakyat dapat menerima rombongan Syafruddin Prawiranegara dan rakyat juga memberikan bantuan baik berupa makanan maupun tempat untuk menginap ketika rombongan Syafruddin Prawiranegara melakukan perjalanan. Sehingga pendekatan sosial sangat penting di dalam perjuangan PDRI.

¹⁹ Luis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Jakarta : UI-Press, hal. 27

H. Sistematika Penulisan

Skripsi tentang “Syafuruddin Prawiranegara Memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia tahun 1948-1949”, memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang secara garis besar memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metodologi penulisan, metode dan pendekatan, dan sistematika penulisan.

Bab II, menguraikan tentang latar belakang Syafuruddin Prawiranegara mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), yang diawali dengan pelanggaran Belanda terhadap perjanjian Renville, jatuhnya kota Yogyakarta, dan dikeluarkannya mandat Presiden Soekarno kepada Syafuruddin Prawiranegara untuk mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

Bab III, membahas tentang peranan Syafuruddin Prawiranegara dalam memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), yang meliputi proses pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia, Perjalanan Syafuruddin Prawiranegara selama memimpin PDRI dan Syafuruddin Prawiranegara mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno.

Bab IV, membahas tentang dampak Syafuruddin Prawiranegara mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) bagi perjalanan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia

Bab V, simpulan, dalam bab ini disajikan tentang kesimpulan dari pembahasan bab II, III, dan IV .

Demikianlah sistematika penulisan skripsi ini, dari uraian di atas dapat diamati bahwa melalui skripsi ini, penulis ingin membuat tulisan tentang latar belakang Syafruddin Prawiranegara mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia, Peranan Syafruddin Prawiranegara selama memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan Dampak Syafruddin Prawiranegara mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) bagi perjalanan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Sampai di sini pendahuluan tentang Syafruddin Prawiranegara memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) tahun 1948-1949. Dalam bab selanjutnya akan membahas tentang latar belakang Syafruddin Prawiranegara mendirikan PDRI.



BAB II

LATAR BELAKANG SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

MENDIRIKAN PEMERINTAH DARURAT

REPUBLIK INDONESIA

A. Belanda Melanggar Perjanjian Renville

Keinginan Republik Indonesia untuk benar-benar lepas dari cengkraman penjajah tidak lah mudah. Peristiwa demi peristiwa yang sering terjadi dalam diri Republik Indonesia, menjadi penghalang bagi bangsa Indonesia untuk benar-benar lepas dari belenggu penjajah. Belanda yang merupakan musuh besar Republik Indonesia selalu mencari-cari kesempatan untuk mewujudkan keinginannya menguasai Republik Indonesia secara penuh. Berbagai cara dilakukan oleh Belanda untuk dapat menguasai Republik Indonesia kembali. Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh Belanda dan Indonesia untuk mendamaikan pertikaian yang terjadi antara Indonesia dan Belanda, selalu dilanggar oleh pihak Belanda. Salah satu perjanjian yang dilanggar oleh Belanda tersebut adalah perjanjian Renville.

Dalam perang kemerdekaan, Belanda melancarkan agresi militer yang pertama terhadap wilayah Republik Indonesia, seperti Sumatra, Jawa dan Madura. Untuk menghadapi serangan dari Belanda, TNI menggunakan taktik perang gerilya. Dampak dari taktik perang gerilya yang dilancarkan oleh TNI, telah membuka opini dunia, sehingga berkat bantuan PBB perang kemerdekaan dapat diakhiri dengan Persetujuan Renville.

Untuk dapat menyelesaikan pertikaian antara Republik Indonesia dengan pihak Belanda, Dewan Keamanan PBB membentuk komisi jasa baik yang beranggotakan tiga negara yaitu Australia atas pilihan Indonesia, Belgia atas pilihan Belanda dan sebagai penengah dalam perundingan tersebut ditunjuklah Amerika Serikat sebagai pilihan Belgia dan Australia. Karena komisi itu beranggotakan wakil dari tiga negara selanjutnya sering disebut KTN²⁰.

Dalam perundingan Renville, delegasi Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifudin. Sedangkan dari pihak Belanda diwakili oleh Abdulkadir Wijoyoatmojo yang merupakan pegawai bawahan van Mook. Perjanjian Renville diadakan di atas kapal Renville milik Amerika Serikat yang sedang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok. Perundingan tersebut, menghasilkan persetujuan Renville yang ditandatangani oleh kedua delegasi pada tanggal 17 Januari 1948. Adapun isi dari Perjanjian Renville tersebut adalah:²¹

1. Persetujuan gencatan perang (senjata) yang antara lain berisi ketentuan di terimanya garis demarkasi van Mook
2. Dasar-dasar politik Renville yang pada pokoknya berisi kesediaan dari kedua pihak untuk menyelesaikan pertikaian mereka dengan jalan damai dan dengan bantuan KTN.
3. Enam pasal tambahan dari KTN yang antara lain berisi ketentuan bahwa kedaulatan atas Indonesia tetap di tangan Belanda selama masa peralihan sampai kemudian kedaulatan diserahkan kepada pihak NIS.

²⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op . cit*, hal. 152.

²¹ Moedjanto, *op . cit*, hal. 22.

Memang sulit bagi Indonesia untuk menolak perjanjian Renville, karena jika bangsa Indonesia tetap menolak Perjanjian Renville, pasti perang antara Indonesia dan Belanda tidak dapat dihindarkan. Dan apabila ini sampai terjadi, maka akan membawa korban jiwa yang lebih banyak. Selain itu, Presiden Soekarno mendapatkan laporan dari militer, bahwa persediaan amunisi semakin menipis, hal inilah yang menyebabkan pemimpin-pemimpin Indonesia dengan wakilnya Amir Syarifudin menyetujui Perjanjian Renville. Walaupun disadari, dengan ditandatanganinya Perjanjian Renville, maka wilayah Indonesia semakin berkurang.

Perjanjian Renville yang ditandatangani oleh Amir Syarifudin akhirnya menimbulkan banyak pertentangan dikalangan pemimpin Republik Indonesia. Adanya Perjanjian Renville tersebut, telah melemahkan posisi Republik Indonesia, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun militer. Dalam bidang politik, bangsa Indonesia harus mengakui kedaulatan Belanda pada wilayah yang diduduki Belanda pada agresi militer Belanda yang pertama. Dalam bidang ekonomi, berarti bangsa Indonesia menyerahkan kota-kota pusat perindustrian dan perdagangan serta memberikan kesempatan kepada Belanda untuk melakukan blokade ekonomi. Sedangkan dalam bidang militer bangsa Indonesia harus menyerahkan kantong-kantong pertahanan gerilya yang telah disusun dengan susah payah kepada musuh²².

Syafruddin Prawiranegara yang dalam Kabinet Amir Syarifudin tidak diikutsertakan menjadi menteri, merasa kecewa dengan keputusan Amir

²² Lembaga Sejarah Hankam, 1967, *Markas Besar Komando Djawa 1948-1949*, Jakarta, hal 5

Syarifudin. Syafruddin Prawiranegara sangat menyesali tindakan Amir Syarifudin yang begitu mudah mengambil keputusan, tanpa mempertimbangkan perjuangan seluruh rakyat Indonesia dalam mempertahankan Republik Indonesia.

Persetujuan Renville juga mendapat tentangan dari partai-partai yang memiliki wakil dalam Kabinet Amir Syarifudin. Sebagai akibatnya, setelah Perjanjian Renville ditandatangani, kabinet pimpinan Amir Syarifudin jatuh, karena tidak mendapat dukungan dari partai, dimana partai-partai tersebut memandang, bahwa Amir Syarifudin telah gagal dalam mengambil keputusan ketika sedang menjalankan tugasnya. Akhirnya, pada tanggal 23 Januari 1948 Amir Syarifudin mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno.

Setelah Kabinet Amir Syarifudin jatuh, Presiden Soekarno kemudian menunjuk Mohammad Hatta untuk membentuk kabinet baru yang bertanggung jawab kepada Presiden Soekarno. Pada tanggal 29 Januari 1948 terbentuklah Kabinet Hatta. Kabinet Hatta ini memiliki susunan kabinet yang terdiri dari : Perdana Menteri Drs. Mohammad Hatta yang merangkap sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri Dr. Sukiman, Menteri Luar Negeri H. Agus Salim, Menteri Penerangan Mohammad Natsir, Menteri Keuangan Mr A.A Maramis, Menteri Perhubungan Ir. Djuanda, Menteri Kesehatan Dr. Leimena, Menteri Perburuhan dan Sosial Kusnan, Menteri Kehakiman Mr. Susanto Tirtoprodjo, Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan Mr. Ali Sastroamidjojo, Menteri Pekerjaan Umum Ir. Laoh, Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Pembagian Makanan Rakyat I Kasimo,

Menteri Agama K.H Masjkur, Menteri Negara Koordinator Keamanan Sultan Hamengku Buwono IX ²³. Adapun program dari Kabinet Hatta adalah :²⁴

1. Berunding atas dasar "Renville".
2. Mempercepat pembentukan NIS.
3. Rasionalisasi dan Rekontruksi.
4. Pembangunan.

Dalam Kabinet Hatta, Syafruddin Prawiranegara diangkat menjadi Menteri Kemakmuran. Masuknya Syafruddin Prawiranegara dalam Kabinet Hatta telah mengakhiri masa singkatnya di luar kabinet. Sebelumnya Syafruddin Prawiranegara juga pernah masuk dalam kabinet, yaitu ketika Kabinet Syahrir II di bentuk pada tahun 1946. Dalam Kabinet Syahrir II, Syafruddin Prawiranegara mendapat jabatan sebagai Menteri Muda Keuangan. Dan dalam Kabinet Syahrir III, Syafruddin Prawiranegara diangkat menjadi Menteri Keuangan. Ketika Kabinet Syahrir III mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno, maka berakhir pula jabatan Syafruddin Prawiranegara dalam Kabinet Syahrir III.

Sebagai pengganti Kabinet Syahrir III, Presiden Soekarno mengangkat Amir Syarifudin (partai sosialis) untuk membentuk kabinet. Selama Kabinet Amir Syarifudin berkuasa, Syafruddin Prawiranegara tidak ikut dalam kabinet. Namun setelah Amir Syarifudin mengembalikan mandat, Syafruddin Prawiranegara masuk kembali dalam kabinet dengan jabatan sebagai Menteri Kemakmuran.

²³ Kementrian Penerangan Republik Indonesia, *Beberapa Tjataan Detik dan Peristiwa 17 agustus 1945-23 Januari 1950*, Kementrian Penerangan Republik Indonesia : Yogyakarta.

²⁴ A.H Nasution, *op . cit*, hal. 129.

Sebagai Menteri Kemakmuran, Syafruddin Prawiranegara mendapatkan tugas untuk mengembalikan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk perekonomiannya²⁵. Tugas untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat merupakan tugas terberat bagi Syafruddin Prawiranegara. Menurut Syafruddin Prawiranegara, awal tahun 1948 merupakan masa krisis bagi bangsa Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi. Adanya blokade ekonomi terhadap daerah-daerah yang dikuasai oleh Indonesia mengakibatkan lumpuhnya kegiatan perdagangan dan sulitnya pemasukan uang kas negara.

Menghadapi situasi negara yang kacau Syafruddin Prawiranegara mengambil beberapa tindakan. Pertama-tama Syafruddin Prawiranegara melakukan usaha agar kebutuhan pokok hidup sehari-hari tidak mengalami keguncangan dan jangan sampai sukar diperoleh di Pasar²⁶. Syafruddin Prawiranegara kemudian mengeluarkan beberapa peraturan dan undang-undang, diantaranya Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1948 tanggal 22 Maret 1948 yang berisi tentang pengumpulan bahan makanan rakyat untuk pemerintah. Pada tanggal 9 Juli 1948, Syafruddin Prawiranegara juga menetapkan Peraturan Pemerintah No.15 untuk menghitung jumlah ternak berupa sapi, kuda, kerbau, kambing dan domba. Peraturan-peraturan tersebut dibuat untuk memajukan perekonomian Republik Indonesia.

Banyak kesulitan yang dihadapi oleh Syafruddin Prawiranegara dalam menghadapi perekonomian Republik Indonesia. Hal yang paling sulit yang harus dihadapi oleh Syafruddin Prawiranegara adalah perusahaan-perusahaan pada

²⁵ Ayib Rosidi, *op . cit*, hal. 99.

²⁶ *Ibid*, hal. 100.

umumnya memiliki karyawan yang jauh lebih banyak dari kebutuhan sebenarnya. Untuk dapat memajukan perusahaan tersebut, Syafruddin Prawiranegara melakukan rasionalisasi sesuai dengan program dari Kabinet Hatta. Rasionalisasi adalah penyesuaian antara kebutuhan kerja dengan jumlah karyawan. Adanya program rasionalisasi tersebut berdampak pada protes yang dilakukan oleh para buruh.

Sementara itu Mohammad Hatta sesuai dengan programnya mengenai persetujuan Renville, melanjutkan perundingan dengan pihak Belanda. Hatta memerintahkan agar pasukan TNI yang berada di wilayah kedudukan Belanda harus dipindahkan ke wilayah Republik Indonesia, akibatnya Divisi Siliwangi dari Jawa Barat bersama keluarganya pindah ke Jawa Tengah. Dan pasukan yang berada di ujung Jawa Timur juga harus pindah ke daerah sebelah barat dari Surabaya dan Malang. Begitu juga dengan pasukan di luar Jawa harus pindah ke wilayah Republik Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari perjanjian Renville, maka pada tanggal 6 Februari 1948 dibentuklah Panitia Hijrah berdasarkan Ketetapan Presiden No 4 Tahun 1948. Pada tanggal 26 Februari 1948 kesatuan TNI yang berjumlah tiga puluh lima ribu orang telah meninggalkan daerah-daerah dibelakang garis demarkasi di Jawa Barat.

Selama Kabinet Hatta berkuasa, perundingan Renville yang diprakarsai oleh tiga negara (KTN) terus berjalan. Bagi Hatta, diplomasi merupakan jalan yang terbaik. Namun perundingan antara kedua belah pihak ini mengalami hambatan, hal ini dikarenakan keterlambatan pihak Nederland menunjuk wakilnya

untuk melakukan perundingan dengan pihak Republik Indonesia. Tindakan mengulur waktu yang dilakukan oleh pihak Belanda, telah menimbulkan kecurigaan bagi pihak Indonesia yang menganggap pihak Belanda tidak serius melaksanakan persetujuan Renville. Di samping itu, pihak Indonesia merasa kecewa terhadap KTN yang tidak mengambil tindakan tegas terhadap pihak Belanda yang telah mengulur-ngulur waktu dalam melaksanakan perjanjian Renville.

Dalam perundingan antara Indonesia dengan Belanda yang diprakarsai oleh KTN, Belanda menginginkan agar persetujuan Renville mendapat pengawasan yang ketat dari KTN. Tetapi baik Indonesia maupun Belanda saling melemparkan tanggung jawab mereka terhadap pertempuran lokal yang sering terjadi disepanjang garis van Mook. Dengan sikap yang saling melepas tanggung jawab tersebut menjadikan perundingan sulit untuk dilakukan. Pada umumnya wakil dari Australia dan Amerika Serikat terkesan dengan sikap Indonesia yang selalu menunjukkan kemauan baik untuk melakukan kompromi, namun sebaliknya Belanda selalu menunjukkan sikap ingin menang sendiri. Untuk dapat mengatasi kesukaran dalam berkompromi, maka wakil dari Amerika Serikat dan Australia berusaha mencari jalan keluar kearah kompromi yang realistis.

Kompromi itu dikenal dengan Du Bois-Critchly Plan yang diserahkan kepada pihak Indonesia dan Belanda secara rahasia pada tanggal 10 Juni 1948 yang isi pokoknya berisi sebagai berikut:²⁷

“Rakyat Indonesia dari segala administrasi pemerintahan akan memilih satu atau lebih pemilih sesuai dengan jumlah

²⁷ Moedjanto, *op . cit*, hal. 26

penduduk. Pemilih yang terpilih akan memilih utusan ke majelis pembentuk UUD yang sekaligus akan menjadi DPR sementara juga

“
DPR sementara itu adalah :

1. Atas dasar geografi, etnologi, sejarah dan perasaan kebangsaan akan mencerminkan negara-negara bagian dari pada NIS.
2. Akan memilih Presiden yang akan mengangkat PM yang selanjutnya akan membentuk kabinet yang akan bertanggung jawab kepada DPR sementara.
3. Mempunyai kekuasaan penuh atas pemerintahan sendiri termasuk pengawasan atas militer.

“Komisaris tinggi Belanda sementara akan memiliki hak Veto dan mempunyai wewenang untuk menyatakan keadaan bahaya (Perang) melampaui kekuasaan sementara dan dalam keadaan demikian ia akan mempunyai kekuasaan atas militer. Dewan pembentuk UUD sebagai DPR sementara bersama wakil kerajaan Belanda akan menyusun kerangka dasar pembentukan (statut) Uni Indonesia-Belanda yang akan menyelenggarakan bersama urusan ekonomi, kebudayaan dan kepentingan militer masing-masing dan segala kerjasama untuk menyelenggarakan kepentingan yang sama (bersama). Dewan pembentuk UUD akan membentuk UUD buat NIS. Bila rencana UUD dan statut Uni telah disahkan, Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada NIS”.

Pihak Republik Indonesia pada dasarnya menerima rencana Du Bois-Critchly Plan, namun pihak Belanda menolak bahkan tidak mau ikut membicarakan usul tersebut. Belanda menuduh, bahwa pihak Australia dan Amerika Serikat telah bertindak melampaui batas. Sebagai akibatnya pada tanggal 16 Juli 1948, Belanda menyatakan bahwa perundingan dengan pihak Republik Indonesia putus. Dengan demikian, perundingan antara pihak Republik Indonesia dengan pihak Belanda yang membicarakan tentang pelaksanaan persetujuan Renville mengalami jalan buntu. Nota yang telah dibuat oleh KTN yang berisi tentang cara-cara mempercepat proses perundingan ditolak oleh pihak Belanda.

Pemimpin Republik menyadari, bahwa dengan adanya jalan buntu dalam setiap perundingan antara pihak Republik Indonesia dengan pihak Belanda dapat berakibat buruk bagi Republik Indonesia. Pihak Republik sadar adanya kegagalan tersebut memang sengaja dilakukan oleh pihak Belanda, untuk mengulur-ngulur waktu dalam melakukan penyerangan terhadap Republik Indonesia.

Menghadapi situasi demikian, para Pemimpin Republik mengadakan pertemuan untuk membahas langkah-langkah yang harus ditempuh jika Belanda benar-benar melakukan penyerangan kembali terhadap Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut hadir Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia Jenderal Soedirman, Kolonel Hidayat dan Kolonel Simatupang. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan tentang perlu tidaknya Pimpinan Negara dan Angkatan Perang dipindahkan ke Sumatra²⁸.

Pemimpin Republik Indonesia menyadari, keadaan geografi pulau Jawa tidak memungkinkan untuk dijadikan pusat perlawanan terhadap Belanda. Pemimpin Republik juga yakin, bahwa Belanda pasti akan melakukan penyerangan kembali terhadap Republik, walaupun Republik tidak mengetahui kapan penyerangan itu akan dilakukan. Menurut pemimpin Republik Sumatra merupakan daerah yang sangat strategis untuk dijadikan pusat perlawanan. Jika dipandang dari luasnya daerah dan keadaan geografi yang lebih mudah untuk memelihara hubungan dengan luar negeri. Di samping itu Sumatra merupakan wilayah yang memiliki hutan yang masih lebat dan belum dijamah oleh manusia,

²⁸ Ayib Rosidi, *op . cit*, hal. 106.

sehingga merupakan tempat yang tepat untuk bergerilya. Pemimpin Republik memperkirakan agresi militer Belanda ke-II akan ditujukan ke pulau Jawa, dengan tujuan untuk melumpuhkan Pemerintahan Republik Indonesia. Apabila hal itu sampai terjadi maka pulau Jawa akan sulit untuk dipertahankan karena dianggap sempit untuk bergerak.

Pada tanggal 27 Juli 1948 Belanda membuka kembali perundingan antara Republik Indonesia dan Belanda. Indonesia menerima usul untuk membuka kembali perundingan dengan syarat agar rencana Du Bois-Critchly dibicarakan kembali. Namun pihak Belanda tetap menolak usul tersebut.

Sebagai tindaklanjutnya, KTN mengirimkan telegram kepada Dewan Keamanan untuk menjelaskan ketidakberdayaan pihak KTN dalam menangani masalah Indonesia dan Belanda. Namun pihak Dewan Keamanan memberikan kesan mengecewakan, sehingga kepulangan Du Bois ke negerinya di pandang oleh pihak Republik Indonesia sebagai penolakan terhadap rencana Du Bois-Critchly.

Pada bulan September, KTN membuka kembali perundingan yang pernah macet antara Belanda dan Indonesia. Amerika mengirimkan wakilnya yang baru bernama Merle Cochran untuk menyelesaikan masalah Indonesia dan Belanda. Cochran mengajukan rencana penyelesaian yang pada dasarnya adalah Du Bois-Critchly plan yang diubah dengan memberikan konsensi kepada Belanda²⁹. Republik Indonesia sangat kecewa dengan rencana Cochran yang dianggap telah mengorbankan sejumlah kepentingan dari pihak Republik Indonesia. Di samping

²⁹ G. Moedjanto, *op. cit*, hal. 28.

itu pihak Belanda belum puas dengan perjanjian tersebut, sehingga usaha Cochran mengalami kegagalan.

Pada tanggal 1 November 1948 Menteri Luar Negeri Belanda, Stikker membuka kembali perundingan secara langsung dengan pihak Republik. Stikker merupakan orang yang progresif jika dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin Belanda yang lainnya. Republik Indonesia mengharapkan agar kedatangan Stikker ke Indonesia dapat menyelesaikan masalah antara Indonesia dan Belanda. Ketika diadakan perundingan tingkat tinggi antara Menteri Luar Negeri Belanda dan Perdana Menteri Mohammad Hatta di Kaliurang, pada awalnya ada tanda-tanda pendekatan³⁰. Sebelum Stikker berangkat kembali ke Nederland tanggal 11 November 1948, Hatta memberikan penjelasan tambahan mengenai pendirian Republik Indonesia.

Keberangkatan Stikker ke Nederland memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk mengatur langkah-langkah dalam mempertahankan Republik Indonesia. Pada pertengahan November, Wakil Presiden Mohammad Hatta berangkat ke Bukittinggi. Keberangkatan Hatta disertai oleh para pembesar militer dan sipil yang terdiri dari : Syafruddin Prawiranegara, Lukman Hakim, Rusli Rahim, Kolonel Hidayat, Letnan Kolonel Akil Prawiradiredjo. Rombongan Hatta berangkat dari lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta pukul 08.00 dengan meminjam pesawat terbang milik KTN.

Rombongan Mohammad Hatta tiba di Bukittinggi pada pukul 14.00. Adapun tujuan mereka datang ke Sumatra adalah untuk mengganti pimpinan

³⁰ Moehkardi, *Akademi Militer Yogyakarta Dalam Perjuangan Pisik*, Cetakan Pertama, Jakarta : PT INALTU, hal. 145.

militer di Sumatra, selain itu juga mempersiapkan Sumatra sebagai pusat Pemerintahan Republik Indonesia, jika serangan militer Belanda jadi dilancarkan dan Yogyakarta jatuh ketangan musuh.³¹

Baru beberapa hari berada di Sumatra, Wakil Presiden Mohammad Hatta mendapat kawat dari KTN untuk segera melakukan perundingan dengan Belanda. Sebelum kembali ke Yogyakarta, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengangkat Letnan Kolonel Kawilarang menjadi Panglima daerah Sumatra Utara dan Kolonel Hidayat menjadi panglima seluruh Sumatra. Sedangkan Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara beserta pembantu-pembantunya diminta agar tetap tinggal di Sumatra dengan tugas mengatur kembali keuangan di Provinsi Sumatra.

Sementara itu Hatta mengira, bahwa kedatangannya ke Yogyakarta untuk melakukan perundingan kembali dengan Belanda akan mendapatkan titik temu. Namun setelah Hatta melakukan perundingan kembali dengan Stikker, ternyata menemui jalan buntu yang berakibat pada kegagalan. Kegagalan perundingan antara Indonesia dengan Belanda ini, disebabkan oleh sikap Sassen yang kembali menyatakan pendirian bahwa Belanda ingin menjadikan TNI sebagai pengawal keamanan saja dan bukan sebagai tentara nasional RIS yang akan di bentuk³².

Padahal dalam pertemuan sebelumnya, Menteri Luar Negeri Belanda Stikker dengan Perdana Menteri Mohammad Hatta, mulai menemui titik temu ke arah persoalan inti mengenai pembentukan pemerintahan federal dan status serta kedudukan TNI sebagaimana disepakati bersama dalam perjanjian Renville.

³¹ Ayib Rosidi, *op. cit*, hal. 107.

³² *Ibid*, hal. 108.

Namun adanya Sassen telah mengubah persoalan Republik Indonesia dan Belanda semakin memanas.

Pada tanggal 11 Desember 1948 Dr. Beel, Wakil Tinggi Mahkota Belanda di Indonesia mengeluarkan ultimatum kepada Republik Indonesia yang berbunyi “Supaya Republik Indonesia ikut dalam interim federal dan harus mengakui kedaulatan Belanda sepenuhnya”³³. Mendengar ultimatum yang disampaikan oleh pihak Belanda, pada tanggal 13 Desember 1948, Hatta meminta kepada Cochran agar membuka perundingan kembali. Mohammad Hatta mengatakan bersedia mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan, namun Hatta mengingatkan bahwa dalam menyelenggarakan kekuasaannya, Belanda terikat oleh beberapa pembatasan tertentu. Republik Indonesia juga mengakui hak veto komisariss tinggi mahkota, tetapi hak veto tersebut harus ditentukan batas-batasnya (dalam hal apa hak veto berlaku)³⁴.

Empat hari kemudian pihak Belanda memberikan jawaban yang menuntut agar pihak Republik Indonesia menyetujui usul-usul yang diberikan oleh Belanda dalam waktu 18 jam. Menurut Belanda pihaknya akan tetap mempertahankan usulnya yang berhubungan dengan kekuasaan Komisariss Tinggi Mahkota dan Republik Indonesia masuk kedalam federasi dengan kedudukan yang sama dengan negara bagian lainnya. Bagi Republik Indonesia batas waktu 18 jam merupakan waktu yang sangat singkat dalam mempelajari usul dan memberikan jawaban atas usul yang diberikan oleh Belanda.

³³ Sardjono dan Marsadji, *op . cit*, hal. 4

³⁴ Moedjanto, *op . cit*, hal. 29

Karena Belanda masih bersikeras terhadap usulnya, maka pada tanggal 16 Desember 1948 diadakan rapat kabinet. Rapat kabinet itu dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno, karena Perdana Menteri Mohammad Hatta sedang dalam keadaan sakit. Dalam sidang tersebut Presiden memutuskan, bahwa selama Presiden berada di luar negeri (India) untuk tugas kenegaraan dalam rangka menjelaskan perjuangan rakyat Indonesia kepada Dunia Internasional. Dan berhubung Wakil Presiden dalam keadaan sakit, maka pimpinan sementara akan diserahkan kepada Menteri Kehakiman Susanto Tirtoprojo serta Menteri Perhubungan Juanda. Rencananya Presiden Soekarno akan berangkat ke India pada tanggal 19 Desember 1948 atas undangan Perdana Menteri Nehru. Namun pada kenyataannya keberangkatan Presiden ke India tidak terlaksana, karena Belanda tidak mengizinkan pesawat India yang telah tiba di Singapura untuk menjemput Soekarno³⁵.

Dua hari setelah diadakannya rapat kabinet, Republik Indonesia dikejutkan oleh pernyataan Belanda yang secara sepihak telah memutuskan untuk tidak terikat lagi dengan Perjanjian Renville. Pada tanggal 18 Desember 1948 jam 23.30 Dr. Beel Wakil Tinggi Mahkota Belanda, menyatakan kepada delegasi Indonesia di Jakarta dan KTN bahwa Belanda tidak mengakui lagi dan tidak terikat lagi dengan Persetujuan Renville³⁶. Pidato Dr. Beel tersebut merupakan isyarat atau kode yang diberikan kepada pasukan Belanda di Indonesia untuk melancarkan agresi militer II atas Republik Indonesia. Dengan demikian, maka Belanda telah

³⁵ Mani, 1989, *Jejak Revolusi 1945 Sebuah Kesaksian Sejarah*, Jakarta : PT Tempint, hal. 152

³⁶ Nugroho Notokusanto, 1971, *Ichisar Sejarah RI (1945-Sekarang)*, Jakarta, hal. 32-33

menghianati persetujuan Renville yang telah disepakati bersama antara Indonesia dengan Belanda.

Pemimpin Republik Indonesia yang berada di Yogyakarta sama sekali tidak mengetahui bahwa Belanda dengan wakilnya Dr. Beel menyatakan tidak terikat oleh perjanjian Renville, karena jaringan telepon antara Yogyakarta dengan Jakarta telah diputus oleh Belanda. Dengan pembatalan persetujuan Renville berarti Belanda akan melakukan serangan kembali atas wilayah Republik Indonesia yang dikenal dengan agresi militer Belanda II.

Pelanggaran terhadap Perjanjian Renville yang dilakukan oleh pihak Belanda, merupakan suatu penghinaan terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama dihadapan KTN. Memang pihak Republik Indonesia menyadari, bahwa Belanda selalu tidak serius dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat bersama, sehingga tidak heran apabila Belanda selalu melanggar perjanjian-perjanjian tersebut. Perjanjian Renville merupakan salah satu bukti dari ketidakseriusan pihak Belanda untuk berdamai.

B. Jatuhnya kota Yogyakarta

Pemimpin bangsa Indonesia sama sekali tidak mengetahui, bahwa pada tanggal 19 Desember 1948 pihak Belanda akan melakukan penyerangan terhadap Republik Indonesia. Pihak Republik menyadari, Belanda pasti akan menyerang Indonesia kembali, namun pihak Republik tidak mengetahui jam, tanggal dan bulan berapa Belanda akan menyerang. Tanggal 19 Desember 1948 semua pertanyaan tentang jam, tanggal dan bulan penyerangan Belanda atas Republik

Indonesia telah terjawab. Sebagai bukti, pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresi militernya ke-II. Para pemimpin Republik sama sekali tidak membayangkan bahwa Belanda akan melakukan penyerangan secepat ini. Dengan demikian maka bangsa Indonesia merasa kecolongan.

Ketika terjadinya agresi militer Belanda ke-II, Syafruddin Prawiranegara sedang berada di Sumatra untuk melaksanakan tugas mengatur keuangan di provinsi Sumatra. Tugas tersebut Syafruddin Prawiranegara terima, karena dirinya mendapatkan perintah dari Perdana Menteri Mohammad Hatta, untuk memulihkan keuangan di Provinsi Sumatra. Sedangkan Perdana Menteri Mohammad Hatta kembali lagi ke Yogyakarta untuk melanjutkan perundingan dengan Belanda.

Syafruddin Prawiranegara tetap menunggu Hatta untuk kembali lagi ke Sumatra dengan tujuan untuk membentuk Pemerintahan Darurat. Syafruddin beranggapan ada dua kemungkinan yang akan terjadi dengan kepergian Hatta ke Yogyakarta. Kemungkinan pertama, perundingan itu akan berhasil dengan baik sehingga tercapai kesepakatan kedua belah pihak mengenai kemerdekaan dan pengakuan atas kedaulatan bangsa Indonesia di tanah airnya oleh Belanda. Kemungkinan kedua, perundingan itu akan mengalami jalan buntu dan apabila hal itu terjadi, niscaya Wakil Presiden Mohammad Hatta akan kembali lagi ke Sumatra untuk membentuk pemerintahan darurat seperti yang pernah dibicarakan

³⁷. Ternyata apa yang telah diperkirakan oleh Syafruddin Prawiranegara menjadi

³⁷ Ayip Rosidi, *op . cit*, hal. 108.

kenyataan, perundingan antara Republik Indonesia dan Belanda mengalami kegagalan.

Menyusul dengan adanya kebuntuan diplomasi, ternyata Belanda benar-benar melancarkan aksi militernya terhadap Republik Indonesia untuk kedua kalinya. Sasaran utama Belanda dalam melancarkan agresi militer II adalah kota Yogyakarta yang dianggap sebagai pusat Pemerintahan Republik Indonesia serta menangkap tokoh-tokoh yang berpengaruh di dalam pemerintahan. Dengan menyerang jantung pemerintahan, maka dengan mudah Belanda dapat menguasai Republik Indonesia. Dalam melancarkan serangannya, Belanda menggunakan kekuatan dari darat, laut dan udara.

Dalam melancarkan perang kemerdekaannya, pihak Belanda telah melakukan berbagai persiapan. Untuk melancarkan agresi militernya yang kedua, Belanda menggunakan segala kekuatannya dengan 135.000 pasukan dan menggunakan perlengkapan-perengkapan modern yang berasal dari bantuan "Marshall Plan" milik Amerika Serikat.

Belanda menyadari, bahwa kegagalannya dalam agresi militer I merupakan pengalaman yang cukup pahit bagi Belanda. Pada saat Belanda melancarkan agresi militer I, Belanda sangat yakin dapat melumpuhkan segala potensi sumber daya Republik Indonesia. Namun Belanda tidak menyadari bahwa dengan agresinya yang pertama telah memberikan banyak pengalaman bagi rakyat Indonesia khususnya dalam perang gerilya, sehingga dengan taktik perang gerilya yang dilancarkan oleh rakyat Indonesia, Belanda semakin tidak berdaya dan pada akhirnya mengalami kekalahan. Dengan pengalaman tersebut, Belanda dalam melakukan penyerangan kembali terhadap wilayah Republik Indonesia, melakukan berbagai persiapan-persiapan yang sangat teliti dan secara besar-besaran.

Pada hari Minggu Legi tanggal 19 Desember 1948, kota Yogyakarta yang merupakan pusat Pemerintahan Republik Indonesia tampak tenang, begitu pula lapangan terbang Maguwo yang berjarak 6 Km di sebelah timur ibukota Yogyakarta. Beberapa tentara RI yang sedang melaksanakan tugas di lapangan terbang pada pagi itu tampak sedang melakukan tugasnya, sedangkan sebagian tentara yang tidak bertugas masih terbaring di tempat tidur.

Sementara itu pada dini hari, bertolaklah pesawat milik Belanda dari Kalibanteng Semarang, bersama Panglima Besar Spoor menuju ke Yogyakarta. Pemerintah Republik Indonesia tidak menyadari Belanda akan melakukan penyerangan untuk yang kedua kalinya terhadap Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta, karena pada malam itu tanggal 18 Desember 1948 semua hubungan radio antara daerah pendudukan Belanda dengan Yogyakarta sudah diputuskan oleh Belanda.

Fajar pagi sudah menyingsing, pesawat-pesawat Belanda secara tiba-tiba melayang-layang di atas kota Yogyakarta. Pada jam 05.30 lapangan terbang Maguwo di bom oleh pesawat pembom Mitchell (B-25), Spitfire, Mustang dan Lockheed milik Belanda. Dari pesawat itu tampak terdengar suara ledakkan disusul dengan asap yang mengepul di udara. Pagi itu jam 05.30 penyerangan dilakukan dengan pengeboman atas Maguwo dan beberapa bangunan di Yogyakarta seperti RRI³⁸.

Pada awalnya penduduk kota mengira, bahwa pesawat-pesawat yang sedang berterbangan di atas kota Yogyakarta adalah milik TNI yang sedang

³⁸ Moedjanto, *op . cit*, hal. 42.

melakukan latihan perang-perangan di sekitar Maguwo, sesuai dengan pengumuman yang diberikan pada tanggal 19 Desember bahwa akan diadakan latihan perang-perangan. Sehingga ketika pesawat milik Belanda berterbangan di atas kota Yogyakarta rakyat melihat dengan terkagum-kagum. Namun pada saat tembakan-tembakan yang dilemparkan dari atas pesawat menembaki secara membabi buta maka rakyat baru sadar, bahwa pesawat tersebut bukan milik TNI, sehingga mereka berlarian mencari perlindungan. Dengan demikian, maka Belanda telah mengambil kesempatan dalam melancarkan agresi militernya yang ke-II. Pengumuman mengenai akan diadakan latihan perang-perangan oleh pihak TNI, ternyata dijadikan kesempatan bagi pihak Belanda Untuk melakukan penyerangan terhadap Republik.

Tepat pada pukul 05.45 formasi-formasi pesawat pengangkut ratusan tentara terjun payung Belanda menerjunkan batalyon pasukan baret hijau yang diterjunkan di pinggir-pinggir kota Yogyakarta. Kemudian mereka menyerang lapangan terbang Maguwo dengan mengerahkan berpuluh-puluh pesawat terbang milik Belanda. Gelombang tentara payung pertama segera mendarat di lapangan terbang Maguwo dan bendera tiga warna dikibarkan di lapangan terbang Maguwo, sebagai tanda aman untuk melakukan pendaratan. Pertempuran serupun berlangsung antara pasukan Belanda dengan pasukan Republik Indonesia.

Kebetulan sekali pada hari itu sebagian besar pasukan TNI sedang berada di luar kota untuk bertugas melakukan pembersihan di kantong-kantong wilayah bekas PKI dan menjaga garis-garis demarkasi pertahanan Indonesia. Sehingga pada saat Belanda melakukan penyerangan terhadap lapangan terbang Maguwo,

pasukan pengawal Republik Indonesia hanya terdiri dari beberapa orang dengan pimpinan Kadet Kasmiran. Pasukan RI dengan jumlah terbatas berusaha menghadapi serangan dari pihak Belanda, walaupun pihak Indonesia mengakui bahwa kekuatan mereka tidak sebanding dengan kekuatan musuh. Perlawanan patriotik berlangsung dengan gagah berani dari jam 06.00 sampai jam 07.00 hingga akhirnya Kadet Kasmiran bersama kurang lebih 40 orang anggota kesatuan gugur di medan bakti³⁹. Sementara itu dentuman meriam dan bom dari pesawat Bomber (Mitchells buatan Amerika) datang secara bertubi-tubi bersamaan dengan tembakan senapan mesin dan roket. Kejadian ini berlangsung selama satu jam. Prajurit Indonesia yang berada di lapangan Maguwo dibuat tidak berdaya oleh Belanda. Setelah mereka melakukan perlawanan apa adanya, akhirnya mereka menyelamatkan diri. Menara pengawasan dan kantor penerbangan hancur berantakan terkena sasaran bombardir.

Pada pukul 08.00 Belanda menguasai lapangan udara Maguwo. Setelah berhasil menguasai lapangan terbang Maguwo, pasukan Belanda dengan senapan-senapan mesinnya terus menyerbu melaju kedalam kota Yogyakarta yang merupakan pusat pemerintahan RI⁴⁰. Sasaran utama Belanda adalah kota Yogyakarta, yang merupakan jantungnya pemerintahan Indonesia. Sebelum Belanda menjatuhkan bom ke wilayah Yogyakarta, terlebih dulu diturunkan boneka-boneka untuk meraba-raba tempat tembakan yang akan dilepaskan dari darat. Setelah berhasil menguasai lapangan terbang Maguwo, Belanda kemudian

³⁹ Dinas Sejarah Militer Kodam VII Diponegoro, 1977, *Rumpun Diponegoro dan Pengabdianya*, Semarang : CV Borobudur Megah, hal. 312..

⁴⁰ Yayasan 19 Desember 1948, *op . cit*, hal.182.

menyita pesawat-pesawat milik Republik Indonesia yang berada di lapangan terbang Maguwo. Mereka juga membuka jembatan udara Semarang-Yogyakarta dengan tujuan untuk menurunkan alat-alat semi berat dan alat-alat transport sebagai persiapan untuk merebut Yogyakarta.

Dengan didudukinya lapangan terbang Maguwo, kenyataan pahit harus diterima oleh Indonesia sebagai akibat kembalinya lagi Belanda di Indonesia. Karena begitu kurangnya pertahanan yang dimiliki oleh Indonesia, maka dengan mudah lapangan udara Maguwo dapat diduduki oleh Belanda. Sesudah berhasil menduduki lapangan udara Maguwo, Belanda kemudian menuju ke kota Yogyakarta. Pada pukul 12.00, Belanda berhasil menduduki tempat-tempat penting di kota seperti, kantor telepon PTT dan satu jam kemudian Belanda menguasai gedung RRI. Setelah berhasil menguasai tempat-tempat penting di Yogyakarta, tujuan terakhir pada hari pertama penyerangan Belanda adalah menduduki Istana Kepresidenan dan menangkap para pemimpin Republik Indonesia.

Bersamaan dengan agresi militer Belanda II, tepatnya di Kaliurang Yogyakarta, sedang berlangsung perundingan antara pihak Indonesia dan Belanda di bawah pengawasan KTN (Komisi Tiga Negara) selaku perwakilan dari Dewan Keamanan PBB. Tentu saja para diplomat kita termasuk Bung Hatta, selaku Perdana Menteri RI yang mengikuti perundingan itu amat terkejut atas peristiwa penyerbuan Belanda tersebut⁴¹.

⁴¹ Tjokropranolo, 1991, *Jenderal Sudirman Pimpinan Pendobrak Terakhir Penjajahan Di Indonesia*, Jakarta : CV Haji Masagung, hal. 120.

Isyarat langsung dari serangan Belanda ke Yogyakarta dapat ditangkap Wakil Presiden Mohammad Hatta dari Kaliurang. Mohammad Hatta yang masih dalam keadaan sakit di tempat istirahatnya se usai mengadakan perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan KTN, meminta izin kepada Critchley untuk pergi ke Yogyakarta. Adapun tujuan Mohammad Hatta pergi ke Yogyakarta adalah untuk mengetahui keadaan istana dan mengambil keputusan mengenai apa yang harus dilakukan Pemerintah Republik Indonesia. Setelah Mendapatkan izin dari Critchley, Mohammad Hatta kemudian bergegas meninggalkan Kaliurang dan pergi ke Yogyakarta.

Sementara itu suasana hangat juga terjadi di istana tempat Presiden tinggal. Setelah mengetahui bahwa Belanda melakukan penyerangan atas Yogyakarta, Soekarno memerintahkan agar surat-surat penting disembunyikan untuk menghindari kemungkinan yang akan terjadi. Berdasarkan perintah Soekarno, R.O Permadipura yang merupakan bekas kepala rumah tangga Presiden bersama pangawal istana bernama Kasmin pergi kerumah Jayeng Karso untuk menitipkan surat-surat penting milik Presiden Soekarno. Di jalan Dagen No. 39 itulah tempat surat-surat milik Presiden Soekarno disembunyikan.

Pada jam 09.00 benteng yang terletak di depan istana (gedung Agung) di jatuhi bom oleh Belanda. Sementara itu pada pukul 10.00 pengawal istana diperintahkan untuk bubar atau jika tetap tinggal di istana jangan sekali-kali melakukan perlawanan. Presiden juga mengatakan bahwa :⁴²

⁴² Mestika Zed, 1997, *Pemerintah Darurat Republik Indonesia*, Jakarta : Grafiti, hal. 78

“Jangan mencoba bertempur di jalan-jalan Yogyakarta, kita akan kalah. Tetapi bawalah tentara ke luar kota, Jenderal dan berjuanglah disana sampai titik darah penghabisan. Ini adalah suatu perang gerilya seratus persen dan jangan biarkan Indonesia menyerah....”

Menurut Presiden Soekarno, Indonesia akan menang apabila perjuangan dilakukan di luar kota dan perjuangan akan terus berlangsung sampai titik darah terakhir.

Sementara itu dalam istana sudah berkumpul para menteri Bung Syahrir, H.A Salim, Prof Asikin, Mr Assaat, Mr Nazir Pamuncak dan Mr AG. Pringgodigdo⁴³. Kira-kira jam 12.00 Sri Sultan datang ke istana disusul oleh Jenderal Soedirman. Pada pukul 13.00, kapal terbang milik Belanda berterbangan secara rendah di atas istana tetapi tidak melakukan penembakan. Keluarga Soekarno diungsikan ke lubang di bawah pohon timbul yang terletak di belakang istana. Merasa tidak aman, Soekarno beserta keluarganya pindah ke kamar belakang podium. Disitulah Soekarno beserta keluarganya menyelamatkan diri, sedangkan pemimpin yang lainnya mencari tempat yang aman di sekitar istana.

Lewat jam 15.00 Belanda makin dekat ke istana dan mulailah terdengar tembakan di depan istana. Seorang opsir Belanda masuk ke perkarangan istana dan kemudian memanggil Soekarno untuk keluar istana. Soekarno pun akhirnya keluar istana dan menemui Opsir Belanda. Dalam perbincangannya, Opsir Belanda memerintahkan agar Soekarno bertemu Komandan Tentara van Langen yang sedang menunggu di depan kantor pos Yogyakarta. Akhirnya, Soekarno

⁴³ AH. Nasution, 1974, *Sekitar Perang Kemerdekaan*, Jilid 9, Bandung : Angkasa, hal. 207.

mengikuti Opsir Belanda untuk menuju ke depan kantor pos Yogyakarta. Di samping Soekarno juga ikut serta Syahrir, AG Pringgodigdo, Ajudan Sugandhi, Mangil, Tobing yang sedang membawa bendera Merah Putih serta pembantu Presiden R.O Permadipura. Sesampainya Soekarno di depan kantor pos, tampak kolonel van Langen berdiri menunggu kedatangan Soekarno. Kemudian van Langen berjabat tangan dengan Soekarno.

Setelah lima menit berbicara, Soekarno dan van Langen kembali ke istana. Setibanya di istana, Soekarno memerintahkan kepada Syahrir dan Sultan Hamengku Buwono untuk menjemput Mohammad Hatta yang sedang bersidang dengan KTN di Kaliurang. Namun ketika Syahrir ingin menjemput, Mohammad Hatta telah tiba di istana dan bertemu dengan van Langen. Kemudian van Langen memberikan pengumuman tentang peraturan-peraturan selama tinggal di istana. Tanggal 19 Desember 1948, jam 15.00 Belanda mengumumkan bahwa Yogyakarta sudah diduduki.

Pada tanggal 22 Desember 1948, jam 09.00 pagi, Soekarno, Mohammad Hatta, Syahrir, AG Pringgodigdo, Arsaat, Suriadarma dan H.A Salim dibawa ke luar Jawa, yaitu ke Prapat, Sumatra. Istana dijadikan sebagai tempat menawan para pemimpin seperti Leimena, Moh. Natsir, Ki Hajar Dewantara, Juanda, Ratulangi, Sewaka, Ratuhary, Sunarto dan Mohammad Rum. Untuk kemudian para pemimpin Republik yang ditawan oleh Belanda tersebut, diasingkan pada dua tempat yang berbeda. Tiga orang pemimpin besar Indonesia : Soekarno, H. Agus Salim dan Sultan Syahrir ditawan di Berastagi, Sumatra Utara kemudian



dipindahkan ke Prapat⁴⁴. Sedangkan Mohammad Hatta dan yang lainnya diasingkan ke Bangka.

Pagi harinya tanggal 22 Desember 1948, para anggota KTN sekretariat delegasi serta anggota yang ada di Kaliurang diangkut dengan truk militer Belanda ke Yogyakarta kemudian mereka dibawa ke markas T Brigade di Yogyakarta. Belanda memerintahkan agar anggota KTN kembali ke Yogyakarta. Sementara itu seluruh anggota delegasi Indonesia dan sekretarisnya dapat kembali ke rumah mereka masing-masing terkecuali Rum yang dibawa ke istana.

Seiring dengan penyerangan Belanda terhadap pusat Pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, maka Belanda berhasil menangkap sejumlah pemimpin Republik Indonesia. Mereka kemudian diasingkan ke Prapat dan Bangka. Selanjutnya Belanda melancarkan propaganda yang menyiarkan, bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Dan gerakan kemerdekaan Indonesia telah berhasil dibasmi dan Republik Indonesia telah hancur. Belanda juga memandang Soekarno-Hatta bukan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tetapi hanya "Pemimpin" terkemuka Indonesia⁴⁵. Dengan tertangkapnya Presiden, Wakil Presiden dan para menteri serta jatuhnya kota Yogyakarta maka untuk selanjutnya Pemerintahan dipindahkan ke Bukittinggi (Sumatra).

⁴⁴ AH Nasution, *op. cit*, hal. 212.

⁴⁵ Dwi Purwoko, *op. cit*, hal. 21.

C. Presiden Soekarno Mengeluarkan Mandat Kepada Syafruddin Prawiranegara

Dengan jatuhnya Yogyakarta ke tangan Belanda, Belanda yakin bahwa wilayah Indonesia secara keseluruhan akan kembali lagi ke tangan Belanda. Belanda juga yakin dengan ditangkapnya Bung Karno dan Bung Hatta serta sebagian besar dari pemimpin-pemimpin lainnya yang merupakan inti dari pimpinan pusat, Republik Indonesia sudah habis riwayatnya⁴⁶. Ternyata impian Belanda untuk dapat menjadi penguasa di wilayah Republik Indonesia hanyalah mimpi belaka. Belanda sama sekali tidak memperhitungkan, bahwa perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia merupakan perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Dan penyerangan terhadap pusat Pemerintahan Republik Indonesia berarti juga penyerangan terhadap seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pengumuman dari Belanda yang menyiarkan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi ternyata meleset, sebelum Presiden dan Wakil Presiden ditangkap oleh Belanda, mereka secara kilat berhasil mengadakan sidang kabinet bertempat di Kepresidenan. Hari Minggu pukul 10.00, tanggal 19 Desember 1948 sebelum Belanda dapat memasuki kota Yogyakarta diadakan sidang kabinet. Sidang kabinet itu dihadiri oleh Presiden Soekarno, Menteri Luar Negeri H. Agoes Salim, Menteri Pengajaran dan Kebudayaan Mr. Ali Sastroamijoyo, Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel Simatupang, Komandan Udara Suryadarma, Penasehat Presiden Sutan Syahrir.

⁴⁶ Syafruddin Prawiranegara, 1986, *Islam Sebagai Pedoman Hidup*, Kumpulan Karangan Terpilih, Jilid I, Jakarta : Inti Idayu, hal. 241.

Dalam sidang kabinet tersebut, Presiden mempertimbangkan dua hal: pertama, Presiden dan Wakil Presiden mengungsi keluar, tetapi harus dikawal oleh satu batalion tentara. Namun tentara yang akan mengawal Presiden sedang tidak berada di tempat karena tentara yang berada di Yogyakarta sudah ke daerah pertahanan Republik. Pertimbangan yang kedua untuk tetap tinggal di kota, adalah dengan membiarkan diri untuk ditawan oleh Belanda tetapi tetap dekat dengan KTN (Komisi Tiga Negara).

Dalam sidang kabinet tersebut sehubungan dengan aksi militer Belanda itu berhasil mengambil keputusan penting yaitu : ⁴⁷

1. Presiden dan Wakil Presiden akan tetap tinggal di dalam kota (walaupun sebelumnya telah direncanakan untuk terus berjuang bergerilya di luar kota), dengan pertimbangan keduanya tidak terjamin lagi untuk pergi keluar kota, karena pasukan pengawal yang dibutuhkan sebanyak satu batalion tidak tersedia.
2. Wakil Presiden dan Perdana Menteri menganjurkan supaya tentara dan rakyat melaksanakan perang gerilya terhadap tentara Belanda.
3. Presiden dan Wakil Presiden mengirimkan kawat-kawat Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran, di Bukittinggi bahwa dia diangkat sementara untuk membentuk Pemerintahan Darurat dan untuk membentuk kabinet dan mengambil alih pemerintahan.

Dari keputusan kabinet tersebut, sangat berbeda dengan keputusan yang pernah disepakati bersama sebelumnya. Karena sebelumnya pemerintah pernah

⁴⁷ Dwi Purwoko, *op . cit*, hal. 22.

mengatakan, bahwa dalam keadaan darurat pemerintahan akan mengambil sikap bergerilya dan pusat pemerintahan akan disiapkan dari suatu tempat bernama Sami galuh, kecamatan di sebelah barat laut Yogyakarta⁴⁸. Jenderal Soedirman yang sedang dalam keadaan sakit tidak setuju apabila Presiden tetap tinggal di kota, sehingga Soedirman memutuskan pergi keluar kota dan bergabung bersama anak buahnya untuk bergerilya.

Pada saat pasukan Belanda mulai mendekati kota, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden memberikan amanat kepada segenap bangsa Indonesia untuk terus berjuang melawan Belanda. Dalam amanatnya Presiden mengutarakan :⁴⁹

“Kami percaya bahwa seluruh rakyat Indonesia maupun yang berada di daerah Republik ataupun yang berada di daerah yang diduduki Belanda serentak akan berdiri di belakang Republik untuk menentang dengan segala tenaga dan batin yang ada pada kita. Kami mengetahui bahwa dengan kekuatan senjata mereka, Belanda mungkin akan dapat merebut dan menduduki beberapa tempat yang penting, akan tetapi tidak mungkin mereka dapat mematahkan perjuangan kita.....”

Sebelum Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, Presiden dan Wakil Presiden telah memberikan intruksi kepada Angkatan Perang Republik Indonesia untuk tetap meneruskan perjuangan. Dan pagi itu juga tanggal 19 Desember 1948 sebelum Belanda dapat menguasai Jogja, Kabinet Soekarno sempat bersidang dan mengambil putusan memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia yang pada waktu itu sedang berada di Sumatra, untuk membentuk Pemerintahan Darurat seandainya, Kabinet Soekarno

⁴⁸ Yayasan 19 Desember 1948, 1998, *op. cit*, hal. 83

⁴⁹ Dinas Sejarah Militer Kodam VII Diponegoro, *op. cit*, hal. 334.

karena halangan-halangan yang nyata tidak mungkin menjalankan tugasnya⁵⁰.. Apabila Syafruddin Prawiranegara gagal, maka kepada Maramis dan Sudarsono yang sedang berada di luar negeri (New Delhi) di tunjuk untuk membentuk pemerintahan di luar negeri (New Delhi).

Ada dua buah kawat yang dikirim Presiden dan Wakil Presiden, yang pertama di kirim kepada Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran yang sedang bertugas di Sumatera, berbunyi sebagai berikut :⁵¹

Kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 06.00 pagi, Belanda telah memulai serangannya atas ibukota Yogyakarta. Jika dalam keadaan pemerintahan tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami mengusahakan kepada Mr Syafruddin Prawiranegara Menteri Kemakmuran Republik Indonesia, untuk membentuk Pemerintahan Republik Indonesia Darurat di Sumatra.

Yogyakarta, 19 Desember 1948
Presiden (Soekarno)
Wakil Presiden (Mohammad Hatta)

Sedangkan kawat kedua ditujukan kepada Mr. A.A Maramis di New Delhi bunyinya sebagai berikut :⁵²

Kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 06.00 pagi Belanda telah memulai Serangannya atas ibukota Yogyakarta. Jika ikhtiar Mr. Syafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintah Darurat di Sumatra tidak berhasil kepada saudara dikuasakan untuk membentuk Exile Government Republik Indonesia di New Delhi. Harap dalam hal ini berhubungan dengan Mr Syafruddin

⁵⁰ Syafruddin Prawiranegara, 1975, *Sejarah Sebagai Pedoman Untuk Membangun Masa Depan*, Jakarta : Yayasan Idayu, hal. 42.

⁵¹ Ayib Rosidi, *op . cit*, hal. 109.

⁵² *Ibid*, hal. 110.

Prawiranegara di Sumatra. Jika hubungan tidak memungkinkan harap mengambil tindakan-tindakan seperlunya.

Yogyakarta, 19 Desember 1948
Wakil Presiden (Mohammad Hatta)
Menteri Luar Negeri (H. Agoes salim)

Diberikannya Mandat kepada Syafruddin Prawiranegara dengan tujuan, untuk mengatasi segala hal yang akan terjadi sehubungan dengan penyerangan Belanda terhadap wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Untuk mengatasi segala kemungkinan yang akan terjadi, maka Presiden Soekarno memerintahkan kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia, di Sumatra. Pemberian mandat kepada Syafruddin Prawiranegara dipertegas dengan dikeluarkannya perintah harian Wakil Presiden sebelum ditangkap. Perintah harian tersebut ditujukan kepada seluruh Angkatan Perang dan segenap Aparatur Pemerintah. Perintah harian ini kemudian menjadi dasar bagi kelanjutan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Perintah harian dari Wakil Presiden Mohammad Hatta berbunyi :⁵³

“Mungkin Pemerintah di Yogyakarta terkepung dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya, tetapi persiapan telah diadakan untuk meneruskan pemerintahan di Sumatra. Apaun terjadi dengan Pemerintahan di Yogyakarta, perjuangan diteruskan “

Lebih lanjut Presiden Mohammad Hatta menegaskan :

“ Musuh ingin menangkap pemimpin-pemimpin pemerintah, akan tetapi Republik tidak tergantung kepada nasib-nasib orang-orang yang berada pada pucuk pimpinan negara, para anggota dari pemerintahan. Rakyat harus berjuang terus dan saya yakin bahwa seluruh rakyat Indonesia siap mengambil over perjuangan dari kami.....

⁵³ Dwi Purwoko, *op. cit.*, hal. 23-24.

Hatta dalam pidatonya ingin mengatakan, bahwa walaupun Republik Indonesia terkepung dan pemimpin rakyat Indonesia ditawan, namun perjuangan rakyat akan terus berkobar sampai titik penghabisan.

Sementara itu dipilihnya Syafruddin Prawiranegara sebagai pemimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia dengan berbagai pertimbangan, bahwa Syafruddin Prawiranegara merupakan seseorang yang dipandang cakap dan paling cepat bergerak. Pada saat mendapatkan mandat dari Presiden Soekarno, usia Syafruddin Prawiranegara baru 37 tahun, usia yang masih muda jika dibandingkan dengan jabatan yang harus dipikulnya.

Dengan diberikannya mandat kepada Syafruddin Prawiranegara, maka roda pemerintahan sepenuhnya ada di bawah kendali Syafruddin Prawiranegara. Dengan mandat Presiden dan Wakil Presiden jelaslah, bahwa kendatipun pemimpin-pemimpin pemerintahan Republik Indonesia yang berada di Yogyakarta berhasil ditawan oleh Belanda, namun kekuasaan Pemerintahan akan terus berjalan di bawah kekuasaan Syafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatra. Setelah Presiden dan Wakil Presiden beserta para menteri ditangkap oleh Belanda, maka kekuasaan selanjutnya diserahkan kepada Syafruddin Prawiranegara dan pusat pemerintahan Indonesia dipindahkan ke Bukittinggi.

Sampai disini penjelasan mengenai latar belakang Syafruddin Prawiranegara mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Dalam bab selanjutnya akan dibahas mengenai peranan Syafruddin Prawiranegara selama memimpin PDRI.

BAB III

PERANAN SYAFRUDDIN PAWIRANEGARA SELAMA MEMIMPIN PEMERINTAH DARURAT REPUBLIK INDONESIA (PDRI)

A. Proses Terbentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia Pimpinan Syafruddin Prawiranegara

Keberhasilan Belanda menguasai Yogyakarta dan menangkap para pemimpin Republik Indonesia telah memberikan anggapan pada pihak Belanda, bahwa Republik Indonesia sudah lenyap dari muka bumi. Menurut Belanda, impiannya untuk menguasai Republik Indonesia telah menjadi kenyataan. Belanda sama sekali tidak membayangkan, agresi militer Belanda II terhadap Republik Indonesia, telah melemahkan posisinya di Dunia Internasional. Hal ini dikarenakan, ketika Belanda melakukan penyerangan terhadap Republik Indonesia, pihak KTN sedang mengadakan perundingan di Kaliurang. Belanda tidak sadar perlakuannya terhadap Republik Indonesia di lihat oleh Dunia Internasional.

Belanda beranggapan, dengan ditangkapnya pemimpin Republik Indonesia, maka akan tamat pula riwayat Republik Indonesia. Namun apa yang telah dibayangkan oleh Belanda hanyalah impian belaka. Ketika Belanda dapat menguasai Yogyakarta dan menangkap Pemimpin Republik Indonesia, seorang pemimpin baru yang bernama Syafruddin Prawiranegara muncul, untuk mengatasi kekosongan dalam pemerintahan. Syafruddin Prawiranegara dengan

gerak cepat membentuk Pemerintahan Darurat. Keinginan Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat semata-mata didorong oleh keinginannya untuk menyelamatkan Republik Indonesia.

Pada awalnya Syafruddin Prawiranegara beranggapan jika Belanda benar-benar melancarkan agresi militer II terhadap Republik Indonesia, maka pemerintahan selanjutnya akan diserahkan kepada Mohammad Hatta. Syafruddin Prawiranegara tidak pernah membayangkan bahwa dirinyalah yang akan memimpin Pemerintahan Darurat.

Seiring dengan penyerbuan pasukan Belanda terhadap Yogyakarta, pada waktu yang hampir bersamaan ternyata Belanda juga melakukan penyerangannya ke Sumatra. Agresi militer Belanda di Bukittinggi diawali dengan penyebaran famflet pada malam hari tanggal 18 Desember⁵⁴. Dalam famflet itu berisi pernyataan yang mengatakan, bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville. Agresi militer Belanda II terhadap Sumatra, dimulai dari Padang menuju ke arah utara, timur dan ke selatan. Setelah tiga hari melakukan penyerangan atas kota Bukittinggi, maka pada tanggal 22 Desember 1948 pasukan Belanda berhasil menguasai Bukittinggi. Dalam melancarkan serangannya terhadap Bukittinggi, Belanda menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di Bukittinggi. Tidak ketinggalan juga, Belanda menghancurkan kantor telegraf dan telepon yang merupakan sarana penghubung antara Sumatra dan Yogyakarta. Meskipun dalam keadaan rusak, kantor berita tersebut masih bisa menerima berita mengenai jatuhnya kota Yogyakarta dan tertangkapnya Presiden dan Wakil

⁵⁴ Ayib Rosidi, *op . cit*, hal. 110.

Presiden beserta para menteri. Syafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatra sangat terkejut mendengar kota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Syafruddin Prawiranegara yang mendengar dari radio, bahwa kota Yogyakarta jatuh dan pemimpin Republik Indonesia ditawan oleh Belanda, sempat tidak percaya dengan kejadian itu. Syafruddin Prawiranegara tidak begitu menanggapi berita radio tersebut, apalagi berita itu disampaikan oleh berbagai stasiun radio baik dalam maupun luar negeri. Namun semakin lama berita yang didengar semakin gencar, akhirnya Syafruddin Prawiranegara mengambil inisiatif untuk bergerak bersama-sama dengan Kolonel Hidayat pergi ke rumah Mohammad Hasan. Adapun tujuan Syafruddin Prawiranegara dan Kolonel Hidayat pergi ke rumah Mohammad Hasan, adalah untuk membahas langkah apa yang harus diambil jika benar Republik Indonesia telah jatuh ketangan Belanda dan Pemimpin Republik Indonesia ditawan.

Sore jam 18.00 Mr. Syafruddin Prawiranegara bersama Panglima Tentara Teritorial Sumatra Kolonel Hidayat yang didampingi oleh ajudannya Kapten Islam Salim menemui Mr Hasan untuk melanjutkan rapat membicarakan situasi dalam negeri, teristimewa mengenai situasi Yogyakarta⁵⁵. Dalam pertemuan itu Syafruddin Prawiranegara mengusulkan agar dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Mohammad Hasan menyetujui usul tersebut, maka diambil keputusan untuk mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang rencananya akan dibentuk di Halaban.

⁵⁵ Tjondronegoro, 1982, *Merdeka Tanah ku Merdeka Negeri ku*, Jilid II, Jakarta : CV NUGRAHA, hal. 106.

Sampai diadakannya pertemuan di rumah Mohammad Hasan, Syafruddin Prawiranegara belum menerima kawat dari Presiden yang menunjuk dirinya untuk mendirikan PDRI. Syafruddin Prawiranegara memiliki inisiatif untuk mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dengan tujuan untuk mengatasi segala kemungkinan yang akan terjadi menyangkut perjuangan dan kelangsungan hidup Republik Indonesia. Syafruddin Prawiranegara merasa memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan Republik Indonesia. Gagasan Syafruddin untuk membentuk pemerintahan darurat diilhami oleh pembicaraan-pembicaraan dalam sidang kabinet di Yogyakarta yang membahas kemungkinan membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatra apabila kota Yogyakarta diduduki Belanda⁵⁶.

Menurut Syafruddin Prawiranegara penyerangan Belanda terhadap kota Yogyakarta dan Bukittinggi merupakan peristiwa yang sangat tidak diduga oleh pihak Republik. Syafruddin juga tidak mempercayai bila Presiden dan Wakil Presiden menyerah begitu saja kepada Belanda.

Syafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatra sama sekali tidak mengetahui bahwa ada mandat yang dikirimkan kepadanya untuk mendirikan pemerintahan darurat. Kawat yang dikirimkan kepada Syafruddin Prawiranegara tidak pernah sampai ketangannya. Mandat itu dikirimkan melalui surat kawat kepada Syafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatra, untuk menjalankan tugas kenegaraan di Sumatra. Akan tetapi karena satu dan lain hal, kawat dengan mandat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan intruksi radio telegrafis kabinet yang konon sudah diperintahkan pengirimannya

⁵⁶ Ayib Rosidi, *op. cit*, hal. 112.

pada hari-hari itu tidak sampai diterima oleh Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara di Bukittinggi⁵⁷. Tidak heran apabila pada awalnya Syafruddin Prawiranegara ragu-ragu untuk membentuk PDRI, karena ia tidak mengetahui dirinya mendapatkan mandat untuk mendirikan Pemerintahan Darurat.

Pada dasarnya keinginan untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia sudah direncanakan sejak dahulu, yaitu ketika Wakil Presiden berkunjung ke Sumatra pada pertengahan November⁵⁸. Namun belum sempat Hatta membentuk pemerintahan darurat, ia sudah kembali lagi ke Yogyakarta untuk melakukan perundingan kembali dengan KTN.

Ternyata apa yang telah diramalkan oleh pemimpin Republik Indonesia terjadi juga, Belanda dengan tiba-tiba melancarkan agresi militer II. Walaupun Syafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatra tidak pernah menerima kawat intruksi dari Presiden Soekarno untuk membentuk pemerintahan darurat, namun atas kesadaran dirinya, ia membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia karena secara mental telah dipersiapkan⁵⁹.

Beberapa saat setelah diadakannya pertemuan di rumah Mohammad Hasan, Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara dan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Mohammad Hasan pergi ke Halaban tempat diadakannya pertemuan. Pada tanggal 21 Desember 1948, sekitar pukul 02.00 rombongan Syafruddin Prawiranegara pergi meninggalkan Payakumbuh untuk

⁵⁷ Islam Salim, 1995, *Terobosan PDRI dan Peranan TNI*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hal. 43.

⁵⁸ Ayib Rosidi, *op . cit*, hal. 107.

⁵⁹ Aboebakar Loebis, *op . cit*, hal. 275.

menuju ke Halaban. Pada saat genting menjelang meninggalkan Bukittinggi para pemimpin sudah memutuskan untuk pergi ke Halaban, dengan berbagai alasan: Pertama, Jalan Lempang antara Bukittinggi-Payakumbuh merupakan jalan keluar yang tepat untuk meloloskan diri dari kejaran Belanda. Kedua, di Halaban terdapat tempat penginapan darurat tanpa harus mengganggu penduduk dan Ketiga, Halaban merupakan daerah yang terletak di pegunungan sehingga sulit untuk dijangkau oleh Belanda. Bagi pemimpin Republik Indonesia di Sumatra, Halaban merupakan batu loncatan yang pertama untuk melarikan diri dari kejaran Belanda.

Mohammad Rasyid yang pada saat itu tidak berada di tempat, karena sedang berada di Pariaman untuk urusan dinas, ketika tiba di Bukittinggi tidak bertemu dengan Syafruddin Prawiranegara, Mohammad Hasan dan para pejabat lainnya. Akhirnya Mohammad Rasyid beserta rombongan menyusul ke Halaban tempat diadakannya pertemuan.

Pada pukul 03.00 dini hari tanggal 22 Desember 1948, Mohammad Rasyid dan rombongan tiba di Halaban. Rombongan Rasyid kemudian disambut oleh Rombongan Syafruddin Prawiranegara yang telah menanti kedatangan Mohammad Rasyid. Setelah Rasyid dan rombongan datang, maka rapat dibuka. Rapat dimulai pukul 04.00. Rapat tersebut diadakan di sebuah rumah dalam kompleks perkebunan teh di desa Halaban, di kaki Gunung Sago kurang lebih 15 Km sebelah timur Payakumbuh.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain: Menteri Kemakmuran Republik Indonesia Syafruddin Prawiranegara, Ketua Komisariat Pemerintah Pusat untuk

Sumatra Utara Teuku Mohammad Hasan, Residen Sumatra Tengah Mohammad Rasyid, Komisaris Negara Urusan Keuangan Lukman Hakim, Koordinator Perhubungan untuk Sumatra Indra Tjahya, Kepala Jawatan Pekerjaan Umum Sumatra Mananti Sitompul, Kolonel Laut Mohammad Nazir, Kolonel Laut Adam, Mr Abdul Karim Direktur BNI, Kepala Kementrian untuk Sumatra Abdul Latief Sujono, dan beberapa staf dari jawatan tersebut, antara lain Idris Batang Laris yang menjadi ajudan Syafruddin⁶⁰.

Dalam pertemuan tersebut, Mohammad Rasyid menjelaskan tentang keadaan yang terjadi di Bukittinggi. Rasyid menyetujui agar secepatnya di bentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Sampai rapat itu diadakan, belum satupun dari anggota rapat yang mengetahui bahwa Presiden sudah mengirimkan kawat kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat. Syafruddin Prawiranegara beserta anggota rapat lainnya berinisiatif untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kekosongan dalam pemerintahan, seperti yang diinginkan oleh Belanda.

Pada saat menentukan siapa yang akan memimpin PDRI, timbul keraguan pada diri Syafruddin Prawiranegara, karena di satu pihak dirinya bukan lah orang yang paling tua, namun di lain pihak, Syafruddin lah yang memiliki jabatan paling tinggi jika dibandingkan dengan anggota rapat yang lainnya. Pada akhirnya seluruh anggota rapat menyepakati untuk mengangkat Syafruddin Prawiranegara sebagai pemimpin (Ketua). Pada jam 04.30 pagi hari rapat telah

⁶⁰ Ayib Rosidi, *op . cit*, hal. 113.

mengambil keputusan untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia⁶¹. Keputusan untuk membentuk pemerintahan darurat tersebut dirasakan penting guna mengatasi kekosongan pemerintahan. Berita mengenai dibentuknya PDRI itupun kemudian disiarkan keseluruh pelosok tanah air dan penjuru dunia dengan Zender YBJ 6 yang dibawa dari Bukittinggi⁶². Dalam siarannya itu diberitahukan, bahwa Republik Indonesia tetap ada dan bersifat mobil (suatu pemerintahan yang “bergerak”, berpindah-pindah tempat)⁶³. Adapun formasi PDRI pada tanggal 22 Desember 1948 sebagaimana ditetapkan di Halaban pada waktu itu meliputi : ⁶⁴

1. Mr Syafruddin Prawiranegara, Ketua merangkap Menteri Pertahanan, Penerangan dan Luar Negeri Ad Interim.
2. Mr Mohammad Hasan, Wakil Ketua merangkap Menteri Dalam Negeri, Pendidikan, Kebudayaan dan Agama.
3. Mr. Mohammad Rasyid, Menteri Keamanan merangkap Menteri Sosial, Pembangunan, Pemuda dan Perburuhan.
4. Mr Lukman Hakim, Menteri Keuangan merangkap Menteri Kehakiman.
5. Ir. Mananti Sitompul, Menteri Pekerjaan Umum merangkap Menteri Kesehatan
6. Ir. Indratyaha, Menteri Perhubungan merangkap Menteri Kemakmuran.

⁶¹ Sardjono dan Marsadji, *op . cit*, hal. 74.

⁶² Lihat Lampiran 4, hal. 119.

⁶³ Mestika Zed, *op . cit*, hal. 105.

⁶⁴ J.R Chaniago, 1990, *Pemerintahan Darurat Dikaji Ulang*, Jakarta : Masyarakat Sejarah Indonesia, hal. 44.

7. Mardjono Dani Broto, Sekretaris.

Dalam memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, Syafruddin Prawiranegara menggunakan istilah Ketua untuk jabatannya. Hal ini ia lakukan, karena dirinya belum mengetahui adanya mandat dari Presiden yang dikirimkan lewat kawat untuk dirinya yang berisi perintah untuk mendirikan pemerintahan darurat⁶⁵. Syafruddin Prawiranegara tidak mau menggunakan istilah Presiden, walaupun dirinya sadar kedudukan “Ketua” tidak dikenal dalam UUD Republik Indonesia⁶⁶. Dan Syafruddin juga menyadari bahwa tanggung jawab yang harus dirinya pikul sama seperti dengan kedudukan seorang Presiden.

Anggota lain yang tidak menjadi menteri, diangkat menjadi staf PDRI. Jika dilihat dari susunannya, ada menteri yang menjabat lebih dari satu jabatan, hal ini sangat dimaklumi karena pemerintah darurat dibentuk dengan sangat tergesa-gesa dan dalam keadaan darurat. Anggapan Belanda yang mengatakan, bahwa Republik telah hancur hanyalah omong kosong belaka. Berkat ketelitian dari para pemimpin yang sedang berada di Sumatra, Republik Indonesia masih tetap ada. Syafruddin Prawiranegara dalam pernyataannya mengatakan :⁶⁷

“...Perjuangan ini tidak boleh dihentikan begitu saja dengan ditangkapnya Presiden dan anggota-anggota Pemerintahan RI lainnya. Menghentikan perjuangan berarti penghianatan terhadap cita-cita semula dan terhadap korban-korban yang telah jatuh mati atau cacat seumur hidup di medan perjuangan. Tidak ada di antara mereka itu yang berani mengharapkan bahwa Pemerintah Darurat akan bisa memperoleh kemenangan militer dengan perjuangan itu. Tetapi sebaliknya mereka yakin bahwa kita

⁶⁵ Ayib Rosidi, *op. cit.*, hal. 114.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Mestika Zed, *op. cit.*, hal. 113.

masih dapat melanjutkan perjuangan begitu rupa hingga Belanda pun tidak dapat memperoleh kemenangan militernya...”

Untuk melancarkan hubungan antara PDRI yang berada di Sumatra dan yang berada di daerah-daerah di Indonesia maupun India, didirikanlah Zender di beberapa tempat seperti Sumpur Kudus, Lintau Buo, Bidar Alam dan di Koto Tinggi. Dengan didirikannya Zender, maka hubungan antara pemerintahan di Sumatra dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia dapat tercapai. Sehingga berita mengenai didirikannya Pemerintahan Darurat di Sumatra dapat di dengar oleh para pemimpin yang berada di Jawa. Mereka pada dasarnya memberikan dukungan sepenuhnya terhadap PDRI pimpinan Syafruddin Prawiranegara.

Memang dalam melancarkan agresi militer II, Belanda dapat menguasai kota-kota besar, namun walaupun demikian daerah di luar kota tetap menjadi daerah kekuasaan Republik Indonesia. Di daerah yang masih menjadi kekuasaan Republik inilah pemerintahan tetap dijalankan. Setelah mendapatkan dukungan dari luar negeri dengan wakilnya AA Maramis, maupun dukungan dalam negeri yang terdiri dari para menteri yang tidak tertawan, maka Syafruddin sebagai Ketua dan beserta para menteri meluaskan susunan PDRI. Setelah bermusyawarah, maka ditetapkan susunan baru PDRI sebagai berikut :⁶⁸

1. Mr Syafruddin Prawiranegara

Ketua merangkap Menteri Pertahanan dan Penerangan.

2. Mr Susanto Tirtoprodjo

Wakil Ketua merangkap Menteri Kehakiman.

3. Mr. AA Maramis

Menteri Luar Negeri.

⁶⁸ Dwi Purwoko, *op . cit*, hal. 28.

4. Dr. Sukiman Wirjosandjojo

Menteri Dalam Negeri merangkap sebagai Menteri Kesehatan.

5. Mr. Lukman Hakim

Menteri Keuangan

6. I.J Kasimo

Menteri Kemakmuran, termasuk Pengawas Makanan Rakyat.

7. K.H Masjkur

Menteri Agama.

8. Mr. Teuku M. Hassan

Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

9. Ir. Inderatyahya

Menteri Perhubungan.

10. Ir. Mananti Sitompul

Menteri Pekerjaan Umum.

11. Mr. St. M. Rasyid

Menteri Perburuhan dan Sosial.

Kemudian untuk menghadapi Belanda di Sumatra, pemerintah darurat mengangkat Teuku Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer di Aceh, Dr F.L Tobing sebagai Gubernur Militer Sumatra Timur dan Tapanuli, Mr. Sutan Mohammad Rasyid sebagai Gubernur Militer Sumatra Tengah, R.M Oetojo sebagai Gubernur Militer Riau dan AK Gani sebagai Gubernur Militer Sumatra Selatan dan Jambi⁶⁹. Dengan dibentuknya Gubernur Militer, maka untuk setiap

⁶⁹ Ayib Rosidi, *op . cit*, hal. 115.

wilayah dapat mengatur strategi dalam menghadapi serangan Belanda. Sementara itu pemerintah darurat mengangkat pejabat-pejabat penting antara lain :⁷⁰

- a. Letnan Jenderal Soedirman, Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia.
- b. Kolonel A.H Nasution, Panglima Tentara dan Teeritorium Jawa.
- c. Kolonel Hidayat, Panglima Tentara dan Teeritorium Sumatra.
- d. Kolonel Nazir, Kepala Staf Angkatan Laut.
- e. Kolonel H Soejono, Kepala Staf Angkatan Udara.
- f. Komisaris Besar Polisi Umar Said, Kepala Kepolisian Negara.

Agar mempermudah hubungan antara daerah-daerah di pulau Jawa dengan Sumatra, maka Syafruddin Prawiranegara membentuk Komisariat PDRI di Jawa yang bergerak secara mobil di bawah pimpinan Mr Susanto Tirtoprodjo dengan formasi serta pembagian tugas sebagai berikut :⁷¹

- a. Mr. Susanto Tirtoprodjo Urusan Kehakiman dan Penerangan.
- b. I.J Kasimo Urusan Persediaan Makanan Rakyat.
- c. Kyai H. Masykur Urusan Agama
- d. R. Pandji Surono, Urusan Dalam Negeri.

Semua anggota PDRI yang berada di Halaban tidak bisa tinggal lama di daerah tersebut, karena pasukan Belanda semakin mendekat. Beberapa jam setelah terbentuknya PDRI, Belanda sudah menguasai Payakumbuh yang letaknya kurang lebih 18 Km dari Halaban tempat diproklamirkannya PDRI. Setelah susunan pemerintahan dianggap sudah memenuhi kebutuhan, maka mereka meninggalkan

⁵² Islam Salim, *Terobosan PDRI dan peranan TNI*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal.46.

⁷¹ Dwi Purwoko, *op . cit*, hal. 31.

Halaban. Halaban sudah dianggap sebagai tempat yang tidak aman untuk menjalankan pemerintahan. Berdasarkan informasi yang didapat dari Dinas Intelijen Republik Indonesia, Belanda sudah tiba di Baso yang merupakan kota kecil antara Payakumbuh dan Bukittinggi.

Terbentuknya PDRI, telah mempersempit peluang Belanda untuk dapat menghancurkan Republik Indonesia. Secara yuridis dapat dikatakan, bahwa kawat yang dikirimkan tanggal 19 Desember 1948, merupakan sumber hukum bagi berdirinya PDRI. Berdirinya PDRI telah menggantikan pemerintahan Soekarno-Hatta yang sedang ditawan oleh Belanda, sehingga legalitas PDRI benar-benar memiliki dasar yang kuat. Hal terpenting yang membuat PDRI terus kuat adalah, PDRI mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan didirikannya PDRI yang kemudian melaksanakan tugasnya sebagai pemerintahan yang bersifat mobil, maka rencana Belanda untuk menguasai Republik Indonesia secara penuh dapat digagalkan oleh PDRI.

B. Perjalanan PDRI Pimpinan Syafruddin Prawiranegara⁷²

Pada tanggal 24 Desember 1948 saat hari sudah malam, berangkatlah rombongan PDRI meninggalkan Halaban, menuju ke selatan dengan menggunakan mobil. Untuk mencapai daerah selatan Sumatra Tengah, Syafruddin beserta rombongan harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dan melewati hutan belantara yang sulit untuk dilewati. Rombongan yang pergi meninggalkan Halaban dibagi dalam dua kelompok dengan tujuan yang berbeda. Rombongan pertama, di bawah pimpinan Syafruddin Prawiranegara bersama sebagian besar

⁷² Lihat lampiran 6, hal.121.

menteri dalam kabinet, bergerak ke arah selatan untuk menuju ke Bidar Alam yang terletak tidak jauh dari kaki Gunung Kerinci di perbatasan antara Sumatra Barat dan Jambi. Ciri pertama dari kelompok ini adalah anggota rombongan pada umumnya terdiri dari petinggi pusat dengan pengawalan tentara dan dilengkapi dengan operator stasiun radio. Rombongan yang kedua di bawah pimpinan Mohammad Rasyid dan Aparat Pemerintahan Lokal Sumatra Barat hijrah ke Koto Tinggi, sebuah daerah yang terletak di lereng Bukit Barisan di bagian utara Kabupaten Limapuluh Kota. Rombongan Rasyid juga dilengkapi dengan pengawalan militer dan pemancar radio.

Pada saat inilah PDRI sesungguhnya telah melakukan gerilya, memimpin perjuangan Republik Indonesia menghadapi Belanda, berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain di daerah Sumatra Barat, mengadakan hubungan dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman di Jawa, memberi intruksi kepada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri (Maramis dan Dr. Sudarsono di New Delhi Wakil Republik Indonesia di PBB Palar dan lain-lain)⁷³. Selama dalam perjalanannya Syafruddin Prawiranegara beserta rombongan berkelana mengembara dari hutan ke hutan, dari satu bukit ke bukit yang lain dan dari satu kampung ke kampung lain, untuk menggelorakan semangat juang rakyat dengan segala suka dukanya.

Untuk mencapai Bidar Alam, Syafruddin Prawiranegara beserta rombongan harus menembus rimba belantara yang sangat sulit untuk dilewati. Dengan dikawal oleh satu Brigade Mobil, Syafruddin Prawiranegara beserta rombongan meninggalkan Halaban yang dianggap sudah tidak aman lagi untuk

⁷³ Ahmad Husein Dkk, 1978, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia Di Minangkabau/Riau 1945-19450*, Jilid II, Jakarta : Badan Pemurnian Sejarah Indonesia, hal. 63.

pertahanan. Adapun rombongan yang ikut dengan Syafruddin Prawiranegara terdiri dari Mohammad Hasan, Loekman Hakim, Indrayahya, Nazir, Kol A.L. Adam, Kol AUH Soedjono, Abdul Karim, Sambiyono dengan istri, Idris Batang Taris, Abdul Latief dan Kapten AURI D. Tamimi yang bertugas sebagai kepala tim sandi PDRI yang praptis menjadi penghubung PDRI dengan dunia luar⁷⁴.

Rombongan berangkat menuju ke Bangkinang, sampai di Lubuk Bangku pada pukul 11.00. Di Lubuk Bangku diterima kabar, bahwa Belanda telah menguasai Payakumbuh. Keesokan harinya yaitu pukul 09.00 pagi, rombongan sampai di Muaro Mahat dan pada pukul 17.00 sore rombongan tiba di Bangkinang⁷⁵. Sore itu langsung diadakan rapat mengenai pembagian tugas yang dipimpin langsung oleh Syafruddin Prawiranegara. Radio yang dibawa oleh rombongan kemudian diaktifkan, berita-berita mengenai medan pertempuran disebarkan kepada seluruh rakyat.

Pada tanggal 26 Desember 1948, Kota Bangkinang secara tiba-tiba di bom oleh Belanda. Dua hari kemudian Kolonel A. Halim bersama Kapten Sofyan Ibrahim dari Pekanbaru tiba di Bangkinang. Mereka kemudian memberikan laporan kepada PDRI tentang keadaan Republik.

Ketika berada di Bangkinang, Syafruddin Prawiranegara harus menggunakan rakit untuk menyebrang sungai. Terpaksa mobil milik Mohammad Hasan harus ditenggelamkan ke sungai Kampar, karena jalan untuk menuju ke Taluk tidak bisa dilewati mobil. Rombongan Mohammad Hasan tidak berani melewati sungai. Mereka lebih memilih untuk melewati jalan darat walaupun harus menempuh perjalanan lebih jauh. Akhirnya rombongan dibagi menjadi dua, Rombongan pertama di bawah pimpinan Syafruddin Prawiranegara melewati jalan

⁷⁴ Ayib Rosidi, *op. cit.*, hal. 119.

⁷⁵ Ahmad Husein Dkk, 1978, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI Di Minangkabau/Riau 1948-1949*, Jakarta, : Badan Pemurnian sejarah Indonesia, hal. 63.

Sungai. Sedangkan rombongan kedua di bawah pimpinan Mohammad Hasan melewati jalan darat.

Pagi harinya pasukan PDRI meninggalkan Bangkinang. Dan pada tanggal 1 Januari 1949 malam, rombongan tiba di Lipat Kain. Di tempat ini Syafruddin Prawiranegara mengadakan rapat untuk membicarakan situasi di daerah itu. Dalam rapat tersebut Syafruddin Prawiranegara membagi rombongan menjadi kelompok-kelompok kecil dengan tujuan agar perjalanan cepat dan rombongan dapat dengan mudah dilayani oleh rakyat.

Setelah rapat selesai, Lipat Kain pun ditinggalkan. Rombongan bergerak untuk menuju ke Muara Lembu melalui Kota Baru. Pada pukul 02.30 rombongan tiba di Muara Lembu untuk beristirahat sejenak. Ketika sudah cukup untuk beristirahat, rombongan melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Teluk Kuantan yang berjarak 11 Km dari Muara Lembu.

Pada malam harinya rombongan tiba di Teluk Kuantan dan menginap di rumah Dr Ilyas Dt Batuah. Rombongan yang lelah setelah melakukan perjalanan panjang, sepatutnya untuk beristirahat sejenak. Baru terlelap tidur, Belanda tiba-tiba membom dan menembaki kendaraan yang ada di daerah itu. Akhirnya rombongan memutuskan untuk meninggalkan tempat itu dan melakukan perjalanan kembali menuju ke Batang Karing dengan menggunakan kendaraan kingkong. Namun sayang mobil yang dinaiki oleh rombongan terpelosok kedalam lumpur sehingga rombongan berjalan kaki menuju ke Batang Karing. Setelah tiba di Batang Karing, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Kiliranjao.

Di Kiliranjao rombongan mendapatkan kendaraan jeep milik ALRI, kemudian rombongan pergi menuju ke pulau Punjung. Di tempat inilah radio dan

pemancar diaktifkan kembali. Beberapa anggota PDRI kemudian memberikan keterangan kepada penduduk dengan tujuan untuk mengobarkan semangat rakyat. Dari pulau Punjung rombongan melanjutkan perjalanan ke Abai Sangir.

Di Abai Sangir Rombongan Syafruddin Prawiranegara dan Mohammad Hasan bertemu kembali. Kedatangan rombongan di Abai Sangir di sambut oleh Wali Nagari dan staf yang kemudian membawa rombongan ke tempat Persanggrahan untuk berkumpul. Setelah seluruh rombongan berkumpul, PDRI kemudian melaksanakan tugasnya. Pemancar radio mulai diaktifkan kembali. Masing-masing anggota PDRI melaksanakan tugasnya. Setelah 25 hari di Abai Sangir, kemudian rombongan melanjutkan perjalanan ke Bidar Alam. Rombongan Syafruddin Prawiranegara dan Mohammad Hasan bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju ke Bidar Alam.

Pada akhir bulan Januari 1949, rombongan Syafruddin Prawiranegara tiba di Bidar Alam. Setelah melihat keadaan Bindar alam yang merupakan desa kecil dan terpencil, serta sulit untuk dijangkau oleh Belanda, maka ditetapkanlah Bindar Alam sebagai tempat kedudukan pimpinan pusat PDRI. Di Bindar Alam, PDRI mengumumkan eksistensinya baik ke wilayah Republik Indonesia maupun ke luar negeri. Alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan hubungan dengan dunia luar adalah sebuah Zender Transmitter (buatan Amerika) milik AURI yang ditangani oleh Kapten D. Tamimi. Di samping itu PDRI juga memiliki radio yang dapat menangkap siaran radio baik dari dalam maupun luar negeri.

Dengan adanya radio, maka hubungan antara PDRI dengan pusat-pusat perjuangan di Jawa, Sumatra bahkan India dapat dilakukan lewat radio.

Komunikasi antara daerah perjuangan maupun antara basis gerilya baik di Jawa maupun di Sumatra dapat dilakukan lewat Zender. PDRI yang berada di Bindar Alam dapat mengirimkan pesan, berita dan intruksi ke daerah-daerah perjuangan dan basis-basis gerilya, bahkan komunikasi tersebut sering dilanjutkan ke India, karena disitulah tempat kedudukan Menteri Luar Negeri PDRI Mr AA Maramis dan Duta Besar PDRI Dr Sudarsono melalui alat itu pula⁷⁶.

Dalam perjuangan PDRI, alat komunikasi merupakan sarana yang terpenting bagi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan adanya radio, para pemimpin yang terpisah karena bergerilya maupun yang sedang berada di luar negeri dapat melakukan komunikasi, sehingga dapat menentukan langkah dan menyatukan sikap untuk mempertahankan kemerdekaan. Melalui radio, PDRI juga dapat meyakinkan dunia internasional, bahwa Republik Indonesia masih tetap ada walaupun pemimpin Republik ditahan oleh Belanda. Menurut Syafruddin Prawiranegara, walaupun Presiden dan Wakil Presiden beserta para menteri ditawan oleh Belanda bukan berarti Republik lenyap.. Menurut Syafruddin Prawiranegara, ditawannya pemimpin Republik akan melahirkan pemimpin-pemimpin lainnya yang dapat membebaskan Republik dari kekosongan pemerintahan. Sejak akhir Desember 1948 sampai akhir 1949, radio memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalin hubungan dengan pusat pemerintahan.

RRI Kutaraja dan Suara RRI Rimba Raya yang terletak di Aceh, menjadi pintu gerbang dalam pengiriman berita dan menerima berita dari luar negeri. Sedangkan pesawat telegrafi yang berada di Koto Tinggi digunakan untuk

⁷⁶ Ayib Rosidi, *op . cit*, hal.121.



menerima dan mengirimkan berita ke Jawa, Palembang, Kutaraja dan India. Radio gerilya Bukit Barisan yang terletak di pedalaman Sumatra Selatan, memiliki peranan dalam menjalin hubungan dengan pusat pemerintahan PDRI, baik di Jawa maupun di New Delhi. Dengan adanya pemancar radio tersebut, hubungan antara pemimpin PDRI, menteri luar negeri dan wakil Republik Indonesia di luar negeri, dan hubungan dengan para pemimpin sipil dan militer di Jawa dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, maka perjuangan di dalam negeri dalam menghadapi tentara Belanda secara gerilya diimbangi pula oleh perjuangan diplomasi di tingkat internasional yang seirama⁷⁷.

Dengan demikian Peranan PDRI adalah sebagai kunci di dalam mengatur aliran informasi, sehingga mata rantai komunikasi tidak terputus-putus. Peran serta rakyat pedesaan dalam perjuangan untuk mempertahankan Republik Indonesia juga patut mendapatkan penghargaan. Dimana rakyat secara spontan dan sukarela membantu perjuangan antara lain: memberikan tempat untuk berteduh, bahan makanan, menyumbangkan tenaga pengangkut, kesemuanya menopang perjuangan dari nasi bungkus, membuat jalan dan jembatan⁷⁸. Sehingga dapat dikatakan, perjuangan PDRI tidak lepas dari proses dialektik antara diplomasi dan perjuangan bersenjata. PDRI yang bersifat mobil berfungsi sebagai pusat yang memperoleh pengakuan dari seluruh rakyat Indonesia, baik yang berada di tanah air maupun di luar negeri (New Delhi).

⁷⁷ *Ibid*, hal. 122.

⁷⁸ Sartono Kartodirdjo, 1990, *PDRI Dikaji Ulang*, Masyarakat Sejarah Indonesia, hal. 31.

Perjuangan PDRI untuk menyelamatkan Republik dari kehancuran banyak mendapatkan dukungan dari rakyat, baik melalui perang gerilya maupun melalui diplomasi. Meskipun serbuan awal Belanda itu berhasil baik, kegigihan perlawanan gerilyawan Republik serta tekanan dari masyarakat antar bangsa akhirnya memaksa Belanda untuk menyesuaikan diri⁷⁹.

Melalui Radio, PDRI berusaha menangkis segala tuduhan yang bersifat menjatuhkan Republik. PDRI berusaha meyakinkan Dunia Internasional, bahwa Republik Indonesia masih tetap ada dan TNI belum hancur seperti yang pernah dikatakan oleh Belanda, walaupun pemimpin Republik Indonesia ditawan oleh Belanda. Bagi Syafruddin Prawiranegara, dengan tertawannya pemimpin Republik, maka akan melahirkan pemimpin-pemimpin lainnya yang siap membela tanah air. Tuduhan Belanda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia telah hancur dan mati dibantah keras oleh pemimpin PDRI.

Ternyata pernyataan PDRI yang mengatakan, bahwa Republik Indonesia masih ada, mendapatkan reaksi dari Dunia Internasional yang secara langsung memberikan dukungan terhadap Republik Indonesia. Penjelasan yang disampaikan oleh pemimpin PDRI mengenai keadaan Republik di tanah air telah menimbulkan simpatik dari negara-negara sahabat terutama Asia. Bagi bangsa Indonesia, hal ini merupakan modal penting untuk menjatuhkan Belanda di mata Dunia Internasional.

⁷⁹ Audrey R. Kahin, *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*, Jakarta : Grafiti, 1989, hal. 15.

Melihat perlakuan Belanda terhadap Republik, maka pada tanggal 28 Desember 1948 Dewan Keamanan mengambil resolusi mengenai masalah yang sedang dihadapi oleh Indonesia, adapun isi resolusi tersebut adalah :⁸⁰

“ Memperhatikan bahwa pemerintah Belanda sampai sekarang belum membebaskan Presiden Republik Indonesia dan tahanan politik lain yang di maksud dalam resolusi tanggal 24 Desember 1948. Menyerukan kepada pemerintah Belanda untuk melepaskan tahanan politik itu dengan segera dan melaporkan Dewan Keamanan dalam waktu 24 jam setelah resolusi ini di terima”.

Menanggapi isi resolusi dari Dewan Keamanan tersebut, van Royen sebagai wakil dari Belanda memberikan keterangan kepada Dewan Keamanan. Royen mengatakan, bahwa Soekarno-Hatta dan para menteri lainnya sudah dibebaskan dari pengasingan. Royen juga menegaskan bahwa tahanan Republik tersebut sudah dapat bergerak bebas keluar wilayah Bangka.

Akan tetapi laporan dari KTN kepada Dewan Keamanan mengenai keadaan tahanan Republik di Bangka tidak sesuai dengan apa yang telah dibicarakan oleh van Royen kepada Dewan Keamanan. Laporan KTN mengenai hasil kunjungannya ke Bangka tanggal 15 Januari 1949 adalah sebagai berikut :⁸¹

“Menteri-menteri dan pejabat lain yang ditawan ke pulau ini (Bangka) pada tanggal 31 Desember 1948 di tahan dalam suatu gedung besar. Mereka mendapat kamar tidur bersama tanpa pintu yang berukuran 6 x 6 meter yang ditempati enam tempat tidur. Sebagai tambahan kepada mereka diberi suatu ruangan yang berukuran 4 x 10 meter yang dipisahkan dengan kawat dari suatu ruangan tamu yang besar...”

⁸⁰ *Ibid*, hal. 55.

⁸¹ Ide Anak Agung Gde Agung, 1995, *Pernyataan Rum-Van Roijen 7 Mei 1949*, Jakarta : Yayasan Pustaka Nusantara, hal. 57.

Laporan dari KTN tersebut merupakan pukulan yang sangat besar untuk Belanda. Belanda tidak dapat berbicara banyak mengenai apa yang telah disampaikan oleh KTN.

Sebagai reaksi atas tindakan Belanda, pada tanggal 20-23 Januari 1949 diadakan konferensi negara-negara Asia di New Delhi yang diprakarsai oleh Nehru. Konferensi tersebut dihadiri oleh: Afganistan, Australia, Birma, Ethiopia, Filipina, India, Iran, Irak, Libanon, Mesir, Pakistan, Saudi Arabia, Srilangka, Siria, Yaman, sebagai peserta penuh. Sedangkan Cina, Nepal, Selandia Baru, dan Siam dengan kedudukan sebagai peninjau. Dalam pidatonya, Nehru mengutuk tindakan Belanda terhadap Republik Indonesia. Nehru menyampaikan rasa simpatiknya melalui Dewan Keamanan.

Ternyata Konferensi yang diselenggarakan di New Delhi menghasilkan suatu resolusi yang secara penuh memberikan dukungan kepada Republik Indonesia. Namun sebaliknya, bagi Belanda adanya konferensi tersebut sangat mencemaskan pihak Belanda karena dapat merugikan kedudukannya.

Dalam konferensi tersebut, berusaha mendesak agar Belanda menarik pasukannya dari Yogyakarta dan mendesak agar Belanda menghentikan agresi militernya. Untuk Indonesia diharapkan agar segera menghentikan perang gerilya. Di samping itu konferensi juga menginginkan agar Belanda membebaskan pemimpin Republik yang ditahan tanpa syarat. PBB menganjurkan agar Belanda maupun Indonesia mengadakan perundingan dengan bantuan UNCI (United Nations Commission for Indonesia).

Pihak Belanda menolak usul yang disampaikan oleh konferensi. Sebagai tindak lanjutnya akhirnya pihak UNCI memberikan ultimatum, yaitu berupa pemberian waktu kepada Belanda untuk menarik pasukannya sampai tanggal 15 Februari 1949 dan apabila ultimatum tersebut tidak dipenuhi, maka akan dilaporkan kepada Dewan Keamanan.

Mendapatkan ultimatum dari UNCI, Belanda dengan Wakilnya Dr.Beel (Wakil Mahkota Kerajaan Belanda untuk Indonesia) mengajukan usul baru yaitu: mempercepat penyerahan kedaulatan kepada pemerintah federal Indonesia, mengadakan konferensi meja bundar dan membicarakan Unie Indonesia-Belanda⁸². Dr.Beel mengajak Soekarno dan Hatta yang masih berstatus tahanan untuk mengadakan perundingan.

Soekarno dan Mohammad Hatta menyetujui ajakan Belanda untuk melakukan perundingan, tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan pimpinan PDRI Syafruddin Prawiranegara yang memegang kekuasaan secara sah terhadap Republik Indonesia. Pada dasarnya Soekarno dan Hatta tidak berhak untuk menyetujui perundingan yang diusulkan oleh Belanda, karena status mereka tidak lagi mewakili rakyat, sebab kekuasaan pada saat itu sudah dilimpahkan kepada Syafruddin Prawiranegara.

Melihat tindakan dari Soekarno dan Hatta, Syafruddin Prawiranegara sangat kecewa. Sebagai wujud dari kekecewaannya, Syafruddin Prawiranegara dengan tegas mengatakan tidak setuju terhadap perjanjian yang akan dilaksanakan oleh Belanda dan Indonesia di bawah pimpinan Soekarno dan Hatta. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua PDRI, berusaha agar perundingan tersebut tidak terjadi, melalui Dr. Sudarsono sebagai Duta Besar Republik Indonesia di New Delhi dan melalui Panglima Besar Jenderal Soedirman dari Jawa. Hal ini dilakukan Syafruddin Prawiranegara, kerena dirinya tidak pernah berhubungan

⁸² Ajib Rosidi, *op . cit*, hal. 123.

dengan para pemimpin yang berada di Bangka. Namun sayang amanat yang disampaikan oleh pemimpin PDRI tidak mendapatkan tanggapan dari pemimpin Republik yang ditahan di Bangka. Ketika ingin mengadakan perundingan tersebut, pemimpin PDRI yang ditawan di Bangka tidak pernah mencoba untuk menghubungi PDRI, sehingga perundingan itu pun terjadi.

Tanggal 25 Maret 1949 pihak UNCI (KTN) di bawah pimpinan Merle Cochran mendorong kedua belah pihak agar secepatnya melakukan perundingan. Pada tanggal 2 April 1949 Mohammad Roem mengirimkan surat kepada UNCI yang menyatakan bahwa Republik Indonesia siap mengadakan perundingan dengan pihak Belanda. Dalam perundingan tersebut, pihak Republik Indonesia diketuai oleh Roem dan Belanda diketuai oleh van Royen.

Pada tanggal 14 April 1949 perundingan antara Belanda dan Indonesia secara resmi dibuka, dengan pimpinan UNCI diwakili oleh Merle Cochran (Amerika), Critchley (Australia) dan Herremans (Belgia). Perundingan tersebut terjadi selama 23 hari. Dalam perundingan tersebut melahirkan pernyataan yang dikenal dengan Pernyataan Roem-Royen. Masing-masing delegasi tersebut membuat pernyataan sebagai berikut :

- a. Mr Mohammad Roem yang menjadi wakil dari Indonesia membuat pernyataan sebagai berikut : ⁸³
 1. Mengeluarkan perintah kepada pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya.
 2. Kerjasama dalam mengembalikan perdamaian, menjaga ketertiban dan keamanan.

⁸³ Dwi Purwoko, *op. cit.*, hal. 58.

3. Turut serta dalam KMB di Den Haag, dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat.
- b. Dari pihak Belanda diwakili oleh Van Royen mengeluarkan pernyataan :⁸⁴
 1. Menyetujui kembalinya Pemerintah RI ke Yogyakarta.
 2. Menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik.
 4. Tidak akan mengakui negara-negara yang terbentuk di daerah-daerah yang dikuasai oleh RI sebelum tanggal 19 Desember 1949 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan RI.
 5. Menyetujui adanya RI sebagai bagian dari RIS.
 6. Berusaha dengan sungguh-sungguh supaya KMB segera diadakan setelah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta.

Hasil dari Perundingan Roem-Royen tersebut, mendapatkan banyak reaksi baik dari Panglima Besar Jenderal Soedirman maupun dari Pemimpin PDRI Syafruddin Prawiranegara. Sebagai bentuk reaksi terhadap perundingan Roem Royen, Syafruddin Prawiranegara mengadakan musyawarah besar PDRI yang berlangsung pada tanggal 14 sampai 17 Mei 1949 di Sumpur Kudus. Dalam rapat tersebut Syafruddin menyesali langkah-langkah diplomatik yang ditempuh oleh Sukarno dan Hatta. Para pemimpin PDRI menyatakan penyesalannya dan menentang Perundingan Roem Royen. Sebagai konsekuensi dari sikap PDRI, Syafruddin dalam pertemuan di Sumpur Kudus itu mendesak keras untuk

⁸⁴ *Ibid.*

secepatnya mengembalikan mandat yang dipegangnya kepada Soekarno-Hatta⁸⁵. Hal ini dikarenakan Syafruddin Prawiranegara tidak memiliki wewenang untuk memimpin Republik Indonesia, sesuai dengan posisi yang ia pegang, yaitu sebagai Ketua PDRI. Di samping itu lebih terhormat apabila Syafruddin Prawiranegara lebih dahulu mengembalikan mandat daripada mandat itu dicabut oleh Soekarno-Hatta. Seandainya kedua pemimpin pucuk Republik itu dikembalikan ke Yogyakarta, sementara PDRI menentang Roem Royen, mandat akhirnya akan dicabut dengan cara yang tidak normal⁸⁶.

Syafruddin Prawiranegara menganggap, bahwa perundingan tersebut disepakati oleh pimpinan Republik Indonesia yang sedang ditawan di Bangka, tanpa mengadakan kompromi dengan PDRI sebagai penguasa yang sah. Pada tanggal 14 Juni 1949, Syafruddin Prawiranegara mengeluarkan pernyataan yang mengatakan, bahwa apabila perundingan dilakukan oleh Belanda dengan pemimpin-pemimpin yang ditawan, maka akan merugikan pihak Republik Indonesia, hal ini disebabkan Belanda akan merasa lebih berkuasa sehingga dapat dengan mudah memaksakan kehendaknya.

Menanggapi Perjanjian Roem-Royen, maka pada tanggal 14 Juni Ketua PDRI Syafruddin Prawiranegara mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa Persetujuan Roem-Royen hanya bisa disokong dengan syarat :⁸⁷

1. TNI harus tetap tinggal pada posisi yang diduduki pada masa itu.

⁸⁵ Mestika Zed, *op . cit*, hal. 274.

⁸⁶ *Ibid*.

⁸⁷ Sardjono & Marsadji, *op . cit*, hal. 96.

2. Tentara Belanda harus berangsur-angsur ditarik kembali dari kedudukannya.
3. Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta setelah daerah itu dikosongkan harus mutlak dilaksanakan oleh Belanda.
4. Belanda harus mengakui kedaulatan Republik Indonesia atas daerah-daerah Jawa, Madura, Sumatra dan pulau-pulau sekitarnya sesuai dengan Persetujuan Linggajati.
5. Pembentukan pemerintahan di Indonesia yang demokratis dan merdeka tidak dengan perantaraan Belanda.

Syafruddin Prawiranegara sangat kecewa dengan pemimpin Republik Indonesia yang ditawan, karena bertindak tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan PDRI. Keberatan PDRI terhadap Persetujuan Roem-Royen wajar saja mengingat pengalaman pahit yang dialami Republik Indonesia, hal ini disebabkan karena Belanda selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian yang pernah disepakati bersama.

Sementara itu di Jawa, sebagai realisasi dari Perjanjian Roem-Royen, pada tanggal 24 Juni 1949 mulailah tentara Belanda meninggalkan Yogyakarta⁸⁸. Tanggal 30 Juni 1949, tepat pukul 14.00 kota Yogyakarta telah kosong oleh tentara Belanda. Selama Belanda meninggalkan kota Yogyakarta tidak terjadi insiden terhadap rakyat. Mulai tanggal 24 Juni 1949 seluruh tanggung jawab pemerintahan dan keamanan di Yogyakarta dipegang oleh Hamengku Buwono IX.

⁸⁸ Ahmad Husain Dkk, *op. cit.*, hal. 82.

Pada tanggal 5 Juli 1949 pejabat-pejabat KTN diundang ke Yogyakarta untuk menyaksikan kembalinya rombongan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ke Yogyakarta. Kemudian pada tanggal 6 Juli 1949 Soekarno dan Hatta beserta para menteri yang ditawan oleh Belanda di Bangka dibebaskan dan mereka kembali ke Yogyakarta. Pada tanggal 6 Juli 1949 Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta bertolak dari pangkal Pinang menuju ke Yogyakarta disertai oleh pemimpin Republik lainnya yang diasingkan di Bangka⁸⁹.

Kedatangan Soekarno beserta rombongan ke Yogyakarta disambut dengan riang oleh KTN dan seluruh rakyat Yogyakarta. Kedatangan para pemimpin Republik ini telah memberikan angin segar bagi rakyat. Republik Indonesia dapat bernafas lagi dengan lega, setelah berbagai cobaan yang menimpa Indonesia. Sang merah putih pun dikibarkan kembali ke alam bebas, setelah beberapa bulan tidak berkibar.

C. Syafruddin Prawiranegara Mengembalikan Mandat Kepada Soekarno

Berita mengenai Syafruddin Prawiranegara tidak menyetujui perjanjian Roem-Royen akhirnya sampai ke telinga Mohammad Hatta. Untuk mengatasi kesalahpahaman antara Pemimpin Republik Indonesia dengan Pemimpin PDRI, maka Mohammad Hatta bersama Natsir dan pemimpin lainnya pergi ke Kutaraja, Aceh. Adapun maksud kedatangan pemimpin Republik Indonesia ke Kutaraja adalah untuk menjelaskan maksud dari perundingan Roem-Royen dan mengajak Syafruddin Prawiranegara kembali ke Yogyakarta.

⁸⁹ Ide Anak Agung Gde Agung, *op . cit*, hal. 96.

Beberapa jam kemudian, rombongan Mohammad Hatta sampai di Kutaraja. Mohammad Hatta mengira, bahwa Syafruddin Prawiranegara masih berada di Kutaraja. Ketika para pemimpin Republik berada di Kutaraja mereka tidak bertemu dengan Syafruddin Prawiranegara, hal ini disebabkan Syafruddin sedang berada di Pemantang Siantar. Karena tidak bertemu dengan Syafruddin Prawiranegara, akhirnya Mohammad Hatta kembali ke Bangka. Namun sebelum ia kembali ke Bangka, Mohammad Hatta menunjuk Natsir, dr Leimena, dr Halim dan Agus Yaman untuk menjemput ketua PDRI di Sumatra Barat⁹⁰.

Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 1949, PDRI mengadakan rapat di Sungai Naning. Dalam rapat tersebut hadir para menteri PDRI, tokoh sipil, militer dan politik Sumatra Barat. Dalam rapat tersebut dibicarakan mengenai masalah pengembalian mandat dan penyambutan utusan dari pusat.

Pada awalnya anggota rapat menolak untuk menerima cara yang di tempuh pemimpin yang berada di Bangka. Tetapi sebagai Ketua, Syafruddin Prawiranegara berusaha menjelaskan, bahwa Soekarno-Hatta tanpa PDRI dan TNI, akan tetap melaksanakan perundingan dengan Belanda. Dan Dunia Internasional akan tetap mengakui Soekarno-Hatta sebagai pemimpin Republik Indonesia. Syafruddin Prawiranegara menegaskan, apabila PDRI dan TNI tetap mempertahankan pendiriannya, maka akan berdampak pada terjadinya dualisme pemerintahan yang dapat mengancam ketahanan dan persatuan nasional. Setelah mendengarkan penjelasan dari Syafruddin Prawiranegara, akhirnya anggota rapat dapat memakluminya sehingga dalam rapat tersebut menghasilkan⁹¹.

1. Utusan akan tetap ditemui.

⁹⁰ Dwi Purwoko, *cp . cit*, hal. 66.

⁹¹ Sardjono & Marsadji, *op . cit*, hal. 98.

2. Mandat tidak akan diserahkan sebelum bertemu/berembuk dengan Jenderal Soedirman.

Pada tanggal 3 Juli 1949 Mohammad Natsir beserta rombongan tiba di Bukittinggi. Dan dua hari kemudian rombongan Natsir ini pun tiba di Payakumbuh. Rombongan Natsir kemudian mengirimkan radiogram kepada pemimpin PDRI yang menyatakan, bahwa Rombongan Natsir telah berada di Payakumbuh dan akan menuju ke tempat pertemuan keesokan harinya. Rombongan Natsir ini menyebut diri mereka sebagai “Utusan Wakil Presiden Mohammad Hatta”.

Pada tanggal 6 Juli 1949 di desa Koto Kaciek, kecamatan Gubuk Panjang, Kabupaten Limapuluh Kota, diadakan pertemuan antara Natsir beserta rombongan dengan pihak PDRI yang diketuai oleh Syafruddin Prawiranegara beserta para menteri PDRI. Desa tersebut terletak 3 Km dari Padang Panjang.

Hadir dalam pertemuan tersebut, dari pihak PDRI selain Syafruddin Prawiranegara dan para menteri, juga hadir Letnan Kolonel Dahlan Ibrahim, Datuk Singo Mangkuto, M. Danubroto, dan Hamdani. Sedangkan dari pihak Republik terdiri dari Natsir, Leimena, Halim dan Agus Yaman.

Dalam pertemuan tersebut, Mr Syafruddin Prawiranegara sebagai Ketua PDRI menyatakan dengan tegas atas himbauan Wakil Presiden Mohammad Hatta yang diwakili oleh Natsir, katanya :⁹²

“Secara prinsipil PDRI tidak dapat menerima persetujuan Roem-Royen, namun demikian demi kepentingan perjuangan untuk menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan RI serta demi persatuan nasional, pimpinan PDRI bersedia mengembalikan mandat kepada

⁹² Ajib Rosidi, *op . cit*, hal. 129.

Presiden Soekarno sehingga tanggung jawab perjuangan selanjutnya akan berada kembali di tangan Presiden Soekarno”.

Syafruddin Prawiranegara menyadari bahwa pemerintahan yang sedang dipegang olehnya adalah pemerintahan sementara selama Presiden dan Wakil Presiden ditawan oleh Belanda. Merupakan kewajiban bagi Syafruddin Prawiranegara untuk mengembalikan mandat tersebut dengan alasan bahwa Republik Indonesia merupakan pemerintahan yang sah.

Pembicaraan antara kedua belah pihak, baik PDRI maupun utusan Hatta tersebut dapat berjalan dengan lancar. Hal ini dikarenakan masing-masing pihak sudah saling mengerti mengenai materi yang akan dibicarakan.

Natsir sebagai utusan dari Hatta, membujuk Syafruddin untuk kembali ke Yogyakarta dan bertemu dengan pemimpin Republik di Yogyakarta. Sebagai seorang kesatria yang memiliki tanggung jawab, maka Syafruddin Prawiranegara menerima usulan dari Natsir untuk segera kembali ke Yogyakarta.

Keberhasilan Natsir untuk meyakinkan Syafruddin Prawiranegara bukanlah hal yang sulit, karena Syafruddin Prawiranegara dan Natsir merupakan sahabat. Walaupun disadari ada beberapa faktor yang menjadi penyebab Syafruddin Prawiranegara bersedia untuk kembali ke Yogyakarta dan mengembalikan mandat. Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa faktor utama Syafruddin Prawiranegara bersedia kembali ke Yogyakarta adalah karena Natsir yang merupakan sahabat akrab Syafruddin Prawiranegara.

Setelah selesai mengadakan pertemuan di kota Kaciek, rombongan Syafruddin Prawiranegara dan utusan Hatta berangkat meninggalkan kota Kaciek

menuju ke Bukittinggi, untuk selanjutnya melakukan perjalanan ke Jawa⁹³. Hari Sabtu tepatnya tanggal 9 Juli 1949, Syafruddin Prawiranegara dan Natsir beserta rombongan berangkat meninggalkan Bukittinggi untuk kembali ke Yogyakarta, dengan menggunakan pesawat. Hari Minggu petang rombongan tiba di lapangan terbang Kebayoran-Jakarta, kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke Yogyakarta. Beberapa saat kemudian tepatnya pukul 10.45, Syafruddin Prawiranegara beserta rombongan tiba di lapangan terbang Maguwo-Yogyakarta.

Kedatangan Syafruddin Prawiranegara beserta rombongan di lapangan terbang Maguwo, disambut oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta, Sultan Hamengku Buwono IX, Mohammad Roem dan Ki Hajar Dewantara. Suasana riang dan penuh haru menyelimuti rombongan PDRI yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara. Rombongan Syafruddin Prawiranegara dianggap telah berhasil melaksanakan tugasnya di medan pertempuran.

Setelah beberapa hari berada di Yogyakarta, maka pada tanggal 13 Juli 1949 diadakan pertemuan antara pemimpin PDRI dengan pemimpin Republik yang pernah ditawan oleh Belanda. Tujuan diadakannya rapat tersebut adalah untuk menjelaskan perbedaan pendapat antara pemimpin Republik dengan pemimpin PDRI. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Sidang tersebut di mulai pukul 8.00 malam dan ditutup pukul 0.50⁹⁴.

⁹³ Lihat Lampiran 5, hal 120.

⁹⁴ Ayib Rosidi, *op . cit*, hal. 130.

Dalam sidang kabinet tersebut, Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri mengatakan, bahwa dalam pandangan pemimpin di Bangka, PDRI berkuasa penuh kedalam sedangkan pemimpin Republik yang berada di Bangka banyak memberikan bantuan kepada PDRI untuk mengadakan kontak keluar. Hatta dalam pidatonya juga mengatakan bahwa, Kabinet Hatta adalah kabinet yang sah sedangkan PDRI menjalankan pemerintahannya selama Kabinet Hatta tidak mampu untuk bertindak.

Sementara itu Syafruddin Prawiranegara dalam pidatonya menegaskan kepada rombongan yang hadir dalam rapat, ia mengatakan bahwa radiogram 19 Desember 1948 yang isinya memberikan kuasa kepada Syafruddin tidak pernah diterima dan bahwa PDRI dibentuk atas inisiatif para pemimpin politik dan militer yang ada di Bukittinggi⁹⁵. Pada waktu itu PDRI juga menganggap bahwa dirinya sebagai pimpinan perjuangan yang sah dan tujuan PDRI ialah untuk mengembalikan mandat⁹⁶. Syafruddin Prawiranegara dalam pidatonya juga menegaskan bahwa :⁹⁷

“Banyak kawan-kawan seperjuangan dalam PDRI menyesalkan pengembalian mandat itu, tetapi saya berpendapat, bahwa itulah satu-satunya jalan yang paling baik.....”

Dalam sidang tersebut Syafruddin Prawiranegara selaku ketua PDRI mengembalikan kembali mandat kepada Presiden Republik Indonesia Soekarno⁹⁸.

⁹⁵ Mohammad Rasyid, *op . cit*, hal. 54.

⁹⁶ Ahmad Husein Dkk, *op . cit*, hal. 89.

⁹⁷ *Ibid*, hal. 90.

⁹⁸ Ayib Rosidi, *op . cit*, hal. 130.

Presiden Soekarno sebagai pemimpin Republik Indonesia mengucapkan terimakasih kepada Syafruddin Prawiranegara yang telah menyelamatkan Republik Indonesia dari kehancuran.

Sidang kabinet itu merupakan peristiwa yang mengakhiri secara formal masa Pemerintah Darurat Republik Indonesia⁹⁹. Dengan penyerahan kembali mandat kepada Presiden Soekarno, maka berakhir juga lah masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.

Walaupun PDRI hanya berkuasa beberapa bulan yaitu mulai tanggal 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949, namun PDRI banyak memberikan sumbangan dalam mempertahankan Republik Indonesia. Karena berkat PDRI lah Republik Indonesia masih tetap ada sampai sekarang.

Demikian penjelasan mengenai peranan Syafruddin Prawiranegara selama memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Dalam bab selanjutnya akan dibahas mengenai dampak Syafruddin Prawiranegara mendirikan PDRI bagi perjalanan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

⁹⁹ *Ibid*, hal. 131.

BAB IV

DAMPAK SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

**MENDIRIKAN PDRI BAGI PERJALANAN BANGSA INDONESIA
DALAM MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA**

Pada saat terjadinya agresi militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948, Belanda berhasil menawan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Yogyakarta yang menjadi ibukota Republik Indonesia, juga berhasil diduduki. Praptis saja pada saat itu terjadi kekosongan pemerintahan dalam tubuh Republik Indonesia. Dan bila hal itu terjadi, maka eksistensi negara Republik Indonesia bisa tamat riwayatnya. Syafruddin Prawiranegara yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran tampil sebagai penyelamat. Dengan gerak cepat, Syafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatra segera menyusun pemerintahan darurat. Syafruddin Prawiranegara Bersama para pemimpin lainnya di Sumatra, mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pada tanggal 22 Desember 1948, Syafruddin Prawiranegara beserta pemimpin yang berada di Sumatra, mendirikan pemerintahan darurat di Halaban (Sumatra Barat).

Harus diakui, kehadiran PDRI bagi bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak diduga. Dalam keadaan bangsa yang sedang kacau dan sangat kritis, lahir inisiatif dari rakyat Indonesia untuk menyelamatkan Republik Indonesia. Seseorang yang memiliki peranan sangat besar dalam menyelamatkan Republik Indonesia adalah Syafruddin Prawiranegara.

Dengan didirikannya PDRI oleh Syafruddin Prawiranegara, berarti Pemerintahan Republik Indonesia masih ada dan tidak hancur seperti yang telah diumumkan oleh Belanda. Belanda mengira dengan jatuhnya kota Yogyakarta dan tertangkapnya para pemimpin Republik, berarti Republik Indonesia telah hancur. Namun Pemerintah Republik Indonesia tidak menyerah sampai disitu saja.

Memang singkat masa perjuangan PDRI, yang berjuang hanya dalam kurun waktu yang relatif singkat, antara 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949¹⁰⁰. Walaupun usia PDRI masih tergolong muda, namun telah memberikan banyak pengaruh terhadap perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Dengan adanya PDRI telah merubah garis sejarah bangsa Indonesia. Di mana dengan berdirinya PDRI, maka Republik Indonesia masih ada walaupun pemimpin Republik ditawan oleh Belanda.

Syafruddin Prawiranegara selaku Ketua PDRI dengan kekuatannya mampu mendorong rakyat untuk berjuang melawan Belanda. Rakyat yang merasa dirinya terancam, bersatu untuk melawan Belanda. Bersama rakyat, PDRI bergerilya dari satu tempat ke tempat lainnya untuk membangkitkan semangat rakyat. Peran serta rakyat dalam perjuangan tidak dapat dipisahkan oleh kemampuan PDRI dalam memberikan informasi kepada rakyat mengenai jalannya peperangan.

Selama dalam bergerilya, PDRI banyak dibantu oleh rakyat baik berupa penyediaan makanan maupun penyediaan tempat untuk menginap selama PDRI bergerilya. Bersama dengan rakyat, PDRI bertempur melawan Belanda dengan

¹⁰⁰ Dwi Purwoko, *op . cit*, hal. 74.

menggunakan taktik perang gerilya. Tanpa dukungan rakyat, perang gerilya pasti akan mengalami banyak hambatan¹⁰¹. Dari sini dapat diambil suatu hikmah dari perang gerilya yaitu adanya nilai kebersamaan, nilai bersedia untuk berkorban demi membela negara sebagai wujud dari jiwa patriotisme.

Terbentuknya PDRI secara politis, membuat pemerintahan Republik Indonesia berjalan terus dan tidak terputus. Meskipun Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta beserta para menteri ditawan oleh Belanda. Dalam keadaan darurat, pemerintah Republik Indonesia beserta angkatan bersenjata tetap tegak dan terus berjuang di bawah pimpinan Syafruddin Prawiranegara dengan PDRI-nya¹⁰². Walaupun dalam situasi yang sangat kritis, PDRI mampu mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh unsur-unsur pemerintahan yang terpisah-pisah.

Berdirinya PDRI telah memberikan wewenang kepada Syafruddin Prawiranegara untuk mengatur jalannya pemerintahan Republik Indonesia. Dengan demikian, kekuasaan secara penuh berada ditangan Syafruddin Prawiranegara sebagai Ketua. Di tangan Syafruddin Prawiranegara inilah pemerintahan untuk selanjutnya dijalankan. Untuk mengatur jalannya pemerintahan baik yang berada di Sumatra maupun luar Sumatra, maka PDRI membentuk komisariat yang bertugas mengatur pemerintahan di setiap daerah. Sebagai sarana komunikasi antara pemerintahan PDRI yang berada di luar Sumatra, maka digunakanlah Zender sebagai alat komunikasi yang utama.

¹⁰¹ *Ibid*, hal. 75.

¹⁰² Sardjono & Marsadji, *op . cit*, hal. 107.

Bagi rakyat Indonesia, dengan didirikannya PDRI telah membangkitkan semangat rakyat untuk berjuang melawan Belanda. PDRI yang bersifat mobil, bergerak secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dengan tujuan untuk mengobarkan semangat rakyat Indonesia.

Bagi bangsa Indonesia, PDRI merupakan suatu badan perjuangan yang dapat mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia dari kehancuran. Terbentuknya PDRI, telah menumbuhkan rasa percaya diri bagi bangsa Indonesia, bahwa dalam keadaan apapun, para pemimpin Indonesia dapat menyelamatkan negara Indonesia. Berdirinya PDRI, telah mendorong bangsa Indonesia untuk tetap berjuang melawan Belanda. Jadi dengan demikian tepatlah apa yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat waktu itu untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia¹⁰³.

Selama bergerilya, PDRI berusaha menangkis segala propaganda yang pernah diumumkan oleh Belanda yang menyatakan Republik Indonesia telah hancur. PDRI membantah secara keras, bahwa Republik Indonesia telah hancur. PDRI dengan segala kekuatannya berusaha menjelaskan tentang keadaan Republik Indonesia sebenarnya. PDRI berusaha meyakinkan Dunia Internasional bahwa TNI dan Pemerintahan Indonesia masih ada. Keluhan PDRI mengenai keadaan Indonesia terdengar sampai keluar negeri, melalui menteri luar negeri PDRI Maramis yang sedang berada di New Delhi. Maramis berusaha meyakinkan Dunia Internasional mengenai keadaan sesungguhnya yang terjadi di Indonesia. Tindakan bangsa Indonesia ini mendapatkan simpatik dari Dunia Internasional

¹⁰³ *Ibid.*, hal. 104.

yang mengecam tindakan Belanda terhadap Indonesia. Melalui PDRI negara-negara Asia memberikan dukungannya secara penuh terhadap eksistensi PDRI.

Impian Belanda untuk kembali ke Indonesia, telah dibuyarkan oleh beberapa kekuatan dari berbagai penjuru, di dalam dan di luar negeri¹⁰⁴. Kekuatan terbesar yang paling penting dari dalam negeri adalah adanya PDRI yang mendapat dukungan baik dari TNI maupun dari rakyat Indonesia. Sedangkan kekuatan yang berasal dari luar negeri yaitu negara-negara Asia yang tergabung dalam PBB.

Jika dipandang dari segi hukum, terbentuknya PDRI adalah sah karena yang menjadi dasar dari terbentuknya PDRI tersebut adalah mandat dari Presiden yang dikirim melalui telegram. Meskipun diakui telegram tersebut tidak pernah sampai ke tangan Syafruddin. Dengan adanya mandat tersebut, maka status atau kedudukan PDRI semakin kuat sama seperti dengan pemerintahan Republik Indonesia sebelumnya. Sehingga dengan demikian Indonesia masih tetap ada karena masih memenuhi unsur berdirinya suatu negara yaitu masih memiliki wilayah, rakyat dan pemerintahan. Hal inilah yang membantu Indonesia dalam percaturan politik internasional terutama dalam sidang PBB¹⁰⁵.

Dengan demikian berdirinya PDRI, telah memberikan dampak yang positif bagi sejarah bangsa Indonesia. Terbentuknya PDRI membuat kemenangan besar bagi bangsa Indonesia.

Demikianlah penjelasan mengenai dampak Syafruddin Prawiranegara mendirikan PDRI bagi perjalanan bangsa Indonesia dalam mempertahankan

¹⁰⁴ Mestika Zed, *op . cit*, hal. 307.

¹⁰⁵ Sardjono & Marsadji, *op . cit*, hal. 107.

kemerdekaan Indonesia. Dalam bab selanjutnya, yaitu bab terakhir akan dibahas tentang simpulan.



BAB V

SIMPULAN

Sebagai penutup dalam skripsi ini, maka dapat diambil beberapa simpulan yaitu :

1. Latar belakang Syafruddin Prawiranegara mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) didasarkan oleh beberapa alasan. Pertama, Belanda melanggar perjanjian Renville yang telah di sepakati bersama baik oleh pihak Belanda maupun pihak Indonesia. Kedua, jatuhnya kota Yogyakarta, sebagai wujud dari pelanggaran terhadap perjanjian Renville. Ketiga, adanya mandat dari Presiden Soekarno kepada Syafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatra.
2. Kegiatan Syafruddin Prawiranegara selama memimpin PDRI. Diawali dari proses terbentuknya PDRI di Halaban. Setelah itu Syafruddin Prawiranegara bersama pemimpin PDRI lainnya bergerilya mengobarkan semangat rakyat, sampai pada akhirnya penyerahan kembali mandat kepada Presiden Soekarno, pada tanggal 13 Juli 1949.
3. Meskipun Syafruddin Prawiranegara hanya beberapa bulan memimpin PDRI, namun telah memberikan banyak pengaruh bagi perjuangan bangsa Indonesia untuk dapat mempertahankan kemerdekaan. Belanda yang mengira bahwa Republik Indonesia telah hancur ternyata salah besar, karena Syafruddin Prawiranegara dengan gerak cepat memproklamkan terbentuknya PDRI. Syafruddin

Prawiranegara bersama pemimpin PDRI lainnya, dengan segala kekuatan menggelorakan semangat rakyat Indonesia untuk terus berjuang. Berdirinya PDRI membuat posisi Belanda semakin lemah dan pada akhirnya Belanda meninggalkan Indonesia. Dengan berdirinya PDRI, maka bangsa Indonesia mampu mendapatkan kemenangan kembali dari tangan Belanda.



DAFTAR PUSTAKA

- Aboe Bakar Loebis, 1992, *Kilas Balik Revolusi*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Audrey, R, Kahin, 1989, *Pergolakan Daerah Pada awal Kemerdekaan*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Chaniago, J.R, 1990, *Pemerintah Darurat Republik Indonesia Dikaji Ulang*, Jakarta : Masyarakat Sejarah Indonesia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949*, Jakarta : PT Tiara Lantoro Gung Persada.
- Dinas Sejarah Militer Kodam VII Diponegoro, 1977, *Rumpun Diponegoro dan Pengabdianannya*, cetakan I, Semarang : CV Borobudur Megah.
- Echols, John, dan Hasan Sadily, 1990, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia.
- Gottschalk, Louis, 1986, *Mengerti Sejarah*, Jakarta : UI-Press.
- Husein, Ahmad, 1978, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia Di Minangkabau / Riau 1945-1950*, Jakarta : Badan Pemurnian Sejarah Indonesia.
- Islam Salim, 1995, *Terobosan PDRI dan Peranan TNI*, Jakarta : Sinar harapan.
- Ide Anak Agung Gde Agung, 1995, *Pernyataan Rum-Van Roijen 7 Mei 1949*, Jakarta : Yayasan Pustaka Nusantara.
- Kementrian Penerangan Republik Indonesia, *Beberapa Tjataan Detik dan Peristiwa 17 Agustus 1945-23 Januari 1950*, Yogyakarta : Kementrian Penerangan Republik Indonesia.
- Koenjaraningrat, 1993, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo, 1995, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Jakarta : Yayasan Benteng Budaya.
- Lembaga Sejarah Hankam, 1967, *Markas Besar Komando Djawa 1948-1949*, Jakarta.
- Mani, *Jejak Revolusi 1945 sebuah kesaksian Sejarah*.
- Mestika Zed, 1997, *Pemerintah Darurat Republik Indonesia*, Jakarta : Grafiti



- Moedjanto, G, 1989, *Indonesia Abad Ke-20*, Jilid II, Yogyakarta : Kanisius.
- Moekardi, 1976, *Akademi Militer Yogyakarta dalam Perjuangan Pisik 1945-1949*, Jakarta : PT INALTU.
- Muhammad Rasyid, 1982, *Di Sekitar PDRI*, Jakarta : CV Bulan Bintang.
- Nasution, A.H, Jenderal, 1971, *Tentara Nasional Indonesia*, Jilid II, Jakarta : Seruling Masa.
- , 1974, *Sekitar Perang Kemerdekaan*, Jilid 9, Bandung : Angkasa.
- Notosusanto, Nugroho, 1971, *Ichtiar Sejarah Republik Indonesia (1945-sekarang)*, Jakarta.
- Panitia Istilah Menejemen, *Kamus Istilah Menejemen*, Jakarta : Balai Aksara.
- Poerwadarminta, W.J.S, 1982, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Prawiranegara, Syafruddin, 1986, *Islam Sebagai Pedoman Hidup*, Kumpulan karangan Terpilih, Jilid I, Jakarta : Inti Indayu.
- , 1975, *Sejarah Sebagai Pedoman Untuk Membangun Masa Depan*, Jakarta : Yayasan Idayu.
- Purwoko, Dwi, *Perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)*, Jakarta : Media Da'Wah.
- Rosidi, Ayip, 1986, *Syafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*, Jakarta : Indayu Press.
- Sarjono, 1982, *Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)*, Penyelamat Negara Dan Bangsa Indonesia, Jakarta : Tertanas.
- Sulistyo Atmojo, *Mengenang Almarhum Jenderal Soedirman*, Jakarta : Yayasan Panglima Besar Jenderal Soedirman.
- Tarjono, 1984, *Pak Dirman Memimpin Perang Gerilya Rakyat Semesta*, Yogyakarta : Yayasan Wiratama.

Tjondronegoro, 1982, *Merdeka Tanah Ku Merdeka Negeri Ku*, Jilid II, Jakarta :
CV Nugraha.

Tjokropranolo, 1991, *Pak Dirman Pemimpin Pendobrak Terakhir Penjajahan Di
Indonesia*, Jakarta : CV Haji Masagung.

Yayasan 19 Desember 1948, 1994, *Perang Rakyat Semesta (1948-1949)*, Jakarta :
Balai Pustaka.



LAMPIRAN



Lampiran 1 : Manfaat Penulisan Skripsi Syarifuddin Prawiranegara Bagi pendidikan

**MANFAAT PENULISAN SKRIPSI BERJUDUL
SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA MEMIMPIN PEMERINTAH
DARURAT REPUBLIK INDONESIA (PDRI)
TAHUN 1948-1949 TERHADAP PENGAJARAN SEJARAH**

Di era yang serba moderen dengan berbagai kecanggihan dan kehebatan umat manusia untuk dapat menciptakan teknologi serta melahirkan hal-hal yang serba baru, membuat manusia berlomba-lomba untuk melangkah ke depan. Dalam sekolah-sekolah baik dasar maupun sekolah tinggi sudah mulai diajarkan untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi. Dengan teknologi yang telah canggih pada masa sekarang ini, membuat generasi muda lebih santai dalam menjalankan hidup. Segala sesuatu dapat segera terpenuhi tanpa harus bekerja keras. Dengan kemajuan teknologi seseorang dapat berbuat apa saja tanpa harus memikirkan kepentingan orang lain. Orang dapat berbuat apa saja meski harus merugikan bangsa dan negaranya sendiri. Dengan sikap seperti ini lama kelamaan dapat melunturkan semangat gotong royong, patriotisme dan nasionalisme yang merupakan warisan para pahlawan. Mementingkan diri sendiri dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi telah menguasai manusia jaman sekarang. Bila hal ini terjadi terus menerus, maka akan berakibat buruk bagi bangsa Indonesia.

Bila dicermati lebih mendalam ada sesuatu yang menyebabkan manusia berbuat demikian. Ada sesuatu yang penting dan ditinggalkan oleh generasi muda sekarang, yang dapat berdampak pada kurang sadarnya generasi muda akan

pentingnya sikap nasionalisme dan patriotisme yang lama kelamaan menjadi luntur. Ternyata Generasi muda kurang sadar pentingnya belajar sejarah bangsanya, yang hampir mereka tinggalkan bahkan dilupakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Seandainya manusia sekarang mau belajar sejarah bangsanya ketika berjuang merebutkan kemerdekaan dan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Bagaimana para pahlawan berjuang tanpa memikirkan kepentingan pribadinya sendiri, tetapi mereka lebih mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Sejarah perjuangan para pahlawan Republik Indonesia merupakan salah satu sejarah yang hampir terlupakan oleh segenap rakyat Indonesia. Sejarah dianggap sebagai ilmu yang tidak pernah mengalami kemajuan dan belajar sejarah dianggap seperti belajar hal-hal yang kuno.

Sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa yang lampau. Mempelajari sejarah berarti mengingat kembali peristiwa atau kejadian pada masa yang lampau. Peristiwa atau kejadian tersebut kemudian dapat diambil hikmahnya sebagai bekal untuk dapat menatap masa depan yang lebih baik. Jadi mempelajari sejarah bukan hanya sekedar menghafal, tetapi yang terpenting adalah mengambil makna dari sejarah itu sendiri. Bila hal ini sudah dapat diterapkan dalam diri generasi muda, maka mereka akan cenderung lebih mencintai sejarah.

Belajar sejarah dapat memberikan bekal kepada generasi muda untuk dapat melangkah kedepan. Agar dapat melangkah ke depan, seseorang harus dapat melihat masa lalunya yang kemudian dapat dijadikan patokan untuk melangkah

kedepan. Seperti halnya suatu bangsa, agar dapat maju bangsa tersebut harus dapat melihat sejarah bangsanya, yang kemudian menjadi landasan untuk melangkah kedepan. Belajar dari kegagalan dan keberhasilan masa yang lalu dapat menjadi dasar bagi suatu negara untuk berkembang. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarah bangsanya. Bila suatu bangsa melupakan sejarah bangsanya, maka negara tersebut akan kehilangan jatidirinya sebagai bangsa yang mencintai sejarah. Dengan belajar sejarah, generasi muda akan belajar dari kegagalan dimasa yang lalu dan tidak akan mengulangnya pada masa sekarang.

Sudah lama bangsa Indonesia kehilangan jatidirinya sebagai bangsa yang mencintai sejarah bangsanya. Generasi muda pada masa sekarang cenderung kurang menyukai bahkan meninggalkan sejarah bangsanya. Di bangku sekolah, pelajaran sejarah hanya diajarkan secara sepintas dan tidak secara mendalam. Sejarah dianggap sebagai pelajaran yang kurang penting. Hal inilah yang menyebabkan sejarah kurang diminati.

Pada masa sekarang ini generasi muda kurang sadar akan pentingnya belajar sejarah. Sejarah diibaratkan sebagai pelajaran yang membosankan karena hanya menekankan pada hafalan dan mencatat buku. Tidak heran bila generasi muda sekarang ini tidak tahu sejarah bangsanya sendiri. Generasi muda sama sekali tidak menyadari, bahwa belajar sejarah bukanlah pelajaran yang hanya menekankan pada hapalan, melainkan dengan belajar sejarah dapat ditanamkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme kepada generasi muda. Generasi muda juga diajarkan untuk dapat menghargai jasa para pahlawan dan mengingat kembali

perjuangan mereka dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Hal seperti ini mungkin tidak akan terjadi apabila sejak dini generasi muda sudah mulai diajarkan untuk mencintai sejarah bangsanya, baik melalui pendidikan di sekolah-sekolah maupun didalam keluarga. Sedikit demi sedikit anak juga diajarkan untuk lebih mengenal sejarah bangsanya. Dengan menanamkan sikap untuk mencintai sejarah bangsanya, maka anak sejak dini mulai lebih dapat menghargai jasa para pahlawan.

Kepedulian generasi muda untuk mau melihat ke belakang sejarah bangsanya merupakan salah satu wujud cinta terhadap warisan budaya bangsa. Orang tidak akan pernah hidup tanpa ada masa lalu. Dan orang tidak akan pernah bisa berkembang tanpa belajar dari masa lalu.

Penulisan skripsi yang berjudul Syafruddin Prawiranegara Memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia, ditulis dengan tujuan untuk mengungkapkan kembali sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang hampir hilang dan dilupakan oleh generasi muda. Dengan skripsi ini diharapkan generasi muda dapat mengingat dan mengenal salah satu tokoh yang telah memberikan banyak pengaruh bagi sejarah bangsa Indonesia.

Sejarah Syafruddin Prawiranegara, merupakan salah satu sejarah perjuangan yang hampir dilupakan oleh generasi muda sekarang. Tidak semua generasi muda tahu tokoh yang bernama Syafruddin Prawiranegara. Tokoh yang muncul ketika negara sedang berada dalam kekacauan dan tidak dapat lagi menjalankan pemerintahan. Dan tidak semua orang tahu bahwa Syafruddin

Prawiranegara merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Bila dikaji secara mendalam, Syafruddin Prawiranegara merupakan tokoh yang memberikan pengaruh sangat besar bagi sejarah bangsa Indonesia. Keberaniannya dalam mengambil tindakan patut mendapatkan penghormatan dari seluruh rakyat Indonesia. Ketika negara sedang jatuh dan tidak dapat menjalankan lagi roda pemerintahan, Syafruddin Prawiranegara sebagai salah seorang anak bangsa muncul kepermukaan untuk menyelamatkan Republik Indonesia. Perjuangannya menggelorakan semangat rakyat untuk terus berjuang sampai titik darah terakhir, telah membuktikan, bahwa Syafruddin merupakan orang yang sangat berpengaruh.

Sosok Syafruddin Prawiranegara merupakan tokoh yang hampir dilupakan oleh generasi muda. Tidak semua orang tahu perjuangannya selama mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sayangnya para tokoh PDRI, seperti Syafruddin Prawiranegara cenderung dilupakan dalam pengajaran sejarah. Maka untuk itu, baik kiranya apabila sejarah Syafruddin Prawiranegara diajarkan di sekolah-sekolah. Memang diakui kepemimpinan Syafruddin Prawiranegara sangat singkat, namun telah memberikan makna penting bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Keberanian dan perjuangannya Syafruddin dapat menjadi idola bagi generasi muda pada masa sekarang ini. Dengan sifat yang dimiliki oleh sang idolanya, maka generasi muda akan mulai memiliki sikap untuk lebih menghargai sang tokoh dan dapat meneladani sikap sang tokoh. Penghormatan terhadap sosok

sang idola akan menumbuhkan sikap mental generasi muda untuk dapat menghargai jasa pahlawannya. Semangat patriotisme dan nasionalisme yang Syafruddin Prawiranegara miliki diharapkan dapat menjadi contoh bagi generasi muda.

Skripsi yang berjudul Syafruddin Prawiranegara memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia tahun 1948-1949 memiliki nilai yang penting bagi generasi muda pada masa sekarang ini. Generasi muda pada masa sekarang harus memiliki kesadaran bahwa mempertahankan kemerdekaan merupakan pekerjaan yang tidak gampang dan membutuhkan pengorbanan serta kerja sama seluruh rakyat Indonesia. Generasi muda juga harus menyadari betapa pentingnya mempertahankan kemerdekaan.

Syafruddin Prawiranegara merupakan salah satu sosok pejuang yang patut untuk dikenal dan ditiru sikapnya oleh generasi muda sekarang ini. Dengan semangat patriotisme yang dimilikinya, ia berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, ketika Republik sudah tidak dapat lagi menjalankan pemerintahan. Dengan gerak cepat Syafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Syafruddin Prawiranegara mengambil inisiatif untuk membentuk Pemerintah Darurat didasarkan oleh semangat patriotisme.

Sikap pemberani yang dimiliki oleh Syafruddin Prawiranegara patut untuk ditiru oleh generasi muda pada masa sekarang. Sehingga sangatlah penting apabila sejarah Syafruddin Prawiranegara memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia perlu untuk diajarkan di sekolah. Generasi muda sejak dini

harus dapat ditanamkan sikap untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan dan dapat meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan membaca skripsi ini diharapkan generasi muda dapat mengetahui secara garis besar sejarah perjuangan Syafruddin Prawiranegara dalam Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Generasi muda diharapkan juga tahu siapa Syafruddin Prawiranegara dan Bagaimana bentuk perjuangannya, sehingga dapat mengambil nilai-nilai kepahlawanan yang terkandung didalamnya. Nilai-nilai tersebut sangat penting bagi generasi muda dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Syafruddin Prawiranegara telah memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, sehingga sumbangan tersebut dapat menjadi teladan bagi generasi muda selanjutnya. Bila dikaji secara mendalam, sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia mengandung berbagai aspek yang sangat menarik. Aspek yang paling menarik adalah di bidang politik, militer, hukum dan pemerintahan. Bila dikaitkan dengan hal tersebut, maka penulisan skripsi ini bermaksud untuk menggugah generasi muda agar bersedia dan mengkaji peristiwa-peristiwa dalam PDRI yang kemudian mengambil nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

Dengan mempelajari sejarah Syafruddin Prawiranegara, maka kita akan tahu Perjuangan Syafruddin Prawiranegara mulai dari peranannya sampai pada sumbangannya dan kita juga bisa mengharapkan nasionalisme dan patriotisme sang tokoh bisa menjadi panutan atau acuan untuk generasi muda sekarang. Sehingga ketika mereka melakukan suatu tindakan dapat mencerminkan perilaku sang tokoh. Di samping itu juga jejak-jejak Syafruddin Prawiranegara dapat

diikuti oleh generasi muda sekarang maupun yang akan datang. Sehingga baik jejak-jejak sang tokoh maupun jasa-jasanya dapat di kenang oleh generasi sekarang dan tidak dilupakan oleh generasi muda. Dengan belajar dari keberhasilan maupun kesalahan masa lampau dapat menjadi acuan atau pijakan untuk melangkah ke masa depan.

Syafruddin Prawiranegara merupakan tokoh yang patut dikenal oleh generasi muda. Dengan melihat manfaat yang akan dicapai, maka baik kirannya apabila sejarah Syafruddin Prawiranegara Memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia diajarkan dalam pengajaran sejarah. Semoga nilai-nilai patriotisme yang melekat pada diri Syafruddin Prawiranegara dalam mempertahankan kemerdekaan dapat diwariskan kepada generasi muda untuk membangun bangsanya. Semoga sumbangsih yang berharga dari Syafruddin Prawiranegara bagi bangsa Indonesia dapat menjadi teladan bagi generasi selanjutnya. Dengan demikian sejarah Syafruddin Prawiranegara dapat menumbuhkan sikap untuk lebih mencintai sejarah bangsa Indonesia.

Demikian manfaat yang dapat diambil dari belajar sejarah Syafruddin Prawiranegara Memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Semoga skripsi ini dapat memberikan acuan kepada pembaca untuk mau belajar sejarah, terutama sejarah bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Lampiran 2 : Silabus

SILABUS

SEKOLAH MENENGAH ATAS

Mata Pelajaran : Sejarah

Kelas / Semester : 2 / 3

Alokasi Waktu : 6 Jam

Kompetensi Dasar	Kemampuan menganalisis perjuangan bangsa Indonesia di dalam mempertahankan kemerdekaan.
Hasil Belajar	Memahami sejarah Syafruddin Prawiranegara memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) tahun 1948-1949.
Indikator	1. Menjelaskan latar belakang Syafruddin Prawiranegara mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). 2. Menjelaskan peranan Syafruddin Prawiranegara selama memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). 3. Menganalisis dampak Syafrudin Prawiranegara mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) bagi perjalanan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Tujuan Pembelajaran	Siswa mampu menjelaskan : 1. Latar belakang Syafruddin Prawiranegara mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). 2. Peranan Syafruddin Prawiranegara selama memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). 3. Dampak Syafrudin Prawiranegara mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) bagi perjalanan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Langkah Pembelajaran	I. Pendahuluan - Apersepsi -Penyampaian tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. II. Kegiatan inti - Menjelaskan materi pelajaran melalui ceramah dan diskusi tentang : 1. Latar belakang Syafruddin Prawiranegara mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). A. Belanda melanggar perjanjian

	Renville. B. Jatuhnya Kota Yogyakarta. C. Presiden Soekarno mengeluarkan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara. 2. Peranan Syafruddin Prawiranegara selama memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia. A. Proses terbentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). B. Perjalanan Syafruddin Prawiranegara dalam memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). C. Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. 3. Dampak Syafruddin Prawiranegara mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) bagi perjalanan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
--	---

Sarana dan sumber pembelajaran	A. Sarana Pembelajaran 1. Gambar pemimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). 2. Peta route gerilya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra Barat 1948-1949. 3. Gambar radio Zender YB J-6 yang digunakan PDRI untuk mengumumkan terbentuknya PDRI ke seluruh dunia. B. Sumber pembelajaran 1. Buku referensi tentang PDRI yaitu : a. Ayip Rosidi, 1986, Syafruddin Prawiranegara Lebih takut kepada Allah SWT, Jakarta:Indayu Press. b. Muhammad Rasyid, 1982, disekitar PDRI, Jakarta: CV Bulan Bintang.
Penilaian	1. Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami sejarah Syafruddin Prawiranegara memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) tahun 1948-1949, dapat dilakukan dengan tes tertulis berbentuk essay baik secara tertutup maupun terbuka. 2. Memberikan tugas kepada siswa seperti :

	- Menganalisis arti pentingnya pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia. - Menganalisis dampak Syafruddin Prawiranegara mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia bagi perjalanan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 3. Mencatat serta mengamati kegiatan siswa selama dalam proses belajar dan diskusi di kelas. 4. Porto folio : - Guru mencatat aktifitas setiap siswa sesuai dengan kategori kegiatan yang telah ditentukan. - Guru menyimpulkan seluruh kegiatan siswa, baik secara individual maupun kelompok.
--	--

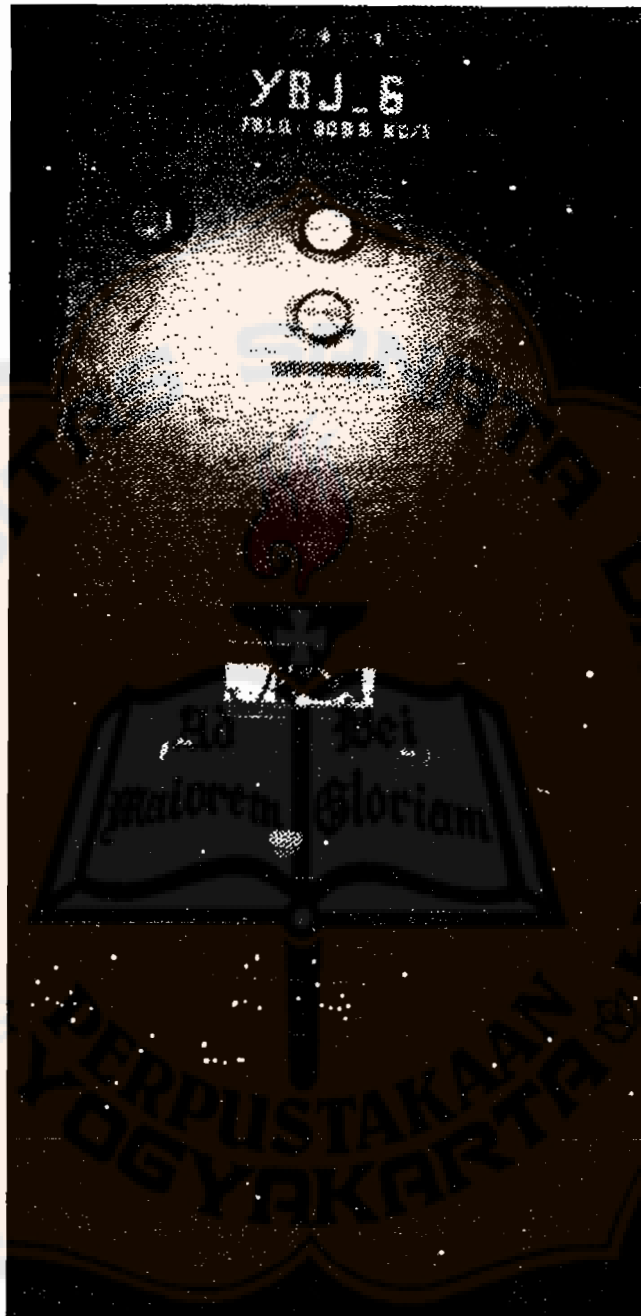
Lampiran 3 : Gambar Pemimpin PDRI Syafruddin Prawiranegara.



**Mr. Syafruddin
Prawiranegara
Ketua PDRI**

Sumber : Sardjono dan Marsadji, 1982, *Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)*, Jakarta : Tirtamas.

Lampiran 4 : Gambar Radio Zender YBJ – 6



Radio Zender YBJ-6 yang Digunakan PDRI
Untuk Mengumumkan Terbentuknya PDRI ke Seluruh Dunia.

Sumber : Sardjono dan Marsadji, 1982, *Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)*, Jakarta : Tirtamas.

Lampiran 5 : Gambar Pemimpin PDRI dan Pemimpin Republik Ketika Akan Kembali ke Yogyakarta.

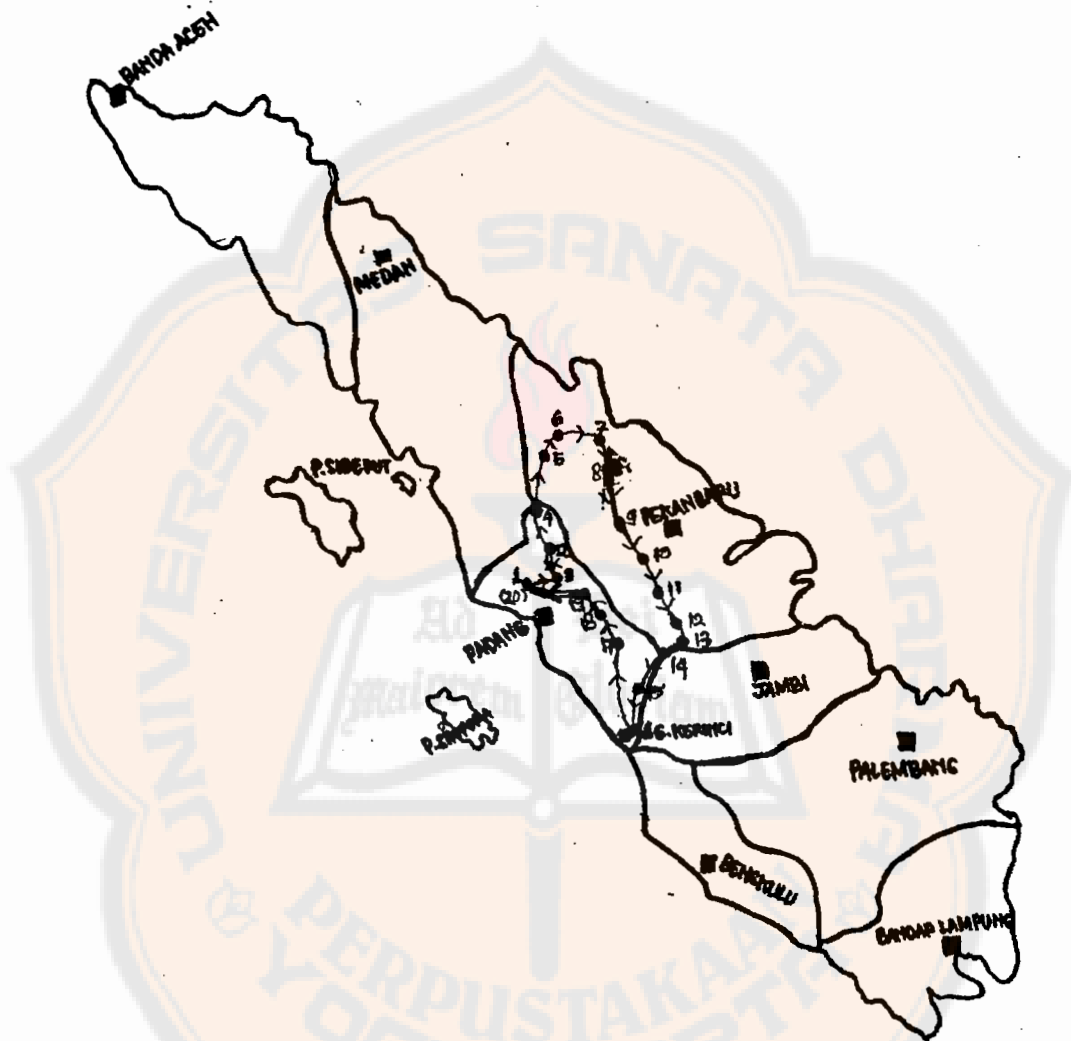


Ketua PDRI, Mr. Syafruddin Prawiranegara beserta seluruh staf dan rakyat di pedalaman Sumatra bergambar bersama utusan pemerintah RI Yogyakarta, M. Natsir (ujung kanan paling depan).

Sumber : Ayib Rosidi, 1986, *Syafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*, Jakarta : INTI IDAYU Press.

Lampiran 6 : Peta Sumatra

**PERJALANAN SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA
DALAM MEMIMPIN PDRI DI SUMATRA TAHUN 1948 - 1949**



KETERANGAN :

- | | | |
|-------------------|---|-------------|
| 1. Bukittinggi | 11. Batang Karing | → = Pergi |
| 2. Payakumbuh | 12. Kalirinjaro | ↔ = Kembali |
| 3. Halaban | 13. Pulau Punjung | |
| 4. Lubuk Bangku | 14. Sungai Dareh | |
| 5. Muara Mahat | 15. Abai Sangir | |
| 6. Bangkinang | 16. Bidar Alam | |
| 7. Tratak Buluh | 17. Sumpur Kudus | |
| 8. Lipat Kain | 18. Sungai Naning | |
| 9. Muara Lembu | 19. Koto Kaciek | |
| 10. Teluk Kuantan | 20. Bukittinggi (kembali ke Yogyakarta) | |

Lampiran 7: Kronologis Peristiwa Di Sekitar Berdirinya PDRI Tahun 1948-1949

**KRONOLOGIS PERISTIWA DI SEKITAR BERDIRINYA PDRI
TAHUN 1948-1949**

- 
- 17 Januari 1948 : Amir Syarifudin menandatangani Persetujuan Renville.
- 23 Januari 1948 : Kabinet Amir Syarifudin jatuh.
- 29 Januari 1948 : Kabinet Hatta dilantik, Syafruddin Prawiranegara diangkat menjadi Menteri Kemakmuran. Sesuai dengan programnya Kabinet Hatta kemudian melanjutkan Persetujuan Renville. (Perundingan antara Republik Indonesia dan Belanda selalu mengalami hambatan).
- 18 November 1948 : Mohammad Hatta, Syafruddin Prawiranegara, Lukman Hakim, Kolonel Hidayat pergi ke Sumatra untuk membentuk Pemerintah Darurat, Namun sebelum Pemerintah Darurat dibentuk Mohammad Hatta dipanggil oleh KTN untuk melanjutkan perundingan dengan Belanda.
- 18 Desember 1948 : Di Jakarta, Dr. Beel (Wakil Mahkota Kerajaan Belanda) secara sepihak menyatakan tidak terikat dengan Perjanjian Renville. Dengan demikian, maka Belanda melanggar Perjanjian Renville.
- 19 Desember 1948 : * Belanda menyerang pusat Pemerintahan Republik Indonesia, Yogyakarta dan menyerang Bukittinggi, Sumatra.

* Belanda berhasil menawan para Pemimpin Republik Indonesia, Soekarno dan Hatta serta para menteri dan menawan mereka Bangka. Dengan demikian kota Yogyakarta jatuh.

* Sebelum ditawan Presiden memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk PDRI.

21 Desember 1948 : Rombongan Syafruddin Prawiranegara Pergi meninggalkan Bukittinggi untuk menuju ke Halaban

22 Desember 1948 : * Bukittinggi diduduki oleh Belanda.
* Syafruddin Prawiranegara memproklamirkan berdirinya PDRI di Halaban, di sebuah perkebunan teh di kaki gunung Sago dan menyiarkannya ke seluruh pelosok tanah air dan dunia dengan menggunakan Zender YBJ-6.

24 Desember 1948 : Rombongan Syafruddin Prawiranegara meninggalkan Halaban dan pergi bergerilya di Sumatra.

25 Desember 1948 : * Rombongan Syafruddin Prawiranegara tiba di Lubuk Bangku.

* Di tempat ini diterima kabar bahwa Belanda telah menguasai Payakumbuh.

- 26 Desember 1948 : * Pagi harinya rombongan tiba di Muaro Mahat, kemudian rombongan melanjutkan perjalanan ke Bangkinang.
- * Sore harinya rombongan tiba di Bangkinang. Di Bangkinang diadakan rapat mengenai pembagian tugas yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara.
- * Beberapa saat kemudian kota Bangkinang secara tiba-tiba dibom oleh Belanda.
- 28 Desember 1948 : Kolonel A. Halim dan Kapten Sofyan Ibrahim dari Pekanbaru tiba di Bangkinang
- 29 Desember 1948 : Rombongan Syafruddin Prawiranegara meninggalkan Bangkinang.
- 1 Januari 1949 : Malam hari rombongan Syafruddin Prawiranegara tiba di Lipat Kain. Di tempat ini diadakan rapat untuk membicarakan situasi di daerah itu. Setelah rapat selesai rombongan kemudian meninggalkan Lipat Kain untuk melakukan perjalanan ke Teluk Kuantan. Beberapa saat kemudian rombongan tiba di Teluk Kuantan. Di tempat ini rombongan menginap di rumah Dr. Ilvas. Baru sebentar beristirahat, Belanda membom dan menembaki kendaraan di daerah itu. Kemudian rombongan Syafruddin Prawiranegara bergegas meninggalkan Teluk Kuantan untuk menuju

ke Batang Karing. Setelah sampai di Batang Karing rombongan tiba di Kiliranjaro setelah itu rombongan melanjutkan perjalanan ke Pulau Punjung, di tempat ini pemancar diaktifkan. Beberapa anggota PDRI memberikan keterangan kepada rakyat dengan tujuan untuk mengobarkan semangat rakyat. Beberapa saat kemudian rombongan melanjutkan perjalanan kembali untuk menuju ke Abai Sangir. Di tempat ini rombongan tinggal untuk beberapa hari.

- 20-23 Januari 1949 : Diadakan konferensi di negara Asia di New Delhi yang diprakarsai oleh Nehru.
- 24 Januari 1949 : * Rombongan tiba di Bidar Alam.
 * Setelah melihat keadaan Bidar Alam rombongan memutuskan untuk menjadikan Bidar Alam sebagai tempat kedudukan pimpinan pusat PDRI sampai bulan April. Di Bidar Alam PDRI mengumumkan eksistensinya.
- 25 Maret 1949 : UNCI di bawah Merle Cochran mendorong Indonesia dan Belanda untuk melakukan perundingan.
- 2 April 1949 : Mohammad Roem mengirimkan surat kepada UNCI yang menyatakan siap mengadakan perundingan dengan Belanda.



- 14 April 1949 : Perundingan dengan Belanda dan Indonesia dibuka.
- 7 Mei 1949 : Pihak Indonesia dan Belanda mengeluarkan pernyataan yang dikenal dengan Pernyataan Roem-Royen.
- 14-17 Mei 1949 : PDRI mengadakan rapat besar di Sumpur Kudus, dalam rapat tersebut Syafruddin Prawiranegara menyesali langkah-langkah diplomatik yang ditempuh Soekarno dan Hatta.
- 14 Juni 1949 : Syafruddin Prawiranegara mengeluarkan pernyataan mengenai isi Perjanjian Roem-Royen.
- 24 Juni 1949 : Belanda mulai meninggalkan Yogyakarta.
- 30 Juni 1949 : Kota Yogyakarta telah kosong oleh tentara Belanda.
- 1 Juli 1949 : PDRI mengadakan rapat di Sungai Naning dalam rapat tersebut dibicarakan mengenai masalah pengembalian mandat dan penyambutan utusan dari pusat.
- 3 Juli 1949 : M. Natsir, Leimena dan Hasim tiba di Bukittinggi
- 5 Juli 1949 : M. Natsir, Leimena dan Hasim tiba di Payah - Kumbuh dan mengirim radiogram pada Ketua PDRI.
- 6 Juli 1949 : Di desa Koto Kaciek diadakan pertemuan antara rombongan Natsir dan rombongan PDRI yang diketuai oleh Syafruddin Prawiranegara.

- 6 Juli 1949 : Soekarno dan Hatta beserta para menteri meninggalkan Bangka untuk menuju ke Yogyakarta.
- 9 Juli 1949 : Rombongan Syafruddin Prawiranegara dan Natsir meninggalkan Bukittinggi untuk kembali ke Yogyakarta.
- 10 Juli 1949 : Rombongan Syafruddin Prawiranegara tiba di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta.
- 13 Juli 1949 : Diadakan rapat kabinet, dalam rapat tersebut Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Dengan dikembalikannya mandat maka berakhir juga masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.

